

GERAKAN MAHASISWA
Dalam Perspektif Karl Marx

Abdullah Muzakar

Penerbit:
Yayasan Suluh Rinjani

GERAKAN MAHASISWA DALAM PERSPEKTIF KARL MARX

Abdullah Muzakar

Editor: Abdurasyad

Lay Out/ Desain Sampul: Yahya Abdul Kuddus

Penerbit **YAYASAN SULUH RINJANI**

Alamat: RT 11 Seruni Selong, Kab. Lombok Timur

Propinsi Nusa Tenggara Barat. HP. 081918192223

Bekerjasama dengan

UNIVERSITAS HAMZANWADI

Jalan TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid Kode Pos. 83612 Pancor, Selong

Lombok Timur Telp. (0376) 21394. Fax. (0376) 22954 Website:<http://www.hamzanwadi.ac.id>, e-mail: universitas@hamzanwadi.ac.id

hamzanwadi.ac.id, e-mail: universitas@hamzanwadi.ac.id

Cetakan Pertama: November 2019

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

All Rights Reserved

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Gerakan Mahasiswa – Abdullah Muzakar – Lombok NTB

Yayasan Suluh Rinjani

ix + 176 hlm. 14 cm x 21 cm.

ISBN: 978-602-17922-4-7

Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda yang banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

MOTTO

“Dan hendaknya ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar; merekalah yang beruntung”
(Al-Imran 104)

“Tunduk tertindas atau bangkit melawan, sebab mundur adalah penghianatan” (SMKR)

“Diam melihat penindasan adalah sama artinya melegalkan penindasan”

“Kita tidak perlu takut pada hantu komunis, tapi yang perlu kita takuti adalah merajalelanya penyakit kemiskinan”

PERSEMBAHAN

Karya ini aku persembahkan kepada mereka yang selalu memberikan aku spirit untuk selalu berani mencoba dan belajar, serta berbuat yang terbaik. Curahan kasih sayang mereka telah menumbuhkan rasa percaya diriku, pada kemampuan yang aku miliki:

- Pertama, Kedua orang tuaku (Ibu Djamiah dan Bpk. Amrillah), yang tidak pernah mengeluh dan selalu tersenyum menghadapi gelombang tuntutan anak-anaknya.
- Kedua, Ketiga Saudaraku (Kak Abdul Azizurrahman, Kak Imamul Huda, dan Dek Siti Uswatun Hasanah), dengan ikatan persaudaraan yang kuat telah memberikan kehangatan dan kebanggaan sebagai keluarga.

KATA PENGANTAR

Materi Buku ini sudah dipersiapkan sejak lama, hanya saja karena satu dan lain hal terutama kesibukan penulisnya sebagai Dosen di Universitas HAMZANWADI, membuatnya ‘mengendap’ ditelan waktu. Namun aksi unjuk rasa mahasiswa tanggal 21 dan 22 September 2019 menyentak kesadaran. Mendorong penulis kembali bekerja keras dan dalam tempo relatif singkat Buku ini rampung.

Bila Buku ini dibaca, terasa sekali eforia gerakan mahasiswa 1998 yang berhasil melengserkan Soeharto. Saat itu penulisnya berstatus aktifis mahasiswa. Sehingga semangat yang dihadirkan adalah gerakan menumbangkan rezim yang berkuasa. Di sisi lain, materi Buku ini merupakan naskah akademik yang sudah dipertahankan di depan Dewan Penguji dan menghantarkan penulisnya menjadi sarjana Sosiologi. Jadi Buku ini merupakan perpaduan hasil kreasi seorang aktifis gerakan dan karya ilmiah dengan metodologi ketat.

Penerbit menyadari resiko besar menerbitkan buku yang mengusung nama Karl Marx, karena akan cepat dicap macam-macam. Bila itu diskursus ilmiah, silahkan saja.

Namun ditegaskan; Buku ini bukan buku kiri! Melainkan hasil karya ilmiah untuk memahami gerakan mahasiswa. Perspektif Karl Marx digunakan sebatas sebagai ‘pisau’ analisis. Apakah nanti analisisnya tepat atau tidak, terserah kepada Pembaca budiman. Jadi di Buku ini Karl Marx sebatas teoritikus, bukan sebagai demagog, bukan sebagai Tuan Guru, dan apalagi sebagai Nabi. Disamping itu, latar belakang penulisnya yang berpendidikan dasar-menengah Madrasah, kedua orang tuanya guru agama (Islam), dan saat ini dia juga bekerja di perguruan tinggi berafiliasi Islam tradisional dengan organisasi Nahdlatul Wathan-nya. Kesemua itu menjaminkan Buku ini jauh dari demagogi Marxian.

Akhirnya, Buku ini dapat diselesaikan atas kerja keras dan partisipasi berbagai pihak. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian buku ini diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Tim Editor yang telah bekerja keras mengedit buku ini. Disadari bahwa buku ini belum sempurna. Oleh karena itu, diharapkan saran konstruktif bagi penyempurnaannya ke depan.

Selong, Oktober 2019

Penerbit

DAFTAR ISI

MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1	
LATAR DEPAN GERAKAN MAHASISWA	1
BAB 2	
KARL MARX	
DALAM KONSTELASI GERAKAN.....	9
A. Filsafat Berpikir Karl Marx.....	9
B. Agama dan Alienasi	15
C. Kelas, Kesadaran dan Perjuangan Kelas	22
D. Konsepsi Penindasan dan Keberadaan Negara	37
BAB 3	
GERAKAN MAHASISWA 1908 - 1928	45

BAB 4	
ANGKATAN '45, PERGOLAKAN FISIK, DAN REVOLUSI SOSIAL.....	62
BAB 5	
GENERASI MAHASISWA '66.....	72
BAB 6	
GERAKAN MAHASISWA 70-AN, SAMPAI PERISTIWA “MALARI”	85
BAB 7	
RADIKALISASI GERAKAN MAHASISWA '98	94
BAB 8	
POLA GERAKAN MAHASISWA 1998 DARI AKSI ELITISME KE POPULISME	104
BAB 9	
DINAMIKA GERAKAN MAHASISWA YOGYAKARTA	108
BAB 10	
GERAKAN MAHASISWA 2000	114
A. Awal Mula Munculnya Gerakan.....	114
B. Nama Gerakan	119
C. Isu-Isu Gerakan.....	122
D. Ideologi Gerakan	129
BAB 11	
MARXISME DAN GERAKAN MAHASISWA	134
A. Makna Sebuah Gerakan	134
B. Varian Marxisme	138
C. Posisi Mahasiswa	142

BAB 12	
GERAKAN MAHASISWA DAN IDEOLOGI	151
BAB 13	
PEMIKIRAN KARL MARX DALAM GERAKAN MAHASISWA	159
BAB 14	
EPILOG GERAKAN MAHASISWA.....	164
DAFTAR PUSTAKA	169
Internet, Artikel	173
RIWAYAT HIDUP PENULIS	175
CATATAN	176

BAB 1

LATAR DEPAN GERAKAN MAHASISWA

Kekuatan mahasiswa ternyata dalam kurun sejarahnya di berbagai belahan dunia telah mampu menunjukkan dirinya sebagai salah satu kekuatan strategis yang menentukan terjadinya perubahan sejarah bangsa-bangsa di Eropa, Amerika, Amerika Latin, dan juga Asia.

Khusus di Indonesia, keberadaan kekuatan mahasiswa telah memiliki sejarah yang lama dan menentukan dalam setiap pergantian kekuasaan, baik itu pada masa kolonial ataupun pada masa kemerdekaan. Mahasiswa selalu mampu dalam memainkan posisi strategis untuk menentukan jalannya perubahan.

Gerakan mahasiswa¹ bisa terjadi di dalam kampus atau

1 Sebuah gerakan mahasiswa memang tidak harus penuh gebyar, tidak harus serba besar. Yang kecil pun boleh (jumlah anggotanya tidak banyak). Hal ini pun memang kemudian diakui sendiri oleh Marsilam Simanjuntak. Betapapun kecilnya-seperti yang telah dilakukan dalam gerakan-gerakan mahasiswa seperti MM (Mahasiswa Menggugat), KAK (Komite Anti Korupsi), Golput, dan lain-lain – tetapi karena ini dilakukan oleh mahasiswa, lapisan pemuda dan intelektual, maka ia akan selalu diperhitungkan penguasa. Tanpa harus dicari definisinya lebih dulu (Marsilam Simanjuntak, dalam LP3ES, 1975: 173).

bisa di luar kampus. Hanya saja memang tidak perlu semua mahasiswa terlibat. Pada umumnya, para aktivis mahasiswalah yang bergerak. Aktivis di sini diartikan sebagai pemuda (mahasiswa) yang selain studi juga giat di dalam kelompok-kelompok diskusi, Lembaga Swadaya Masyarakat serta organisasi-organisasi ekstra dan intra universitas serta kepemudaan.²

Berkaitan dengan kekuatan mahasiswa sebagai salah satu kekuatan integral rakyat, maka menjadi persoalan yang menarik bagaimana gerakan mahasiswa juga dilihat dalam sisi latar belakang kemunculannya, dengan segenap varian wacana dan pola gerakannya di setiap periodisasi zaman.

Berkorelasi dengan pemikiran Karl Marx, ternyata gerakan mahasiswa telah memiliki hubungan historis yang cukup tua. Hal ini ditunjukkan salah satunya oleh beberapa aktivis Perhimpunan Indonesia (PI), seperti Hatta, Gatot Mangkupraja, dan Subarjo. Mereka sangat terpengaruh oleh wacana Karl Marx yang sedang berkembang di Eropa pada permulaan tahun 1920-an.

Hal yang menjadi daya tarik utama pemikiran Karl Marx, sehingga mampu menarik keinginan mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di negeri Belanda waktu itu adalah terletak dalam penjelasannya tentang situasi penjajahan dan filsafat determinisme historisnya, yang mampu membangun kesadaran akan arti penjajahan di kalangan mahasiswa Indonesia.

Lebih jauh mengkaji pengaruh pemikiran Karl Marx terhadap gerakan mahasiswa Indonesia, maka sudah barang tentu beberapa pertanyaan kritis tentang seberapa besar pengaruh pemikiran Karl Marx terhadap munculnya gerakan

2 Prisma, Juni 1987: 4

mahasiswa dengan latar belakang wacana dominan yang membangun kesadaran akan pentingnya sebuah gerakan, bagaimana gerakan mahasiswa merumuskan pola gerakannya ketika harus berhadapan dengan relasi kekuasaan negara dan pemerintahan yang ada.

Ketika Karl Marx membangun pemikirannya dengan ‘*background*’ sejarah masyarakat industri di Inggris, yang banyak membicarakan atau mengulas keberadaan kaum buruh industri di Inggris khususnya dan kaum proletar umumnya, apakah juga mampu memiliki relevansi signifikan untuk menjawab dan menjelaskan fenomena gerakan mahasiswa, ketika dalam perjalanan sejarah ternyata sektor mahasiswa mampu mengambil peran sebagai bagian integral perlawanan radikal rakyat, tatkala berhadapan dengan kekuatan-kekuatan kapitalisme (penjajah), dan penguasa feodal yang ada? dan apakah gerakan mahasiswa juga memiliki pola yang sama dalam membangun gerakan perlawanan, sebagaimana buruh, petani dan kekuatan proletar lainnya ketika juga harus bergerak dan membangun infrastruktur gerakan? Sekalipun Karl Marx sendiri tidak pernah menghitung kekuatan mahasiswa sebagai salah satu pelopor perubahan.

Mangun Wijaya pernah berkata bahwa gerakan rakyat sebenarnya tidak pernah berhenti bergerak, tinggal persoalannya adalah bagaimana kita memahaminya dan dari mana kita melihatnya.³ Berkaitan dengan itu, dalam setiap kurun sejarah gerakan mahasiswa juga apakah berlaku idiom sebagaimana Mangun Wijaya katakan, bahwa mahasiswa sebagai bagian integral kekuatan rakyat juga tidak pernah

3 Mangun Wijaya., “Menggapai Kekuasaan, Menguatkan Gerakan Masyarakat,” dalam Prisma, edisi 7, PT Pustaka LP3ES, 1989.

berhenti. Sekalipun pada aspek posisi dan peran dalam sektor sosial, politik dan budaya bisa jadi berbeda dengan sektor-sektor rakyat lainnya.

Untuk membedah posisi dan peran mahasiswa dan kemudian mencari titik singgungnya dengan rakyat lainnya (buruh, tani, nelayan, dan lain-lain), ketika berhadapan dengan realitas penindasan, khususnya rakyat *vis a vis* penguasa negara, maka kita bisa melihat dengan analisis struktural dan kultural. Di mana secara struktural sebenarnya posisi mahasiswa sama lemah dan tertindasnya dengan posisi rakyat lainnya, karena mahasiswa bagaimanapun menjadi bagian dari subordinasi negara, dan juga mereka sama-sama tidak memiliki akses politik (kekuasaan) dan ekonomi, sebagaimana rakyat kecil lainnya dihadapan kekuasaan negara. Hal ini sudah tentu memberikan implikasi langsung ataupun tidak langsung bagi terjadinya realitas penindasan yang sama terhadap mahasiswa, sebagaimana buruh, tani, nelayan dan lain-lain, ketika berhadapan dengan kekuatan penguasa negara yang represif, otoriter, fasis dan korup.

Bagaimana dengan aspek kulturalnya? Bahwa secara kultural memang relatif mahasiswa lebih diuntungkan dibanding dengan rakyat kecil lainnya, mengingat status yang dimilikinya. Mahasiswa memiliki kelebihan peluang dan kesempatan dalam mengakses informasi, terlebih kasuistik yang terjadi Indonesia, di mana sistem kehidupan masyarakatnya berlangsung proses diferensiasi yang sangat tajam menyangkut berkehidupan yang layak, khususnya pada kesempatan dan peluang mendapatkan pengajaran bagi segenap lapisan rakyat, telah menjadi autopia. Pendidikan hanya dirasakan oleh masyarakat yang relatif mampu secara ekonomi. Kondisi demikian secara substansial sebenarnya menunjukkan suatu problema yang tidak jauh berbeda

dengan ketika bangsa Indonesia berada di bawah penguasaan penjajah. Masa itu yang bisa mengenyam dunia pendidikan adalah orang-orang dari golongan-golongan masyarakat yang memiliki status kebangsawanan, priyayi dan anak-anak keturunan Belanda. Realitas ini menunjukkan kepada kita, bagaimana posisi mahasiswa pada aspek kultural cukup diuntungkan, terlebih ketika Orde Baru berkuasa.

Keuntungan mahasiswa pada aspek kultural di atas sekaligus mendudukkan mahasiswa dalam stratifikasi sosial kelas menengah, atau dalam konteks Indonesia lebih tepat disebut golongan menengah, dan sekaligus juga menempatkan mahasiswa pada posisi sebagai sebuah golongan atau kelompok tersendiri yang lepas dari kelas bawah (rakyat) secara umum serta terlepas dari kelas atas.

Pertentangan atau kontradiksi di Indonesia, sebenarnya terjadi antara penguasa negara dan segelintir orang yang menguasai sumber daya ekonomi yang mewakili kelas borjuis di satu sisi, dan rakyat pekerja seperti tani, buruh, nelayan, pedagang kecil yang mewakili kelas proletar di sisi lain. Kelas atas borjuis melakukan penindasan terhadap kelas bawah rakyat, baik melalui kekerasan politik maupun penghisapan ekonomi. Fenomena ini begitu kentara diperagakan oleh penguasa Orde Baru Soeharto, selama 32 tahun masa kekuasaannya.

Lalu, bagaimana keberpihakan mahasiswa sebagai kelas menengah ketika perjuangan rakyat dalam membebaskan diri dari penindasan secara politik dan ekonomi mengalami tekanan? Sementara itu, dalam kurun sejarahnya gerakan mereka tidak jarang menimbulkan situasi paradoksial dan tidak konsisten dalam menyuarkan aspirasi dan keberpihakan itu. Persoalan demikian tidak hadir dalam masa pasca Indonesia merdeka saja, melainkan telah berlangsung

jauh sebelumnya. Namun, bagaimanapun sejarah ikut mencatat bahwa posisi dan peran mahasiswa cukup strategis sebagai kelompok yang cukup netral dan independen. Peran mereka juga telah mampu memberikan semangat perjuangan bagi rakyat dalam melawan realitas penindasan.

Membicarakan proses perubahan sosial, politik dan ekonomi, fungsi dan peran mahasiswa sangat strategis dalam memainkan posisinya sebagai generasi muda terdidik dan senantiasa kritis melihat persoalan ketidakadilan dan penindasan. Tidak bisa dinisbikan akan keberadaannya sebagai salah satu komponen integral perjuangan rakyat, sebagaimana yang dikatakan oleh Hariman Siregar aktivis mahasiswa 1974 bahwa, peranan mereka dari dulu hingga sekarang terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia, adalah sama. Yakni, sebagai salah satu pemeran social control yang paling depan.⁴

Mempelajari peristiwa historis gerakan mahasiswa Indonesia mulai dari generasi 1908, 1928, 1945, 1974, 1980 dan mungkin generasi 1990-an ada beberapa kesamaan pola gerakan yang menarik untuk dikritisi lebih lanjut terutama dalam konteks melihat dan mengkaji seberapa besar ide dan gagasan Karl Marx berkorelasi signifikan dengan pembentukan wacana dan apa yang disuarakan oleh mahasiswa, yaitu di seputar persoalan anti kolonialisme, feodalisme, kapitalisme, represifitas negara dan pemerintah serta ketidakadilannya terhadap rakyat kecil, anti penanaman modal asing dan dampak-dampak kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang seperti di Indonesia dan beberapa isu lainnya.

4 Hariman Siregar, Mahasiswa Masih Sebagai "Sosial Control," dalam Pengantar buku Ridwan Saidi "Mahasiswa Dalam Lingkaran Politik," PT. Mapindo Mulathama (Mapussy Indonesia Group), 1989, hal. 29.

Hal mana gerakan mahasiswa memperlihatkan militansi perlawanan yang tidak kalah dengan apa yang dilakukan oleh gerakan buruh, tani dan gerakan kaum proletar lainnya.

Memahami betapa pentingnya posisi dan peran mahasiswa dalam mendorong proses perubahan sosial, politik dan kekuasaan negara kearah yang lebih menyentuh selera keadilan bagi rakyat, maka menjadi menarik untuk melihat sisi legitimasi wacana dan teoritik gerakan mahasiswa Indonesia, dalam hubungannya dengan pengaruh pemikiran dan gagasan Karl Marx yang telah banyak mengilhami dan memberikan inspirasi bagi para pejuang humanis dan kelompok-kelompok gerakan rakyat dalam memperjuangkan hak-hak yang seharusnya menjadi milik kaum buruh, kaum petani dan kaum proletar lainnya.

Tumbangny rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama kurang lebih 32 tahun oleh hantaman arus reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa, telah semakin memperkuat fakta sejarah bagaimana posisi dan peran mahasiswa dengan gerakannya, menjadi hal penting untuk dikaji dengan lebih seksama dan mendalam tentang latar belakang, motivasi dan dorongan-dorongan yang telah mengkondisikan gerakan mahasiswa Indonesia dalam melihat dan memperjuangkan kondisi-kondisi penindasan dan ketidakadilan.

Berangkat dari latar belakang masalah tentang bagaimana gagasan dan pikiran-pikiran Karl Karl Marx telah mampu memberikan dorongan perlawanan serta inspirasi garakan dan perjuangan kaum buruh, petani dan kaum proletar lainnya, maka bagaimana dengan gerakan mahasiswa?

Pikiran dan gagasan Karl Karl Marx, dalam perkembangan sejarah telah mampu memberikan acuan wacana teori, diskursus dan kesadaran terhadap problem-problem penindasan dan ketidakadilan bagi kaum buruh,

petani dan kaum proletar lainnya, untuk berjuang dan menggugat kaum borjuis/kapitalis (para pemilik modal) terhadap perilaku keserakahan dalam mengeksploitasi dan menindas kaum proletar. Sejalan dengan pengaruh gagasan dan pikiran-pikiran Karl Karl Marx, dalam konteks gerakan mahasiswa, apakah juga terjadi bagaimana yang terjadi pada gerakan perlawanan buruh, tani dan kaum proletar lainnya, yang membangun gerakan perlawanan terhadap problem-problem penindasan yang dialaminya, guna merebut hak dan keadilan yang seharusnya mereka dapatkan. Bagaimana dengan gerakan mahasiswa? apakah ia muncul sebagai gerakan perlawanan juga memiliki latar belakang yang relatif sama sebagaimana gerakan kaum buruh dan proletar lainnya?

Perjalanan sejarah Indonesia telah menunjukkan bagaimana mahasiswa dengan gerakannya telah mampu memainkan posisi strategisnya sebagai generasi terdidik, dan sudah tentu posisi dan peran mahasiswa disetiap periodisasi kemunculannya adalah merupakan refleksi dari kondisi sosial, politik dan kekuasaan yang ada, dimana mahasiswa itu dituntut untuk mampu memainkan posisi strategis. Begitu juga halnya dengan pembentukan pola gerakan mahasiswa dengan latar belakang isu yang dimainkannya disetiap periodisasi, bahwa ia selalu merupakan titik balik sebagai respon terhadap kondisi sosial, politik, dan kekuasaan yang ada, apakah disini juga Karl Marx dengan gagasannya telah juga mampu memberikan pengaruh sebagai pilihan alternatif bagi pembentukan pola gerakan dan perumusan isu-isu perlawanan, ketika ia muncul sebagai sebuah gerakan perlawanan.

BAB 2

KARL MARX DALAM KONSTELASI GERAKAN

A. Filsafat Berpikir Karl Marx

Memahami lebih jauh bangunan pemikiran Karl Marx, maka menjadi mutlak untuk memahami di tingkat filsafat berpikir yang digunakan Karl Marx, yakni apa yang dinamakan filsafat Materialisme Dialektika dan Historis (MDH). Bangunan pemikiran filsafat Karl Marx, harus diakui sangat dipengaruhi oleh dua tokoh filosof besar di zamannya yakni Hegel dan Feurbach.

Hegel dengan filsafat idealistisnya dengan mana ia menjelaskan pola-pola perkembangan dan perubahan sejarah... dengan inti modelnya adalah menggunakan analisa dialektik ... dimana pertentangan diantara tesis, antithesis dan sintesa.⁵ Hegel percaya bahwa kekuatan sejarah yang akan membawa perubahan adalah munculnya ide-ide dengan mana roh akal budi menjadi lebih lengkap

5 Doyle Paul Johnson., "Teori Sosiologi Klasik dan Modern," edisi I, PT. Gramedia, Jakarta, cet I, 1986, hal 122.

manifestasinya. Dan disinilah kemudian Karl Marx berbeda dengan pemikiran Hegel. Dia menegaskan bahwa metode dialektika yang dikembangkan oleh Hegel merupakan metode dialektika yang bertolak belakang dan bahkan merupakan lawan langsung dari metode dialektikanya.

Titik tolak perbedaan metode dialektik ditunjukkan oleh Karl Marx dengan menunjukkan bahwa bagi Hegel, "...proses berpikir yang dengan nama "*ide*" artinya diubah menjadi subyek yang berdiri sendiri, adalah pencipta (*demiurge*) daripada dunia yang nyata, itu hanyalah bentuk luar gejala dari pada '*ide*'. Sebaliknya bagi saya, yang ideal itu, tidaklah lain dari pada dunia materi yang dicerminkan oleh pikiran manusia dan diwujudkan menjadi bentuk-bentuk pikiran.⁶

Proses sintesis dari pemikiran filsafat Hegel diubah oleh Karl Marx dengan tetap mempertahankan metode dialektikanya. Sintesis yang dilakukan Hegel oleh Karl Marx dilandaskan pada realitas sosial masyarakat. Karl Marx menyangsikan bahwa dalam kenyataan sintesis Hegelian itu tidak terbukti. Masyarakat justru menampakkan diri sebagai keadaan immoral dari sebuah dunia yang terpecah berkeping-keping. Oleh karena itu dia tidak percaya bahwa rekonsiliasi masyarakat diukur berdasarkan '*ide*' moralitas, karena realitas masyarakat justru menunjukkan masyarakat berada pada kondisi immoralitas. Parameter yang digunakan oleh Hegel inilah kemudian dikatakan oleh Karl Marx sebagai sebuah hal yang menipu dan hanya berlangsung dalam pikiran sang filsuf. Menurut Karl Marx, moralitas hanya bisa dicapai dari kontradiksi-kontradiksi yang ada di dalam masyarakat. Dengan negasi terus-menerus dari masyarakat tersebut. Hal

6 J.W. Stalin "Matrrialisme Dialektika dan Historis," Yayasan Pembaharuan, Jakarta, 1955, hal. 4.

ini telah menunjukkan bagaimana Karl Marx menerapkan dialektika Hegel ke dalam kenyataan sosial.⁷

Lebih lanjut Karl Marx mengembangkan pemikirannya dengan menghubungkan fakta empiris. Dilihat oleh Karl Marx bukan krisis dalam roh, melainkan krisis ekonomi yang bersifat empiris. Oleh Karena itu Karl Marx memfokuskan diri pada kerja sosial, dia menemukan “inti rasionalitas” dialektika Hegel itu dalam hubungannya dengan kerja upahan dan modal, sampai dengan terjadinya proses alienasi, eksploitasi dan perlawanan kelas.

Dia juga membantah bahwa penentu proses sejarah itu bukan disebabkan oleh ‘*ide*’ sebagaimana yang dirumuskan oleh Hegel, akan tetapi yang menentukan proses perubahan sejarah itu adalah dunia materi, karena itu untuk memahami realitas sosial, Karl Marx menekankan bukanlah dilihat dari ‘*ide*’ yang ada pada masyarakat, akan tetapi apa yang ada di dalam pabrik-pabrik dan tambang-tambang dimana buruh atau pekerja sedang mempertaruhkan nyawanya demi mencukupi dunia materi. Adapun kerangka umum perbedaan pemikiran Hegel dengan Karl Marx, dapat dilihat dari perbandingan di bawah ini:

7 F. Budi Hardiman., “Menuju Masyarakat Komunikatif, Ilmu, Masyarakat, Politik dan Pasmoderenisme menurut Hurgen Haberman,” Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1993, hal 65.

Tabel 2.1
Perbandingan Pemikiran Hegel dan Karl Marx
(Penjelasan tentang pola-pola perubahan
dan perkembangan sejarah)

No	Pemikiran	Hegel	Karl Marx
1	Aliran Filsafat	Idealis	Matrialis
2	Metode Analisa	Dialektika- Idealistis	Dialektika- Matrialis
3	Dasar Pemikiran	Ide	Determinasi Ekonomi
4	Idealisasi Pemikiran	Roh Akal Budi	Struktur Ekonomi

Sumber: Diolah dari data pustaka

Ketegasan Karl Marx dalam menolak dasar filsafat Hegel tentang ide-ide adalah produk kesadaran produktif individu-individu, tetapi kesadaran tidak terpisah dari lingkungan material dan sosial, selalu kesadaran akan lingkungannya. Ia menyatakan tekanan ini sebagai berikut: "Berlawanan langsung dengan filsafat Jerman yang turun dari langit ke bumi, di sini kita naik dari bumi ke langit. Itu untuk mengatakan, kita tidak bertolak dari apa yang dikatakan, digambarkan, dipahami orang, juga tidak dari orang seperti yang diceritakan, dipikirkan, dibayangkan, dimengerti, dengan maksud supaya kita sampai ke orangnya itu sendiri. Kita berangkat dari orang yang riil, aktif dan atas dasar proses riil. Aktif dan atas dasar proses kehidupan riil mereka kita memperlihatkan perkembangan reflex ideologis serta gemanya dari proses kehidupan yang riil ini. Moralitas, agama, metafisika, semua ideologi lainnya serta bentuk-bentuk kesadaran yang berhubungan dengan itu tidak lagi memperlihatkan rupa kemandirian. Kehidupan tidak

ditentukan oleh kesadaran, tetapi kesadaran ditentukan oleh kehidupan.”⁸

Dasar pemikiran filsafat Materialisme Dialektika dan Historis (MDH) inilah yang kemudian membawa Karl Marx sampai pada kesimpulan dalam menjelaskan perlawanan kelas yang ditindas, terhadap kelas yang menindas dengan kesimpulannya bahwa: *ternyata bukan kesadaran manusia yang menentukan keadaannya, akan tetapi sebaliknya, keadaan sosialnya yang menentukan kesadarannya.*⁹ Hal inti yang ingin dikatakan oleh Karl Marx, bahwa *bukan pikiran yang melahirkan materi, melainkan materilah yang melahirkan pikiran.* Bertitik tolak dari pemikiran inilah kemudian Karl Marx menjelaskan bagaimana gerakan buruh dan kaum proletar lainnya dengan menyadari kondisi sosialnya (materi) melakukan perlawanan dan revolusi terhadap kondisi yang menindasnya. Bagaimana dengan kondisi-kondisi sosial mahasiswa? Nampaknya menarik untuk mengaktualkan beberapa fenomena. Ketika mereka juga menyuarakan pendidikan murah bagi rakyat, sebagaimana yang disuarakan oleh beberapa elemen gerakan mahasiswa, pada waktu menjelang keruntuhan Soeharto. Refleksi mahasiswa terhadap semakin naik dan mahalnya biaya pendidikan, serta terjadinya apa yang dinamakan kapitalisme dunia pendidikan, dimana tidak semua lapisan sosial ekonomi rakyat dapat mengenyam dunia pendidikan, apalagi sampai perguruan tinggi. Proses radikalasi gerakan mahasiswa '66, dapat dilihat juga sebagai respon mahasiswa terhadap problem yang menimpa sektor mahasiswa dimana biaya kebutuhan perkuliahan melambung tinggi, menjadikan sebagian mahasiswa tidak mampu untuk memenuhinya.

8 Jhonson., Op. cit., hal 129.

9 William and Edwin., Op cit, hal. 3.

Keberadaan pemikiran filsafat Ludwing Feurbach bagaimanapun juga memberikan kerangka berpikir bagi filsafat Dialektika Matrialisme dan Historis Karl Marx, terutama dalam konteks “Materialisme.” Feurbach menyatakan bahwa dunia kesadaran manusia serta ide-ide semata-mata cerminan kekuatan material.¹⁰ Pandangan Feurbach ini berbeda dengan pandangan Hegel, sekalipun kemudian Karl Marx mengkritik pada persoalan aliensi Feurbach, dalam hubungannya dengan keberadaan agama, yang menyimpulkan bahwa agama memperlihatkan keterasingan manusia dari hakekatnya sendiri.

Karl Marx menekankan pentingnya pemahaman terhadap konteks sosial dan sejarah yang khas, dimana bentuk-bentuk khusus kesadaran dan ilusi-ilusi agama atau ideologi muncul. Karl Marx juga menekankan bahwa hubungan dialektik antara seorang sebagai obyek dan seorang sebagai subyek yang aktif, tidak sebagaimana Feurbach melihat bahwa individu itu adalah pasif, ini kemudian oleh Karl Marx dikatakan sebagai sebuah ahistoris, sebab orang melalui “praxis” (dalam bahasa Jerman)¹¹ akan membuat sejarahnya sendiri, dan sekaligus kegiatan kreatif itu ditentukan dan terikat oleh lingkungan material dan lingkungan sosial tertentu yang sudah mereka bentuk.¹²Engels menerangkan lebih dari sekali bahwa sekalipun dasarnya matrialis, Feurbach tetap terikat oleh

10 Johnson., Op Cit., hal. 140-141.

11 Catatan: Bahwa Praxis yang dimaksudkan oleh Karl Marx memiliki arti lebih dalam dari sekedar “practice” (dalam Bahasa Inggris). Dengan Praxis Karl Marx menunjuk pada kegiatan manusia yang dilaksanakan dalam konteks kondisi-kondisi material dan sosial yang ada, meskipun dibimbing oleh suatu kesadaran yang terang mengenai kepentingan-kepentingan materil dan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Praxis bertentangan dengan spekulasi intelektual murni dan mencakupi suatu kesediaan untuk menguji ideologi-ideologi yang dominan serta kondisi-kondisi sosial yang ada secara kritis.

12 Johnson., Op. cit, hal. 141.

belunggu-belunggu idealis yang tradisional dan bahwa idealis yang sesungguhnya dari Feurbach menjadi terang setelah kita sampai kepada filsafatnya tentang agama dan etika.¹³

B. Agama dan Alienasi

Ludwig Feurbach merupakan salah satu murid Hegel, yang pada proses selanjutnya melihat beberapa kelemahan ajaran Hegel, terutama pada persoalan hubungan Allah dengan manusia. Hegel berpendapat bahwa dalam kesadaran manusia, Allah mengungkapkan diri.¹⁴ Kita merasa berpikir dan bertindak menurut kehendak atau selera kita, tetapi di belakangnya “*Roh semesta mencapai tujuan.*” Meskipun di levelnya sendiri manusia bebas dan mandiri, tetapi melalui kemandiriannya itu roh semesta menyatakan diri. Hal yang ingin dikatakan Hegel adalah seakan-akan manusia ini adalah wayang-wayang yang dengan kesadaran, pengertian dan kemauan sendiri, namun sebenarnya tetap berada pada sang Dalang.

Gagasan Hegel tentang hubungan manusia dan Allah ini kemudian menjadi sasaran kritik Feurbach. Menurut Feurbach, Hegel telah memutar balikkan kenyataan, Hegel telah memberi kesan seakan-akan yang nyata adalah Allah (yang tidak kelihatan), sedangkan manusia (yang kelihatan) hanyalah wayang. Padahal yang nyata adalah manusia. Bukan manusia itu pikiran Allah melainkan Allah itu adalah pikiran manusia.¹⁵

Kritik prinsipil terhadap posisi Hegel tersebut berdasarkan pengandaian Feurbach (yang dianggapnya tidak

13 Johnson., Op. cit, hal. 143.

14 Franz Magnis Suseno., “Pemikiran Karl Marx, Dari Sosialisme Utopis Ke Perselisihan Revisionisme,” Edisi I, PT. Gramedia, Jakarta, Cetakan 2, 1991, hal. 66-67.

15 Ibid., hal 67.

perlu dibuktikan lagi) bahwa realitas yang tak terbantahkan adalah pengalaman inderawi dan bukan pikiran spekulatif, seperti pendapat Hegel. Feurbach membangun kritik dan intinya terhadap agama adalah bahwa bukan tuhan yang menciptakan manusia tetapi sebaliknya Tuhan adalah ciptaan angan-angan manusia. Agama hanyalah proyeksi manusia, namun kemudian manusia lupa bahwa angan-angan itu ciptaannya sendiri.¹⁶

Karena itu Feurbach kemudian mengatakan dari penolakannya terhadap pendapat Hegel, bahwa untuk menjadi dirinya sendiri manusia harus menjadi obyek bagi dirinya sendiri, sehingga manusia tidak terasing karena aspek agama, karena sesungguhnya agama mengungkapkan keterasingan manusia dari dirinya.

Pandangan dan kritik Feurbach terhadap pandangan Hegel inilah kemudian menjadi titik tolak pemikiran Karl Marx, ketika melihat keberadaan agama bahwa "*Manusia yang membuat agama, bukan agama yang membuat manusia.*"¹⁷ Akan tetapi Karl Marx melihat bahwa kelemahan Feurbach dalam memformulasikan keberadaan manusia, dimana Feurbach selalu bicara tentang si manusia tetapi manusia itu tidak ada. Yang ada adalah orang-orang konkrit yang hidup pada zaman-zaman tertentu dan sebagai warga masyarakat tertentu. Manusia jangan dilepaskan dan masyarakat dan negara dimana ia hidup. *Manusia itulah dunia manusia, Negara, masyarakat.*"

Berdasarkan pandangan di atas, Karl Marx menemukan sesuatu yang sangat penting: Agama hanyalah tanda keterasingan manusia tetapi bukan dasarnya. Keterasingan manusia dalam agama adalah ungkapan keterasingan yang

16 Ibid., hal. 68

17 Ibid., hal. 72.

lebih mendalam. Agama hanyalah sebuah pelarian karena realitas memaksa manusia untuk melarikan diri, jadi “Agama adalah sekaligus ungkapan penderitaan yang sungguh-sungguh dan protes terhadap penderitaan yang sungguh-sungguh.” Agama adalah keluhan makhluk yang tertekan, perasaan dunia tanpa henti, sebagaimana ia adalah sesuatu roh zaman yang tanpa roh. Ia adalah candu rakyat.¹⁸ Dan Karl Marx menambahkan bahwa faktor agama hanyalah gejala sekunder sebagai penyebab keterasingan manusia, karena itu kritik tidak boleh berhenti pada agama, karena agama hanyalah merupakan mata rantai karena keadaan buruk manusia yang membuatnya melarikan diri ke agama. Maka menurut Karl Marx, kritik agama harus menjadi kritik masyarakat. Kritik agama saja percuma karena tidak mengubah apa yang melahirkan agama. Bukan agama yang harus dikritik, melainkan masyarakat: “Kritik surga berubah menjadi kritik dunia, kritik agama menjadi kritik hukum, kritik teologi menjadi kritik politik.”¹⁹

Sifat anti Tuhan sebenarnya tidak pernah disinggung secara eksplisit oleh Karl Marx, yang disinggung adalah implementasi ajaran agama dalam praktek pemberdayaan masyarakat oleh tokoh-tokoh agama. Karl Marx hanya berpendapat, betapa peran agama (yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama dalam menghadapi kemiskinan akibat penindasan kapitalis terhadap buruh di Inggris) tidak mampu berfungsi sama sekali. Tokoh agama hanya mampu me-ninabobok-kan rakyat yang menderita dengan janji-janji sorga, apabila rajin beribadah pada Tuhan. Masyarakat kemudian lupa akan kemiskinan yang sebenarnya merupakan masalah mendesak yang harus dipecahkan, lupa berjuang melawan penindasan yang membuat mereka miskin, dan

18 Ibid. hal. 73

19 Ibid. hal. 74.

lupa bekerja keras untuk menggapai tujuan di dunia sebenarnya, merupakan kebutuhan yang paling nyata.²⁰

Kritik Karl Marx terhadap agama tersebut dijadikan koreksi oleh tokoh-tokoh agama di Negara-negara Amerika Latin untuk memberdayakan masyarakat, sehingga menimbulkan gerakan Theologi Pembebasan, dalam arti pembebasan dari kemiskinan masyarakat dari akibat penindasan struktural.

Komitmen Karl Marx untuk mengubah dunia melalui kegiatan praxis didasarkan pada kepercayaan idealistisnya bahwa alienasi akhirnya dapat diatasi. Pandangan Feurbach mengenai agama sebagai sumber alienasi hanyalah langkah awal bagi Karl Marx. Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi kondisi materiil dan kondisi sosial yang merupakan sumber alienasi dan ilusi. Sekali kondisi hidup riil menciptakan kebutuhan akan ilusi yang mengalienasikan itu dijelaskan melalui kritik sosial, langkah berikutnya adalah tindakan revolusioner, yang akan menghapuskan kebutuhan akan ilusi dengan membiarkan orang untuk bertindak kreatif untuk dirinya sendiri.²¹

Pengembangan konsep alienasi Feurbach oleh Karl Marx kemudian mendapatkan muaranya pada konteks analisis kondisi alienasi kaum buruh dalam masyarakat kapitalis. Alienasi kaum buruh pada masyarakat kapitalis diartikan oleh Karl Marx sebagai akibat dari industrialisasi kapitalis. Di bawah kapitalisme manusia dialienasikan dari pekerjaan, barang yang dihasilkannya, majikan, rekan sekerja, dan diri mereka sendiri.”²² Pengaruh pasar bebas yang dimunculkan

20 Gunanto Surjono “Marxisme dan Komunisme dalam Peta Politik Pemerintah,” SKH Jawa Pos – Radar Yoga, 6 Mei 2000, hal. 4.

21 Johnson., Op. cit, hal.

22 William and Edwin., Op. cit, hal. 12.

oleh para kapitalis, telah memecahkan ikatan-ikatan sosial, yang dimasa lampau sudah membantu memmanusiakan hubungan-hubungan ekonomi. Karl Marx melihat bahwa pengaruh-pengaruh pasar bebas ini sebagai sesuatu yang membuat manusia sebagai barang komoditi saja dalam pasar, yang tenaganya diperjualbelikan seperti komoditi lainnya tanpa melihat kebutuhan manusiawi mereka yang terlihat dalam proses ini. Hasilnya adalah alienasi manusia dari sesamanya dan dari kodrat sosialnya.²³

Kondisi kerja sosial dalam masyarakat Kapitalis, menurut Karl Marx membuat kaum buruh mengalami alienasi atau keterasingan. Analisis Karl Marx mengenai alienasi ini juga merupakan derivasi dari metode berpikir filsafat Dialektika Materialis-nya. Kritik atas ekonomi-politik yang kemudian dikembangkan oleh Karl Marx itu disusun berdasarkan kesimpulan tentang *“manusia yang membuat sejarahnya tidak menyadari bahwa dirinya adalah subyek sejarah.”* Ketidaksadaran ini, menurut Karl Marx terjadi justru lewat kerja tangan manusia sendiri.

Komoditas atau barang dagangan itu adalah hasil kerja manusia. Maka mencerminkan sifat sosial kerjanya sendiri, sebab hasil kerja dalam bentuk komoditas itu diperuntukkan bagi orang lain dan dihasilkan bersama orang lain di pabrik. Akan tetapi dalam proses produksi dan pertukaran hasil-hasilnya, hubungan sosial para pekerja dengan seluruh kerja mereka sendiri bukanlah hubungan sosial diantara manusia-manusia, melainkan diantara produk-produk mereka. Komoditas-komoditas itu dipertukarkan di pasar dan disini, menurut Karl Marx, terjadinya hubungan-hubungan

23 Johnson., Op cit, hal. 142

materialistis diantara orang-orang dan sebaliknya. Hubungan-hubungan sosial diantara benda-benda.²⁴

Dalam karya "*Manuscripts*," ia menulis bahwa para buruh tidak bekerja untuk mengaktualisasikan dirinya serta potensi kreatifnya, karena "*pekerjaannya tidak atas dasar kesukarelaan tapi atas dasar paksaan.*" Jadi, buruh merupakan tenaga kerja paksaan. Pekerjaannya untuk memuaskan kebutuhan orang lain yaitu para majikan kapitalis yang memperlakukakan kaum buruh untuk memperoleh keuntungan. Jadi, kapitalisme menurunkan derajat kemanusiaan (mendehumanisasi) para buruh yang merosot menjadi setingkat dengan barang komoditi.²⁵

Di dalam masyarakat pada zaman Karl Marx kerja upahan menggejala dimana-mana. Buruh menjual tenaganya sebagai komoditas juga. Oleh sebab itu, Karl Marx kemudian juga berbicara tentang persoalan "*eksploitasi.*" Barang-barang yang dihasilkan oleh kaum buruh dijual sebagai komoditas dengan harga yang ditetapkan oleh pemilik modal, disini nilai guna barang lengkap. Yang berlaku adalah harga komoditas itu. Dan penetapan ini menghasilkan keuntungan di pihak pemilik modal. Oleh sebab itu, Karl Marx menunjukkan kerja upahan sebagai sumber "*nilai lebih*" bagi para pemilik modal. Bagaimana nilai lebih itu dinikmati oleh para pemilik modal? Jawaban Karl Marx sederhana; dengan uang yang sudah diubah menjadi modal, barang-barang yang dipertukarkan bisa dihargai sama, apapun barangnya secara intrinsik, sehingga orang bisa membeli atau menjual komoditas itu berdasarkan harga jualnya, sementara pemilik modal itu dapat mengambil nilai yang lebih banyak dari harga bahan baku. Menurut Karl Marx dan ini merupakan

24 F. Budi Hardiman., Op. Cit., hal. 66-67.

25 William and Edwin., op cit, hal. 12.

kritik yang tajam, nilai yang lebih ini berasal dari tenaga kerja yang mengubah bahan baku menjadi komoditas itu. Nilai tenaga kerja sebetulnya diukur berdasarkan waktu kerja yang layak untuk bertahan hidup, tetapi pemilik modal menuntut buruh bekerja lebih lama, artinya dari kelebihan waktu ini dirampas nilai lebih atau keuntungan itu.

Secara paradox kelihatannya, semakin produktif kaum buruh dalam memproduksi semakin merasa diri menjadi miskin dan semakin mereka tidak mampu mengontrol kegiatan hidup mereka sendiri. Karena itu alienasi merupakan akibat dari hilangnya kontrol individu atas kegiatan kreatifnya sendiri dan produksi yang dihasilkannya. Seperti Karl Marx katakan: “Buruh menempatkan hidupnya dalam obyek, dan kemudian hidupnya tidak lagi menjadi miliknya tetapi menjadi milik obyek itu. Lalu semakin besar kegiatannya, semakin kurang yang dimilikinya. Apa yang terwujud dalam produk kegiatannya tidak lagi menjadi miliknya. Lalu semakin besar produk itu, semakin besar pula dia dimiskinkan. Alienasi buruh dalam produknya tidak hanya berarti bahwa tenaganya menjadi suatu obyek, yang mengandaikan suatu eksistensi eksternal, melainkan bahwa obyek itu berada secara independen, di luar dirinya, dan asing baginya. Dan menentang dia sebagai suatu kekuatan yang otonom. Kehidupan yang sudah dia berikan pada obyek itu berbalik melawan dia sebagai satu kekuatan asing dan bermusuhan.”²⁶

Bertitik tolak dari analisis keterasingannya, bagi Karl Marx bahwa keterasingan dalam pekerjaan terjadi karena orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan jatuh dalam dua kelas sosial yang berlawanan, yaitu kelas buruh dan kelas

26 Johnson., *Op. cit*, hal. 143.

majikan (kapitalis). Kelas kapitalis memiliki alat-alat kerja; pabrik, mesin dan modal. Kelas buruh melakukan pekerjaan, tetapi karena mereka sendiri tidak memiliki tempat dan sarana kerja, mereka terpaksa menjual tenaga kerja mereka kepada kelas kapitalis. Dengan demikian hasil kerja dan kegiatan bekerja bukan lagi milik para pekerja itu sendiri, melainkan milik para majikan, itulah dasar keterasingan dalam pekerjaan.

Disadari atau tidak, dalam perspektif teori alienasi Karl Marx sekalipun mungkin dalam bentuk yang lain bahwa proses-proses alienasi mahasiswa yang dikonstruksikan secara struktural dalam bentuk kurikulum sebagai jawaban atas kebutuhan para pemilik modal terhadap tenaga profesionalitas yang akan memutar roda dari alat-alat produksinya, ternyata telah juga melahirkan gerakan perlawanan mahasiswa, terutama yang muncul di beberapa Negara Eropa (Perancis, Amerika) dan Amerika Latin (Meksiko, Argentina, Bolivia). Mahasiswa menyadari betul bahwa kondisi yang menimpa mereka telah mendudukkan mereka pada kondisi dimana mereka tidak memiliki hak untuk memilih dan menentukan keberadaannya sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat.

C. Kelas, Kesadaran dan Perjuangan Kelas

Seluruh pemikiran Karl Marx berdasarkan anggapan bahwa pelaku utama dalam masyarakat adalah kelas-kelas sosial. Karl Marx tidak pernah membahas secara mendetail apa yang sebenarnya dia maksud dengan suatu kelas. Sekalipun begitu, tidak tertutup kemungkinan untuk merekonstruksi suatu definisi dari tulisan-tulisannya dengan cara mencermati suatu definisi dari tulisan-tulisannya dengan cara mencermati kelompok-kelompok mana yang secara

eksplisit tidak dia golongkan kedalam kelas-kelas. Dalam istilah kelas, Karl Marx sepertinya mengartikan kata kelas sudah jelas dengan sendirinya. Tentu kelas adalah golongan dalam masyarakat. Tetapi golongan menurut kriteria mana? disinilah kita melihat bagaimana kelas yang dimaksudkan Karl Marx biasanya dinegasikan pada kepemilikan alat produksi dalam proses produksi.

Mengikuti definisi yang dilakukan oleh Lenin bahwa '*kelas sosial*' dianggap sebagai "*golongan sosial dalam sebuah tatanan masyarakat yang ditentukan oleh posisi tertentu dalam proses produksi.*" Dari pemahaman Karl Marx atau definisi Lenin tentang kelas sosial yang dihubungkan dengan kepemilikan alat produksi, lalu bagaimana dengan keberadaan kaum cendekiawan, pegawai negeri (baik sipil maupun militer), atau bahkan mahasiswa bukan merupakan kelas tersendiri. Kalau mereka bukan kelas, lalu mereka itu apa?

Pertanyaan-pertanyaan yang ada kemudian memang tidak bisa diputuskan. Sebagaimana jalan pragmatis berikut ini: disatu pihak, istilah kelas digunakan dalam arti pertama, jadi bagi setiap golongan sosial yang memiliki kedudukan spesifik dalam proses produksi, tetapi dengan pengertian bahwa ciri sebagai kelas baru terpenuhi secara sempurna apabila golongan itu juga menyadari dirinya dan memiliki semangat juang sebagai kelas.²⁷

Mencoba membandingkan lebih jauh, bagaimana perspektif analisis kelas menurut Karl Marx, maka kita akan mendapatkan gambaran bagaimana kemunculan istilah kelas itu dari kepemilikan alat-alat produksi yang mendominasi, berhadapan dengan kelas yang tidak memiliki alat-alat produksi yang didominasi. Sedangkan kalau meminjam

27 Magnis Suseno., Op. cit, hal. 111-112

definisi kelas yang dikemukakan oleh Poulantzas yang mengatakan bahwa kelas adalah suatu terminologi dimana yang terpenting bukan pemilikan alat-alat produksi, akan tetapi akses seseorang terhadap sumber-sumber kekuasaan, seperti kekayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan sebagainya. Sementara itu Hans Dieter Evers dan Tillman Schiel juga memberikan tafsiran baru terhadap kelas. Istilah kelas digantikan dengan pengertian kelompok strategis.²⁸

Sebagai catatan awal tentang kelas-kelas dalam masyarakat kapitalis, Karl Marx membaginya menjadi tiga kelompok kelas, yakni:

1. Kaum buruh (mereka hidup dari upah),
2. Kaum pemilik modal (hidup dari laba), dan
3. Para tuan tanah (hidup dari rente tanah). Tetapi, karena dalam analisis keterasingan tuan tanah tidak dibicarakan dan pada akhir kapitalisme para tuan tanah akan menjadi sama dengan para pemilik modal.

Jadi, dalam sistem produksi kapitalis, dua kelas saling berhadapan: kelas buruh dan kelas pemilik modal. Keduanya saling membutuhkan; buruh hanya dapat bekerja apabila pemilik membuka tempat kerja baginya. Dan majikan hanya beruntung dari pabrik dan mesin-mesin yang dimilikinya apabila ada buruh yang mengerjakannya. Tetapi ketergantungan itu tidak seimbang. Buruh tidak dapat upah kalau tidak bekerja. Dan ia tidak dapat bekerja kecuali apabila diberi pekerjaan oleh seorang pemilik. Sebaliknya, meskipun sang pemilik tidak mempunyai pendapatan kalau pabrik tidak berjalan, tetapi ia masih dapat bertahan lama.

28 Happy Bone Zulkarnaen, Faisal Siagian, Loade Ida (editor)., "*Kelas Mengah Digugat*," PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 1993, hal. 10-11.

Ia dapat hidup dari modal yang dikumpulkannya selama pabrik bekerja; ia dapat menjual pabriknya.

Dengan demikian kelas pemilik modal adalah kelas yang kuat dan kelas pekerja adalah kelas yang lemah. Para pemilik dapat menetapkan syarat-syarat bagi mereka yang mau bekerja, dan bukan sebaliknya. Kaum buruh yang matimatian mencari pekerjaan terpaksa menerima upah dan syarat-syarat kerja lainnya yang disodorkan oleh si kapitalis. Jadi, dalam hubungan produksi, yang berkuasa adalah pemilik modal, sedangkan yang dikuasai adalah para pekerja.

Kondisi kelas buruh atau kaum proletar lainnya yang hanya memiliki tenaga inilah yang kemudian membuka peluang bagi kelas kapitalis dan borjuis untuk melakukan upaya eksploitasi terhadap kelas proletar. Hubungan antar kelas atas (kapitalis) dan kelas bawah (kelas proletar) merupakan hubungan kekuasaan; yang satu berkuasa atas yang lain. Kekuasaan itu, yang pada hakekatnya berdasarkan kemampuan majikan untuk meniadakan kesempatan buruh untuk bekerja dan memperoleh nafkah, dipakai untuk menindas keinginan kaum buruh untuk menguasai pekerjaan mereka sendiri, untuk tidak dihisap, agar kaum buruh bekerja seluruhnya demi kelas atas (kapitalis)

Karena itu jelas hubungan antara kelas atas (kapitalis) dan kelas bawah (buruh) pada hakekatnya merupakan hubungan penghisapan atau eksploitasi. Kelas pemilik modal hidup dari penghisapan tenaga kerja kelas buruh. Pemilik modal, si kapitalis, secara hakiki adalah seorang penghisap tenaga orang lain, dan sebaliknya buruh secara hakiki merupakan kelas terhisap.²⁹

29 Magnis Suseno, *Op. cit.*, hal. 115.

Penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme terjadinya persoalan eksploitasi oleh Karl Marx dikatakan sebagai hal yang muncul bukan karena persoalan moral atas tingkah laku para pemilik modal individual, melainkan menunjukkan eksploitasi berlangsung karena kedudukan mereka dalam proses produksi. Karl Marx lalu menunjukkan bahwa krisis-krisis dalam sistem kapitalis juga muncul dalam proses akumulasi modal ini. Jadi dari penghisapan nilai lebih atau keuntungan itu akan menghadapi sistem kapitalis kepada krisis yang akan menghancurkan sistem kapitalis itu sendiri yang kemudian akan melahirkan masyarakat sosialis.³⁰

Posisi diametral antara kelas kapitalis dengan kelas pekerja inilah kemudian Karl Marx menegaskan pada awal buku "*Communist Manifesto*" bahwa "*Sejarah seluruh masyarakat hingga sekarang merupakan sejarah perjuangan kelas,*" karena itu pendapat ortodoks Marxisme-Komunisme tetap bersikeras bahwa perubahan sosial ekonomi yang mendasar tidak mungkin dicapai tanpa perang kelas, kekerasan dan revolusi.³¹

Perlawanan dari kelas buruh terhadap kelas kapitalis, menurut Karl Marx didorong oleh kesadaran akan kondisi sosialnya yang tereksplotasi terus menerus oleh kaum kapitalis. Kenapa perubahan dengan jalan revolusi menjadi penting bagi kelas proletariat? Karl Marx menjelaskan dengan sejarah kemenangan kaum borjuis Perancis di tahun 1789 dan borjuis Prusia berhadapan dengan kekuatan monarkhi dan kaum bangsawan, bahwa borjuis tidak mencapai kemenangan kekuasaan sebagai hasil dari kerja kelas revolusionernya sendiri, melainkan sebagai sebuah

30 F. Budi Hardiman., Op. Cit., Hal. 67-68

31 J. W. Stalin, *Materialisme Dialektika dan Historis*, "Yayasan Pembaharuan, Jakarta, 1955, hal. 4

hasil dari gerakan massa dimana dalam gerakan ini ia tidak memainkan peran apa-apa. Borjuis Prusia terlempar ke ketinggian kekuasaan negara, bagaimanapun juga tidak dengan cara hal itu diinginkannya, yaitu dengan sebuah tawar menawar yang damai dengan kerajaan, melainkan dengan sebuah revolusi.

Kesadaran akan kondisi sosial menjadi kata kunci Karl Marx dalam melihat upaya kaum buruh dan kaum proletar lainnya, berjuang untuk mendapatkan haknya dalam proses produksi, dimana pemilik modal (kapitalis) begitu eksploitatif dalam mengambil keuntungan dari nilai lebih yang dihasilkan kaum buruh (pekerja).

Kesadaran kelas dan kemudian pejuang kelas, ditambahkan oleh Karl Marx muncul sebagai hal yang terjadi karena satu faktor penting yaitu semakin terpusatnya kaum buruh proletar dalam daerah-daerah industri di kota. Karena mereka bekerja bersama-sama dalam kondisi yang kurang manusiawi dalam pabrik itu dan hidup berdampingan satu sama lain sebagai tetangga di kota, kaum proletar menjadi sadar akan penderitaan bersama dan kemelaratan ekonominya. Singkatnya, terpusatnya mereka pada satu tempat memungkinkan terbentuknya jaringan komunikasi dan menghasilkan kesadaran bersama. Sesungguhnya ini merupakan salah satu dari perbedaan pokok antara kelas proletar kota dan kelas petani desa, yang anggota-anggotanya hidup terpencil satu sama lain dan jarang berkomunikasi menurut satu pola yang tetap.³²

Perjuangan kelas adalah satu perkembangan obyektif dari pada sejarah sejak masyarakat terbagi dalam kelas-kelas yang saling bertentangan kepentingannya. Timbulnya

32 Johnson., Op. cit. hal. 151.

kelas-kelas dalam masyarakat adalah akibat yang wajar dari pada kemajuan tenaga produktif masyarakat pada tingkat perkembangan sejarah tertentu ~ peralihan dari masyarakat Ur-Komunis ke masyarakat pemilikan budak, dimana manusia telah dapat menghasilkan hasil lebih dari kerjanya sendiri sehingga dengan demikian terciptalah syarat-syarat bagi segolongan orang untuk merampas dan memiliki hasil lebih kerja orang lain dengan melalui perampasan dan pemilikan atas alat-alat produksi. Oleh karena itu, timbulnya perjuangan kelas dalam sejarah serta perkembangannya tak dapat dipisahkan dari timbul dan berkembangnya sistem hak milik perseorangan atas alat-alat produksi. Dengan perkataan lain, dapat dikatakan juga, bahwa tujuan perjuangan kelas adalah untuk mengubah sistem hak milik atas alat-alat produksi. Dan pada tingkat perkembangan terakhir, dalam zaman kapitalisme, adalah untuk menghapuskan sistem hak milik perseorangan atas alat-alat produksi dan menjadikan alat-alat produksi menjadi milik masyarakat. Dengan demikian mengakhiri riwayat masyarakat berkelas.³³

Determinisme materialis atau ekonomi terhadap kehidupan individu dan masyarakat pada bidang-bidang kehidupan masyarakat, memiliki posisi yang dominan dan menentukan. Karl Marx sangat menekankan bahwa institusi-institusi politik, agama, pendidikan, ilmu pengetahuan, seni, serta keluarga adalah sangat bergantung pada tersedianya sumber-sumber ekonomi untuk kelangsungan hidup. Bahwa keseluruhan dari setiap aktivitas yang dilakukan oleh individu dan masyarakat tidak dapat dilaksanakan tanpa sumber ekonomi dan dasar material yang diperoleh lewat

33 D.N. Aidit, *Kumpulan ceramah tentang Marxisme*, diterbitkan oleh Akademi Ilmu Sosial Aliarcham, Jakarta, cet. III, Agustus 1954, hal. 49-50..

kegiatan ekonomi.³⁴ Dasar inilah oleh Karl Marx kemudian memposisikan persoalan ekonomi menjadi “*Infrastruktur*” di atas mana “*Suprastruktur*” sosial dan kebudayaan yang lainnya dibangun dan harus menyesuaikan diri dengannya.

Pusat perhatian Karl Marx pada tingkat struktur sosial dan bukan pada tingkat kenyataan sosial budaya, telah juga menjadikan analisisnya berbeda dengan apa yang digambarkan oleh Auguste Comte dan Sorokin mengenai kenyataan sosial. Mereka melihat ide-ide yang dominan atau pandangan hidup sebagai kunci untuk memahami kenyataan sosial, Karl Marx memusatkan perhatian pada cara orang menyesuaikan diri dengan lingkungan fisiknya, dimana hubungan-hubungan sosial yang muncul dari penyesuaian ini dan tunduknya aspek-aspek kenyataan sosial dan budaya pada asas ekonomi, bukan pada ide-ide yang dominan yang ada pada masyarakat.

Dalam wacana dimana faktor ekonomi sebagai penentu inilah Karl Marx menegaskan bahwa keberadaan status sosial juga muncul dari adanya perbedaan dalam akses dan kepemilikan alat-alat produksi. Dan kemudian memunculkan kelas pemilik alat produksi (modal), atau kelas borjuis kapitalis, melakukan eksploitasi terhadap kelas proletar (buruh), yang disebabkan tidak terjadinya peluang dan kesempatan yang sama dalam proses produksi, ditambah dengan sifat dan watak kelas borjuis kapitalis yang serakah dan tamak, memunculkan kondisi-kondisi eksploitasi dan penindasan terhadap kelas proletar yang ada. Hal inilah kemudian memunculkan dua kelas yang berdiri vis a vis secara diametral (munculnya kelas).

34 Johnson., Op. cit, hal. 120.

Max Weber juga mengakui pentingnya stratifikasi ekonomi sebagai dasar yang fundamental untuk kelas. Bagi Weber, kelas sosial terdiri dari mereka semua yang memiliki kesempatan hidup yang sama dalam bidang ekonomi. Weber melengkapi pembahasan tentang 'kelas' baru bisa dibicarakan apabila (1) sejumlah orang sama-sama memiliki suatu komponen tertentu yang merupakan sumber dalam kesempatan-kesempatan hidup mereka, sejauh (2) komponen itu secara eksklusif tercermin dalam kepentingan ekonomi berupa pemilikan benda-benda dan kesempatan-kesempatan untuk memperoleh pendapatan, dan (3) hal itu terlihat dalam kondisi-kondisi komoditi atau pasar tenaga kerja.

Butir terakhir ini menjelaskan bahwa kelas-kelas sosial berlandaskan pada dasar stratifikasi yang bersifat impersonal dan obyektif. Para anggota dari kelas yang sama mungkin menjadi sadar akan kepentingan mereka bersama dalam bidang ekonomi dan terlibat dalam tindakan ekonomi atau politik yang terorganisir untuk kesadaran kelas, seperti dikemukakan Karl Marx dalam pandangannya mengenai kelas atau kesadaran kelas. Apakah kesadaran subyektif mengenai kepentingan kelas atau kesadaran kelas ada atau tidak ada, posisi kelas ditentukan (menurut Karl Marx dan Max Weber) oleh kriteria obyektif yang berhubungan dengan kesempatan-kesempatan hidup dalam dunia ekonomi.

Relatif berbeda dengan argumentasi Karl Marx dan Max Weber bagaimana melihat kesadaran kelas dalam hubungannya dengan ekonomi. Auguste Comte dengan teori positifismenya justru melihat perkembangan pemikiran atau pemahaman manusia itu merupakan perkembangan yang berjalan pada fase-fase alamiah, bahwa ia berkembang dengan melalui tiga fase perkembangan, yakni; 1) Fase teologis purba, 2) Fase metafisik, 3) Fase positif.

Akan tetapi sekalipun Weber mengakui faktor ekonomi menjadi faktor penting dalam melihat dasar munculnya kelas, bukan berarti faktor ekonomi menjadi faktor deterministik (sebagaimana pendapat Karl Marx), dalam kaitannya dengan hubungan sosial kemasyarakatan, interrelasi sosial itu bisa juga terbangun dari faktor budaya, agama, politik, atau bahkan faktor yang didasarkan pada ikatan primordialisme.

Orang juga digolongkan pada lapisan-lapisan berdasarkan kehormatan atau prestise, seperti yang dinyatakan dalam gaya hidup bersama. Hasilnya adalah pengaturan orang dalam kelompok-kelompok status. Karl Marx tidak mengupas dimensi stratifikasi ini secara khusus, tetapi perspektif Marxis akan melihat status ini sebagai cerminan belaka dari kepentingan ekonomi dan kesadaran kelas. Weber tidak sependapat dengan mengemukakan bahwa stratifikasi menurut status secara analitis berbeda dari stratifikasi menurut ekonomi. Meskipun posisi kelas ekonomi dan kedudukan status memiliki dinamikanya sendiri, dan orang yang secara ekonomis dominan, mungkin dengan sengaja berusaha dengan berbagai cara yang berbeda untuk meningkatkan prestisenya.

Lebih lanjut mengenai kesadaran kelas oleh Karl Marx dikatakan bahwa sesungguhnya kesadaran itu berakar pada *praxis* manusia, yang pada gilirannya bersifat sosial. Inilah pengertian dari yang dikatakan, bahwa *bukan kesadaran yang menentukan eksistensi orang, tetapi sebaliknya, kehidupan sosial merekalah yang menentukan kesadaran mereka*. Sangat banyak yang memburuk-burukkan Karl Marx untuk pengamatan ini. Akan tetapi istilah operasinya disini adalah insan sosial, dan sedikit saja ada keberatan terhadap penyamarataan, bahwa kesadaran itu dikuasai, dikendalikan oleh kegiatan manusia di dalam masyarakat.

Karl Marx mengemukakan, kasus bahasa memberikan suatu contoh kongkrit dari hal ini. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa bahasa itu "sama umumnya dengan kesadaran, bahasa itu adalah kesadaran praktis, yang juga ada bagi orang-orang lain, dan karena alasan itu saja kesadaran itu juga ada bagi saya...." Pengungkapan gagasan, dan adanya sesuatu yang di luar perasaan semata-mata, merupakan syarat untuk adanya bahasa. Akan tetapi bahasa itu adalah suatu produk sosial. Dan hanyalah berdasarkan keanggotaannya dari komunitas maka seseorang mendapatkan kategori-kategori linguistik, yang menjadikan parameter dari kesadarannya.³⁵

Lebih lanjut mengenai proses kesadaran itu muncul dan kenapa kesadaran itu penting bagi kaum proletar? Karl Marx secara jelas membedahnya melalui filsafat berpikirnya yakni, filsafat materialis dialektika dan historis, bahwa kesadaran kaum proletar itu terbangun disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi, dimana kaum proletar itu termiskinkan dalam proses produksi sistem borjuis dan kapitalis. Kesadaran akan ketertindasan itu muncul bersamaan dengan ketika kaum buruh dan kaum proletar lainnya berada pada kondisi tereksplorasi dengan nilai lebih yang dihasilkannya, dan seharusnya menjadi hak mereka. Disinilah Karl Marx merumuskan konsepsi kesadaran kelas kaum proletar, dengan mengatakan bahwa ternyata bukan kesadaran manusia yang menentukan keadaannya, akan tetapi sebaliknya, keadaan sosialnya yang menentukan kesadarannya. Keadaan material ekonomi menjadi penentu munculnya kesadaran kelas.

Karl Marx dan Engels, dan kemudian Lenin adalah para pemikir yang paling jelas mengakui bahwa adanya sesuatu

35 Anthony Giddens., *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern, Suatu Analisis Karya Tulis Karl Marx, Durkheim dan Max Weber,* Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1985, hal. 50-51.

gerakan, dan khususnya hakekat dari sasaran gerakan, adalah berhubungan erat dengan kesadaran anggota-anggotanya. Lebih lanjut, bahwa kesadaran itu problematik sifatnya. Kesamaan obyektif dari keadaan obyektif dan khususnya kehidupan pabrik yang secara fisik berdekatan itu, dan 'pemiskinan' yang bisa diharapkan dari kompetisi kapitalis dan krisis yang makin dalam; semuanya ini akan membuat kaum buruh sadar akan persamaan nasib dan musuh bersama mereka. Tetapi menurut jalan pikiran Marxis, organisasi yang agaknya akan mereka ciptakan adalah serikat buruh, dan dengan begitu pemikiran dari anggota-anggotanya mungkin sekali akan mengambil pandangan luas yang tidak cukup mengenai sebab-sebab perjuangan mereka dan perlunya revolusi yang mendasar untuk mengobatinya.³⁶

Karl Marx sangat menekankan akan arti penting kesadaran kelas bagi kaum proletar, dalam kaitannya dengan kondisi-kondisi kemiskinan material yang dihadapinya. Bagi Karl Marx kesadaran akan realitas sosial ekonomi kaum proletar menjadi titik sentrum munculnya revolusi oleh kaum proletar, karena sebuah perlawanan tidak akan pernah dilakukan oleh kaum proletar ketika mereka tidak menyadari terhadap kondisi eksploitasi dan penindasan yang dilakukan oleh kaum borjuis kapitalis. Kabutuhan dalam melihat kesadaran akan kondisi material kaum proletar inilah yang menghantarkan Karl Marx pada kritiknya terhadap peran agama dan institusi keagamaan, karena peran agama dan institusi agama justru telah menjadikan kaum buruh dan proletar lainnya terlena dan terninabobokkan oleh janji-janji surga dan persoalan roh,³⁷ sebagaimana juga oleh

36 Henry A. Landsberger dan Yu. G. Alexandrov., *"Pergolakan Petani dan Perubahan Sosial,"* CV. Rajawali, Jakarta, 1984, hal. 25

37 *Catatan Penulis:* bahwa memahami kritik Karl Marx dalam hubungannya

Tan Malaka katakan, “Tuan mesti kupas masyarakat sekarang dengan cara berpikir yang beralaskan materi, bukan roh. Yang penuh pertentangan, bukan perdamaian. Memakai hukum berpikir yang bukan fantastis, bertahyul, sembarangan. Jelaskan pentingnya materi buat kesehatan, kecerdasan, kebudayaan, kemerdekaan dan kesenangan. Kupaslah pertentangan upah dan laba, pertentangan proletar dan kapitalis. Pertentangan politik buruh dengan politik majikan dan akhirnya pertentangan kebudayaan kaum hartawan yang menganggur itu.”³⁸

Karl Marx menjelaskan lebih jauh lagi dalam “*Communist Manifesto*” mengapa revolusi dengan kekerasan merupakan satu-satunya jalan keluar atau cara menuju transformasi sosial yang mendasar. Ketika teknologi *know how* (kekuatan produksi) mulai melampaui lembaga sosial, ekonomi dan politik (hubungan produksi), maka pemilik alat-alat produksi tidak dengan rela membiarkan sejarah berjalan menuju ke arah yang tidak dapat dielakkan. Karena ideologi dari kelas yang berkuasa mencerminkan sistem ekonomi yang berlaku, maka para pemilik alat-alat produksi sangat percaya bahwa sistem yang berlaku itu secara ekonomi merupakan yang paling efisien, secara sosial paling adil dan secara filosofis paling sesuai dengan hukum-hukum alam dan rencana ilahi, penentangan kelas yang berkuasa terhadap perubahan begitu tegar, yang membuat revolusi akhirnya tidak dapat dielakkan.³⁹

dengan posisi agama dan keberadaan institusi keagamaan ini harus dilihat dalam setting sejarah dimana Karl Marx membangun analisis tentang keberadaan agama dan institusi keagamaan yang memang secara riil melakukan proses pembodohan dan pelenaan dengan janji surgawi yang dilakukan pihak agamawan dengan institusi gereja terhadap kesadaran kaum buruh (kaum proletar) di Inggris pada abad awal pertengahan XVII.

38 Tan Malaka., “*MADIALOG, Materialisme Dialektika Logika,*” Penerbit Pusat Data Indikator, Jakarta, cet I, 1999, hal. 26.

39 William and Edwin., *Op. cit*, hal. 7-8.

Dalam buku *Das Kapital* jilid ketiga, Karl Marx mulai dengan suatu penjelasan yang sistematis mengenai konsep kelas, dimana dia mengidentifikasi tiga kelas utama dalam masyarakat kapitalis; buruh upahan, kapitalis, dan pemilik tanah. Kelas-kelas ini dibedakan terutama dalam perbedaan-perbedaan dalam sumber-sumber pendapatan pokok, yakni upah, keuntungan dan sewa tanah untuk masing-masing. Karena sistem kapitalis itu berkembang, Karl Marx mengharapkan bahwa ketiga sistem kelas itu secara bertahap akan diganti oleh suatu sistem dua kelas, begitu lapisan menengah hilang, dan tentu saja karena cara kerja kapitalis itu diperluas dari perusahaan industri ke perusahaan pertanian. Hal ini dikatakan Karl Marx bahwa, “Masyarakat sebagai satu keseluruhan menjadi semakin terbagi dalam dua kelompok besar yang saling bermusuhan, ke dalam dua kelas yang saling berhadapan secara langsung; borjuis dan proletariat.”⁴⁰

Di antara kapitalis-kapitalis yang dominan, juga dapat dibedakan antara kapitalis uang dan kapitalis industri. Karl Marx meramalkan bahwa perkembangan masyarakat kapitalis ke sistem dua kelas akhirnya akan mengakibatkan hilangnya kelas borjuis kecil dan mengakibatkan anggota-anggotanya menjadi proletariat (*proletarianization*).⁴¹

Karl Marx mengidentifikasi “*Kelas menengah bawah, pengrajan kecil, pengusaha toko, seniman, petani*” yang terlibat dalam pertarungan melawan kaum borjuis. Namun dari titik pandang yang lain, petani harus dilihat sebagai satu kategori yang berbeda dari yang lainnya. Mereka tidak jelas masuk dalam sistem tiga kelas itu, meskipun mereka sangat dekat persamaannya dengan kaum proletar dalam jajaran

40 Johnson., Op. cit, hal. 148.

41 Johnson., Op. cit, hal. 148.

tiga kelas itu. Namun ideologinya bersifat reaksioner, dan tingkat organisasinya sebagai satu kelas tidak ada. Hal inipun juga terjadi pada apa-apa yang dinamakan oleh Karl Marx sebagai “*Lumpenproletariat*” ini mencakup pencuri, penjahat dari segala jenis, yang hidup dari remah-remah masyarakat, pedagang tak menentu, gelandangan, tunawisma.⁴²

Kaum cendekiawan juga membentuk satu kelas menengah yang tidak persis masuk dalam salah satu model dua kelas atau model tiga kelas. Namun pada umumnya mereka mendukung kelas borjuis dengan mengembangkan ideologi-ideologi yang memperkuat struktur sosial dan ekonomi itu. Karl Marx menekankan bahwa ahli fisika, pengacara, imam, pujangga, ilmuwan, sudah berbalik menjadi “*buruh upahan yang dibayar*” dari kelompok borjuis.⁴³ Dan bagaimana dengan mahasiswa? mahasiswa nampaknya dimasukkan Karl Marx kedalam rumpun kelas menengah ini.

Karl Marx, Engels dan Lenin senantiasa memberi penekanan pada peran terdepan dari kaum proletariat di dalam revolusi. Mereka menjelaskan bahwa hanya kelas pekerja yang bisa mengusung revolusi kaum sosialis. Tak ada kelas lain yang dapat memenuhi peran ini. Mengapa? ini bukanlah sebuah cetusan pemikiran yang tiba-tiba atau sebuah asumsi arbiter. Ia berbasis pada peran para pekerja dalam produksi, dan kenyataan bahwa partisipasi dalam produksi kolektif (sosial) berarti bahwa kelas pekerja sendirian membangun sebuah kesadaran sosialis (kolektifis). Ini bukan kasus pada kelas lain. Kaum tani adalah sebuah kelas para pemilik kecil. Bahkan para petani yang tak bertanah; jadilah slogan “*tanah untuk penggarapnya*” yang

42 Johnson., Op. cit, hal. 149.

43 Johnson., Op. cit, hal. 179.

meski semboyan ini merupakan signifikansi revolusioner yang luar biasa, akan tetapi memiliki kandungan borjuis, bukan sosialis. Para mahasiswa dan kaum cendikiawan mempunyai sebuah tendensi kuat terhadap individualisme borjuis kecil, yang seringkali memunculkan dirinya, bahkan ketika mereka mencoba mengadopsi posisi revolusioner.⁴⁴

D. Konsepsi Penindasan dan Keberadaan Negara

Perbedaan dan konflik antara orang pemilik modal dan pekerja (buruh), orang kaya yang santai dan orang miskin yang bekerja adalah tema-tema yang selalu muncul dalam perjalanan sejarah manusia. Teori Karl Marx tentang penindasan (eksploitasi) merupakan sebuah ikhtiar untuk memberikan suatu pernyataan yang teliti dan ilmiah tentang gagasan-gagasan intuitif ini. Dalam karyanya secara keseluruhan, teorinya memiliki dua tujuan yang berbeda. Pada satu sisi, ia mengandung fungsi eksplanatif. Penindasan dalam kaca mata mereka yang tertindas memberikan suatu motivasi untuk mengadakan perlawanan, protes, pemberontakan atau bahkan revolusi. Dalam konteks ini ia bisa masuk dalam penjelasan perjuangan kelas dan perubahan sosial. Pada sisi yang lain, penindasan merupakan suatu konsep normatif yang menjadi bagian dari teori keadilan distributif secara lebih luas. Penindasan itu, apakah itu dalam pandangan mereka yang tertindas atau bukan, salah secara moral. Tidak adil bahwa sebagian orang mendapatkan penghasilan tanpa bekerja atau diluar proposisi kontribusi kerjanya.

Gagasan Karl Marx tentang penindasan memiliki kandungan yang sangat spesifik. Seorang ditindas, dalam pengertian Karl Marx, jika dia harus melakukan pekerjaan lebih dari seharusnya yang diperlukan untuk memproduksi

44 Ted Grant dan Alan Woods., *Op. cit.*, hal. 4-5.

barang-barang yang dia harus konsumsi. Jika dia sungguh-sungguh memproduksi barang-barang yang dikonsumsi orang lain. Inilah yang terjadi dalam feodalisme ketika buruh tani bekerja beberapa hari di ladangnya sendiri dan beberapa hari lainnya dalam minggu itu di tanah milik tuan tanahnya. Dalam cara-cara produksi lainnya, mereka yang ditindas melihat situasi yang mereka hadapi dari satu sudut yang berbeda.⁴⁵

Para buruh tani, menurut Karl Marx, cenderung untuk berpikir bahwa semua tenaga yang mereka keluarkan merupakan tenaga kerja gratis seraya melupakan bahwa sebagian tenaga itu mencakup biaya reproduksi kemampuan kerja mereka. Sebaliknya para buruh yang dibayar mudah sekali tergelincir pada pemikiran bahwa semua tenaga yang mereka keluarkan merupakan tenaga kerja yang mendapatkan penghargaan finansial karena mereka benar-benar mendapatkan pembayaran yang ditentukan dari jumlah jam kerja mereka. Hanya dalam feodalisme, bahwa munculnya penindasan bersamaan dengan esensinya kinerja terhadap apa yang dibutuhkan untuk memproduksi barang-barang yang dikonsumsi oleh buruh.⁴⁶ Sebaliknya, seorang disebut penindas jika ia bekerja dengan jumlah jam yang lebih sedikit dari pada yang dibutuhkan untuk mempertahankan konsumsinya.

Adanya nilai lebih dalam setiap proses produksi yang tidak disadari oleh kaum buruh atau pekerja ini mendorong Karl Marx untuk membangun formulasi pentingnya kesadaran bagi kaum buruh atau pekerja, dalam mengidentifikasi

45 Jon Elster., "KARL MARX, *Marxisme: Analisis Kritis, Sebuah Analisis Kritis Tokoh Historis Pengguncang Dunia, Perlukah Kita Menolak Komunisme,*" Penerbit Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2000, hal. 108

46 Ibid., hal. 108

kondisi-kondisi penindasan atau eksploitasi yang sedang menimpa serta melingkarinya, guna keluar dari kondisi-kondisi yang tidak menguntungkannya.

Menurut Karl Marx semua sistem ekonomi dari dulu sampai sekarang ditandai oleh adanya kelas bawah dan kelas atas. Struktur kekuasaan dalam bidang ekonomi itu tercermin juga dalam bidang politik. Salah satu pokok teori Karl Marx adalah bahwa Negara secara hakiki merupakan Negara kelas, artinya Negara dikuasai secara langsung atau tidak langsung oleh kelas yang menguasai bidang ekonomi. Karena itu, menurut Karl Marx, Negara bukanlah lembaga di atas masyarakat yang mengatur masyarakat tanpa pamrih, melainkan merupakan alat dalam tangan kelas atas untuk mengamankan kekuasaan mereka.⁴⁷

Friederich Engels memberikan legitimasi lebih lanjut pendapat Karl Marx dalam tulisannya yang mengatakan bahwa: “Negara bertujuan untuk mempertahankan syarat-syarat kehidupan dan kekuasaan kelas berkuasa terhadap kelas yang dikuasai secara paksa.”⁴⁸ Negara dapat saja bertindak demi kepentingan seluruh rakyat, misalnya dengan membangun sarana transportasi, menyelenggarakan persekolahan umum, dan melindungi masyarakat terhadap tindak kriminal. Tetapi tindakan ini pun demi kepentingan kelas atas, karena kelas atas pun tidak dapat mempertahankan diri apabila kehidupan masyarakat pada umumnya tidak berjalan.⁴⁹

Dalam “*The German Ideologi*” Karl Marx melihat Negara sebagai suatu kompensasi dari ketegangan dalam masyarakat yang muncul karena pembagian kerja. Konflik

47 Magnis Suseno., Op. cit, hal. 120

48 Magnis Suseno., Op. cit, hal.

49 Magnis Suseno., Op. cit, hal, 120-121

dialektika antar kehidupan pribadi individu dan kehidupan umum diselubungi oleh ilusi bahwa Negara merupakan suatu komunitas manusia yang sesungguhnya mengatasi konflik yang riil antara kelas-kelas masyarakat yang saling bertentangan...dan jelas peran Negara adalah melindungi kelas yang dominan dalam masyarakat.⁵⁰ Pemerintahan Negara modern benar-benar merupakan suatu komite yang mengurus kepentingan bersama kaum borjuis seluruhnya.

Bagaimana seharusnya negara itu muncul? Karl Marx dan Engels memberikan landasan obyektif dari arti kebutuhan akan sebuah Negara. Negara “bukanlah suatu kekuasaan yang dipaksakan kepada masyarakat dari luar: Ia adalah hasil dari masyarakat pada suatu tingkat perkembangan yang tertentu, ia adalah pengakuan bahwa masyarakat ini telah terlibat dalam suatu kontradiksi yang tak terpecahkan dengan dirinya sendiri, bahwa ia terbelah menjadi antagonisme-antagonisme tak terdamaikan yang tak mampu dienyahkan olehnya.⁵¹

Marxisme-Leninisme kemudian mendeskripsikan teori Negara sebagai diktator proletariat. Di sini, Negara juga memiliki kekuasaan mutlak untuk memaksakan kehendaknya terhadap warganya. Misi Negara dalam konsep diktator proletariat yakni merealisasikan sebuah masyarakat yang dianggap sebagai ujung akhir dari proses sejarah, yakni masyarakat egalitarian, yang juga dikenal sebagai masyarakat komunis.⁵² Dan kesimpulan pemikiran Marxisme dalam melihat Negara dengan kekuasaan mutlak hanya diperlukan pada waktu menjadi transisi dari sosialisme (ketika kelas

50 Johnson., Op. cit, hal. 145.

51 D.N. Aidit., Op cit., hal. 68.

52 Arif Budiman., *Teori Negara, Negara, Kekuasaan dan ideologi*,” PT. Gramedia, Jakarta, Cet. II, 1997, hal. 21.

buruh sudah memenangkan revolusi sosialis, tetapi kelas borjuis belum ditumpas seluruhnya) ke komunisme (ketika sudah tidak ada lagi perbedaan antara buruh dan majikan, karena sudah terciptanya demokrasi politik dan demokrasi ekonomi).⁵³

Satu-satunya kesempatan bagi anggota masyarakat ekonomi lemah untuk mencapai kebebasan yang sama adalah mengembangkan solidaritas dan menghimpun diri kedalam perserikatan. Dengan kekuatan jumlah mereka dan persatuan mereka, mereka harus menentang hak-hak istimewa kelas borjuis. Sebagai kekuatan yang terorganisasi mereka dapat mempergunakan pengaruhnya terhadap Negara. Dengan demikian mereka dapatkan sebuah alat yang mengabdikan kepada masyarakat sebagai keseluruhan. Sebuah Negara demokratis dapat mengubah kondisi kehidupan di dalam industri dan masyarakat. Dengan menjadi terorganisasi, para anggota masyarakat yang lemah dapat menjamin terselenggaranya kekuasaan Negara yang mereka perlukan untuk mempertahankan hak-hak mereka.

Karl Marx dan Engels menyetujui konsep Negara di atas untuk periode sementara sampai dengan terbentuknya suatu masyarakat tanpa kelas (komunisme). Tetapi mereka berpendapat bahwa Negara harus menjalani reorganisasi secara mendasar sebelum dapat menjadi alat yang efektif demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan,⁵⁴ karena bagaimanapun kalau tidak dilakukan reorganisasi total, maka keberadaan Negara selalu saja akan menjadi alat kelas ekonomi dominan.

53 Ibid., hal. 23.

54 Thomas Meyer., "Sosialisme Demokratis Dalam 36 Tesis," Friedrich Eberto Stiftung Jakarta, 1988, hal. 14.

Karl Marx dan Engels menyadari betul bagaimana ekspansionisme kaum kapitalis tidak lagi dibatasi oleh batas-batas Negara dan kebangsaan,⁵⁵ melainkan ia lebih luas meliputi kehidupan kemanusiaan umumnya yang hidup dengan cara-cara menghasilkan keperluannya yang disebut kapitalis itu. Karl Marx dengan kesadaran terhadap keberadaan kaum kapitalis di atas mencoba mempersatukan kaum buruh dan kaum proletar lainnya di dunia, sebagai tenaga perlawanan dan penentangan kaum borjuis dan kapitalis.

Karl Marx berhasil pada tahun 1847 mendirikan suatu liga komunis di Brussel. Pada tahun 1848 Karl Marx bersama Engels mengarang manifest komunis untuk "*Liga Komunis*" dan melahirkan semboyan bagi kaum Marxis yaitu "*kaum proletar dari segala bangsa bersatulah kamu.*"⁵⁶ Karl Marx dan Engels dalam manifesto Partai Komunis (1848) menegaskan lebih lanjut kenapa solidaritas dan persatuan menjadi penting, karena "*kami menyadari... bahwa langkah pertama dalam revolusi kelas pekerja adalah mengangkat kelas proletariat menjadi kelas yang mendominasi, merupakan perjuangan mencapai demokrasi*"⁵⁷

Tradisi dari para pemikir dan teoritis Marxis dalam melihat lebih lanjut tentang persoalan kapitalis internasional dalam hubungan negara-negara kapitalis, dengan Negara dunia ketiga telah melahirkan teori "dependensi." Secara singkat teori "dependensi" memandang perekonomian internasional ditandai oleh hubungan yang tak seimbang

55 R.Z. Leirissa, "*Terwujudnya Suatu Gagasan Sejarah Masyarakat Indonesia 1900-1950*," CV. Akadematika Presindo, Jakarta, cet. I, 1985, hal. 12.

56 Sjahrir, "*Internasionalisme Dalam Ajaran dan Gerakan Sosialis*," Tulisan dalam Pedoman Sosialis, dikeluarkan oleh Sekretariat Dewan Partai, Partai Sosialis Indonesia, Tahun I, No. 1, Juni 1955, hal. 6.

57 Thomas Meyer., Op. cit, hal. 31.

antara Negara-negara kapitalis industri maju di satu pihak dan terbelakang di pihak lain. Dapat dikatakan bahwa suatu premis umum yang dipegang oleh semua teoritis “menetapkan bahwa hubungan “*pusat-periphery*” tersebut sejak periode ekspansi kapitalisme melalui kolonialisme hingga kini, ditandai oleh persistensi mekanisme-mekanisme “*pertukaran yang tak seimbang*” yang melestarikan penyerapan surplus ekonomi dari *periphery* ke *pusat*. Implikasinya, masyarakat dunia ketiga berada pada kondisi “*perkembangan yang terhambat*” (*blocced development*).⁵⁸

Bagi para teoritis dependensi, Negara fase kolonial tidak bisa tidak hanya berperan sebagai penjamin keberlangsungan proses penyerapan surplus ekonomi itu, dan secara fungsional, hanya merupakan perpanjangan tangan dari kepentingan-kepentingan kelas borjuasi internasional dan metropolitan.⁵⁹ Negara-negara kolonial (baca: dunia ketiga) telah menjadi wujud kongkret bagaimana ekspansionisme dan eksploitasi oleh kaum kapitalis global terhadap Negara-negara di dunia ketiga melalui beberapa institusi pemilik modal seperti IMF, Bank Dunia, ADB dan beberapa pihak dalam meraup keuntungan, kemudian hampir-hampir tidak dapat ditolak oleh Negara pasca kolonial karena telah terciptanya tingkat ketergantungan yang begitu tergantung dan hegemonik dan rekayasa Negara-negara maju (kapitalis). Rekayasa Negara-negara maju inilah yang menjadi bentuk nyata dari Neo-Kolonialisme, kaum kapitalis global. Negara-negara pasca kolonial secara luas telah dipaksa, melalui diktean dari IMF dan Bank Dunia untuk “*membuka*” pasar mereka dan melakukan swastanisasi terhadap industri-industri nasional.

58 Vedi R. Hadiz, “*Politik Pembebasan, Teori-Teori Negara Pasca Kolonial*,” Penerbit INSIST dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cet I, 1999, hal. 35.

59 Hadiz., Op. cit, hal.

Proses pemiskinan rakyat di Negara pasca kolonial oleh Negara-negara kapitalis ini, telah juga berimplikasi pada pemunculan bentuk-bentuk perlawanan dan pemberontakan rakyat terhadap penguasa di Negara-negara pasca kolonial, seperti di Amerika Latin (Nikaragua, Brazil, San Salvador, Kuba). Sekalipun bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dari masing-masing Negara yang ada. Kekuatan komunisme biasanya muncul pada Negara-negara dimana proses penindasan dan pemiskinan masyarakat itu terjadi, hal ini bisa dilihat dari kasus perlawanan rakyat di Amerika Latin, dimana komunisme muncul karena respon adanya penindasan masyarakat miskin oleh penguasa boneka (Hasienda-Latifundia) Negara kapitalis maju, sementara di Afrika (Mozambik, Angola) Komunisme muncul sebagai respon terhadap penguasa penjajah dari Negara kapitalis maju yang juga amat menindas rakyat setempat.

Bagaimana dengan di Indonesia? Sejarah komunisme di Indonesia sepertinya mengikuti pola perkembangan komunisme dunia. Gerakan komunisme juga tumbuh subur di daerah-daerah yang memiliki kantong kemiskinan seperti Blitar, Blora, Cepu, Grobogan, dan Madiun.⁶⁰

60 Surjono., Op. cit. hal. 4.

BAB 3

GERAKAN MAHASISWA 1908 – 1928

Munculnya Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia, sudah tentu bukanlah muncul secara mendadak. Namun melalui proses yang cukup lama dan dipengaruhi oleh berbagai peristiwa yang mendahuluinya. Baik peristiwa yang ada di dalam negeri maupun yang terjadi di luar negeri. Akan tetapi titik berat yang sangat menentukan adalah kejadian-kejadian yang terjadi dalam negeri. Sedangkan peristiwa yang terjadi di luar negeri hanyalah merupakan faktor yang mempercepat proses timbulnya pergerakan nasional.

Hal yang menjadi aksioma gerakan perlawanan terhadap problem-problem penindasan adalah ketika orang atau kelompok yang ditindas itu merasakan dan sadar terhadap problem penindasan yang dialaminya. Sudah tentu munculnya pergerakan nasional Indonesia telah juga melalui proses kesadaran terhadap pentingnya keluar dari kondisi

penjajahan dan menjadi keharusan untuk memiliki sebuah arti kemerdekaan dan kedaulatan. Sebuah hal yang mustahil terjadi sebuah perlawanan terhadap kondisi penindasan ketika orang, kelompok atau bahkan sebuah negara itu bila tidak menyadari bahwa ia ditindas dan tereksploitasi.

Peran-peran penyadaran inilah yang banyak dilakukan oleh kekuatan-kekuatan organisasi pergerakan nasional di masa-masa awal kemunculannya, khususnya yang diperlihatkan oleh kelompok atau organisasi-organisasi kepemudaan dan pelajar (mahasiswa), sebagaimana yang ditunjukkan oleh organisasi pelajar Budi Utomo (BO) dan beberapa organisasi diawal-awal terbangunnya kesadaran nasional.

Beberapa kejadian-kejadian yang menjadi latar belakang munculnya pergerakan nasional di Indonesia, khususnya faktor dari dalam negeri yakni:

1. Tekanan penindasan dari penjajah yang telah terjadi berpuluh-puluh tahun lamanya, merupakan faktor utama timbulnya rasa harga diri dan rasa kesadaran nasional, yang kemudian melahirkan nafsu untuk melawan penjajah dengan cara Pergerakan Kedaerahan, yang kemudian meningkat menjadi Pergerakan Nasional.
2. Rasa senasib dan sepenanggungan, merupakan bukti bahwa orang-orang Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, ingin bersatu melawan penjajah dalam rangka mendirikan negara yang merdeka bebas dari ancaman penjajah atau bangsa manapun juga di dunia ini.
3. Masuknya pendidikan nasional dengan sistem barat, merupakan angin segar untuk menentang keterbelakangan dan kebodohan. Karena dengan masuknya pendidikan sistem barat tersebut, mempercepat proses untuk

mencerdaskan bangsa. Hal tersebut memang tidak dapat dielakkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Keterbelakangan dan kebodohan memang disebabkan oleh penjajah, yang memang sukar diberantas. Namun mengingat kebutuhan yang mendesak, maka pemerintah kolonial Belanda terpaksa mendirikan sekolah-sekolah dalam rangka ingin memperoleh tenaga administrasi atau pegawai rendahan yang akan dibayar dengan upah rendah. Sehingga jalannya pemerintahan kolonial Belanda dapat lancar, tanpa banyak mengeluarkan biaya besar. Dengan demikian dapat diketahui, bahwa Belanda tidak ada niat untuk mencerdaskan orang Indonesia.⁶¹

Dalam periode 1870 sampai dengan 1900 wilayah kekuasaan Hindia Belanda telah meluas meliputi wilayah yang kita kenal sekarang (Sabang - Merauke), perluasan wilayah ini ada hubungannya dengan tuntutan-tuntutan pihak swasta (kapitalis) untuk meluaskan jaringan wilayah eksploitasinya. Maupun tuntutan-tuntutan keamanan, serta saingan-saingan negara Barat lainnya. Semakin luasnya daerah jajahan ini bagaimanapun kemudian menuntut pihak kolonial Belanda untuk menyiapkan tenaga-tenaga administrasi untuk menangani daerah-daerah jajahan. Untuk mendapatkan tenaga yang murah ini pihak kolonial Belanda kemudian menerapkan kebijakan Politik Pintu Terbuka dan mendirikan sekolah-sekolah dengan pendidikan sistem barat untuk rakyat di negeri jajahan.

Kebijakan politik pintu terbuka dan mendirikan sekolah-sekolah bagi pemerintah kolonial Belanda disamping untuk mendapatkan tenaga yang murah juga dipengaruhi oleh pergolakan yang terus menerus di Eropa yang berimplikasi

61 Sudiyo., "Perhimpunan Indonesia Sampai Dengan Lahirnya Sumpah Pemuda," PT. Bina Aksara, Jakarta, 1989, hal. 8-9.

pada mempersulit hubungan antara negeri jajahan Belanda dengan Nederland, disamping mahalny biaya perjalanan dan mahalny biaya yang harus dikeluarkan untuk menggaji tenaga-tenaga administrasi dari negeri Belanda, sedangkan kebutuhan bagi penyediaan tenaga administrasi pada wilayah jajahan yang luas yang mendesak untuk dipenuhi, telah memaksa pemerintah Belanda untuk menerapkan kebijakan pendidikan bagi masyarakat di Hindia Belanda (Indonesia).

Kemudian langkah yang diambil oleh pemerintah kolonial Belanda untuk mendirikan sekolah-sekolah dengan pendidikan sistem barat bagi rakyat di negeri jajahan secara luas, juga mempunyai akibat yang negatif dan positif. Akibat yang negatif jelas bahwa orang-orang Indonesia tetap diperlakukan sebagai tenaga murahan dan berkedudukan rendah dalam pekerjaan. Sedangkan akibat positifnya ialah orang-orang Indonesia sebagian kecil telah dapat membaca dan menulis. Dengan modal membaca dan menulis inilah, maka dapat belajar tentang keadaan dan perkembangan di dunia.

Tanpa harus mengecilkan keberadaan beberapa tokoh perjuangan sebelum lahirnya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908, adalah hal yang ingin ditekankan adalah bagaimana sebuah gerakan itu dilakukan dengan tetap mengacu kepada empat dimensi atau aspek ukuran sebuah gerakan di atas.

Berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 dapat dilihat dalam konteks sejarah, sebagai akumulasi kesadaran akan pentingnya sebuah upaya pemberian pendidikan kesadaran terhadap status sosial dan kebodohan yang dialami oleh masyarakat yang sekian abad di bawah penjajahan Belanda, dan dipandang perlu juga adanya organisasi yang bersifat rasional yang tidak tersekat oleh dimensi

primordialisme kedaerahan, guna memperlancar proses penyadaran rakyat.

Dr. Wahidin Sudirohusodo yang sejak awal 1907 memiliki kesadaran dan idealisme akan pentingnya mewujudkan ide untuk mendirikan organisasi “*Studiefond*” yang bersifat nasional, dan dr Wahidin menemukan tempat yang cocok untuk mempropagandakan ide *studiefond* di lingkungan pelajar STOVIA, dengan asumsi bahwa para pelajar dinilai oleh dr. Wahidin akan mudah menangkap maksud dan tujuan *studiefond* itu. Hal ini didukung oleh keberadaan para pelajar STOVIA yang telah banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran modern, interaksi pergaulan dengan aneka ragam suku bangsa telah terjalin baik, karena pelajar STOVIA terdiri dari berbagai suku bangsa dan rasa kesadaran nasional relatif telah dimiliki karena pengaruh pengetahuan dalam mempelajari ilmu kenegaraan.

Ide dr. Wahidin untuk membentuk organisasi *studiefond* ini pada awalnya direspon dengan baik oleh dua orang pelajar STOVIA, yakni R. Soetomo dan M. Soeraji, terutama dalam usaha untuk mendirikan suatu organisasi yang bersifat luas dan memiliki jangkauan masa depan yang mengarah cita-cita nasional.

Berawal dari pertemuan dan diskusi antara dr. Wahidin dengan R. Soetomo dan M. Soeraji inilah kemudian dimulai upaya-upaya pendirian *studiefond*, dengan melibatkan lebih banyak lagi dari kalangan pelajar STOVIA. Proses sosialisasi ide pentingnya *studiefond* untuk membangun cita-cita nasional ini kemudian dilanjutkan oleh R. Soetomo dan M. Soeraji melalui media-media non-formal dengan kawan-kawannya di STOVIA. Akumulasi dari pertemuan-pertemuan dan diskusi-diskusi non-formal ini kemudian menghantarkan kesepakatan bersama secara formal pada

tanggal 20 Mei 1908 untuk mendirikan organisasi studiefond yang diberi nama “*Budi Oetomo.*”

Beberapa hal yang menjadi catatan bahwa organisasi Budi Utomo itu lahir pada kondisi sosial, politik dan kekuasaan yang masih sarat dengan corak feodalisme, anggotanya banyak didominasi oleh Jawa, dan berasal dari kalangan bangsawan dan priyayi. Kondisi ini kemudian telah juga menjadi faktor penentu corak atau sifat organisasi Budi Utomo dimasa-masa awal berdirinya, yang cukup diwarnai oleh corak dan tradisi Jawa, serta program yang banyak diorientasikan kepada masyarakat Jawa.

Hal ini terlihat pada Kongres I di Yogyakarta, sebagaimana studi mendalam mengenai dasa warsa pertama dari berdirinya Budi Utomo yang dilakukan oleh Akira Nagazumi, bawah pada waktu Kongres I di akhir tahun 1908 terjadi pertentangan antara golongan muda yang banyak berasal dari Batavia dan golongan tua yang kebanyakan berasal dari Yogya. Pada pemilihan figur ketua, dan berakhir dengan dipersiliahkannya golongan tua untuk memimpin organisasi ini, pada diri R. M. Tirtokusumo.

Selanjutnya Budi Utomo tetap merupakan suatu organisasi yang memberikan identitas kepada orang-orang Jawa yang terpelajar. Kebudayaan Jawa dan adat istiadatnya tetap dipertahankan disamping tekanan pada pentingnya pendidikan untuk kemajuan pemuda Jawa.⁶²

Budi Utomo belum bergerak dalam bidang politik dan masih bergerak pada kegiatan sosial-budaya. Budi Utomo masih melihat bahwa memasuki wilayah-wilayah politik sangat berbahaya. Budi Utomo bersemboyan, “*Sebagai Hidupnya Pohon Beringin.*” Ini dapat diartikan, bawah bergerak

62 R.Z., Leirissa., Op. Cit, hal. 43-44

pada bidang politik akan cepat ditindak oleh pemerintah kolonial Belanda.⁶³

Pola pergerakan yang dilakukan oleh Budi Utomo dinilai oleh beberapa orang anggotanya terkesan lambat dan kurang progresif, serta tidak ada keberanian. Ini menjadikan beberapa anggotanya memilih keluar, seperti Sowardi Soerjaningrat dan Tjipto Mangunkusumo yang sering dinamakan golongan radikal, yang menganggap konflik dengan penjajah sebagai masalah utama. Mereka lalu bergabung dengan Douwes Dekker dalam *Indische Partij*.

Indische Partij didirikan pada tahun 1912 di Bandung oleh Douwes Dekker, Tjipto Mangunkusumo dan Sowardi Soerjaningrat yang kemudian dikenal sebagai tiga serangkai. Jelas bahwa *Indische Partij* tidak hanya mengutamakan program pendidikan dan budaya, akan tetapi jelas-jelas mencanangkan kemerdekaan. Walaupun nasionalisme Indonesia pada saat itu belum lahir, yang ada adalah nasionalisme Indie. Namun sikap *Indische Partij* merupakan sikap politik yang menginginkan dihapusnya pemerintah kolonial Belanda. Formulasi yang diberikan dalam Anggaran Dasar berdirinya *Indische Partij* sebagai; “Tujuan *Indische Partij* adalah membangun patriotisme semua *Indiers* pada tanah yang telah memberi hidup bagi mereka agar didorong untuk bekerjasama atas dasar persamaan, dan untuk persiapan kearah kemerdekaan.”⁶⁴ Dengan sendirinya “*Nasionalisme Indie*” ini tidak dibiarkan leluasa bergerak oleh pihak penguasa pada waktu itu.

Indische Partij dibubarkan oleh pemerintah Belanda, karena dilihat pola pergerakan yang dilakukan oleh personil ketiga serangkai sudah memasuki wilayah politik yang

63 Drs. Sudiyo., Op. Cit., hal. 18

64 R.Z. Leirissa., Op Cit, hal. 45

langsung menyerang posisi dan keberadaan pemerintah kolonial Belanda. Argumentasi pemerintah Belanda membubarkan *Indische Partij* adalah karena di Hindia Belanda pada waktu itu tidak dibenarkan adanya partai politik dan *Indische Partij* dianggap telah juga mengancam ketentraman umum.

Douwes Dekker yang tidak puas dengan keputusan pembubaran *Indische Partij* memilih berangkat ke negeri Belanda untuk memperjuangkan organisasinya, sedangkan Sowardi Soerjaningrat dan Tjipto Mangunkusumo tetap melanjutkan perjuangan pergerakan dengan membentuk suatu kepentingan yang dinamakan “*Komite Bumi Putra*” pada saat menjelang hari ulang tahun ke-100 pembebasan negeri Belanda dari penjajah Perancis. Pada momentum inilah Komite Bumi Putra malancarkan propaganda untuk menentang rencana perayaan itu. Komite Bumi Putra membangun propaganda bahwa tidak wajar bila rakyat terjajah harus ikut merayakan hari kemerdekaan penjajahnya.

Dalam rangka kegiatan kepanitiaan Komite Bumi Putra, Soewardi menulis karangan yang berjudul “*Áll Ikeen Nederlander Was*” (bila saja saya seorang Belanda), yang mengecam pemerintah memaksakan pribumi yang tertindas itu merayakan kemerdekaan bangsa yang menindasnya. Reaksi pemerintah Hindia Belanda adalah pembuangan Tjipto Mangunkusumo dan Soewardi Soerjaningrat ke negeri Belanda pada bulan Agustus 1913.

Jasa *Indische Partij* adalah memasukkan unsur politik dalam pandangan berbagai kelompok sosial yang hidup di kota-kota. Pertentangan antara penjajah dan dijajah sejak itu makin lama makin mempengaruhi kehidupan kaum intelektual di kota-kota besar di Indonesia.

Pembubaran dan pembuangan *Indische Partij* beserta beberapa penggagasnya telah menunjukkan bagaimana perjuangan dalam bidang politik sungguh berat dan banyak menanggung resiko. Berbeda dengan pergerakan nasional yang tidak langsung melalui bidang politik, seperti Budi Utomo yang bergerak dalam bidang sosial budaya, dan Sarekat Islam yang bergerak dalam bidang ekonomi. Begitu pula dengan perkumpulan Muhammadiyah, yang sejak semula bergerak pada bidang sosial dan agama dapat hidup dengan aman dan cukup lama. Namun, bagi angkatan muda pergerakan yang demikian itu, dinilai tidak revolusioner dan tidak ada kemajuan, terutama bagi golongan pelajar.⁶⁵

Pembuangan para aktivis pendiri *Indische Partij* ke negeri Belanda ternyata pada perkembangan selanjutnya telah juga memberikan pengaruh kepada terbangunnya beberapa perubahan yang cukup berarti bagi perkumpulan pelajar Indonesia di negeri Belanda.

Para eks aktivis *Indische Partij* pada tahun 1913 yang dibuang ke negeri Belanda ini kemudian pada perkembangan selanjutnya membangun jaringan komunikasi dan diskusi serta berbagi informasi mengenai kondisi tanah air. Dari aktivitas diskusi dan informasi antara eks aktivis *Indische Partij* ini kemudian turut mempengaruhi perkembangan perhimpunan pelajar Indonesia di negeri Belanda. Ideologi *Indische Partij* yang memang mempertentangkan penjajah dan yang dijajah. Selain itu *Indische Partij* juga menginginkan kemerdekaan, keadaan ini meningkat lagi dengan datangnya Achmad Soebarjo dan Muhammad Hatta. Sejak itu nama *Indische Vereeniging* juga berangsur-angsur ditinggalkan dan diganti dengan nama Perhimpunan Indonesia (PI) sebagai

65 Sudiyo., Op.Cit., hal. 20.

sebuah penegasan pada identitas nasional yang baru dan memberi nama baru “Indonesia Merdeka” kepada majalah mereka.

Pada masa awal berdirinya organisasi pelajar Indonesia di negeri Belanda ini juga tidak bergerak pada bidang politik, akan tetapi semata-mata sebagai pusat kegiatan sosial dan kebudayaan dimana para mahasiswa Indonesia dapat melewatkan waktu senggangnya dan saling bertukar berita dari tanah air. Akan tetapi proses selanjutnya bersamaan dengan kedatangan eks aktivis *Indische Partij* dan semakin bertambahnya pelajar (setelah pelaksanaan politik etis), yang belajar di negeri Belanda (Moh. Hatta dan kawan-kawannya). Organisasi pelajar Indonesia ini mengalami proses perubahan yang cukup radikal yang semula berkonsentrasi pada kegiatan-kegiatan sosial dan budaya, bergeser kepada kegiatan-kegiatan yang mengutamakan masalah politik.

Sejak bulan Februari 1925 Perhimpunan Indonesia mengganti Anggaran Dasarnya, dinyatakan bahwa tujuan perhimpunan Indoensia adalah memperjuangkan kemerdekaan penuh bagi Indonesia. Tujuan ini hanya bisa dicapai bila seluruh bangsa Indonesia serentak bergerak maju. Perbedaan antara yang dijajah dan yang terjajah ditegaskan lebih jauh. Sikap ini dikenal sebagai azas “*National Demoratisch dan non-cooperatie.*”⁶⁶

Kondisi sosiologis pelajar Indonesia di negeri Belanda telah banyak membentuk proses perubahan pada pola sikap dan pola pikir mereka, ketika mengalami sebuah kondisi yang sangat berbeda dengan apa yang dialami di daerah asal mereka. Mereka yang lama tinggal disana memperoleh pengalaman yang semakin luas, dan mengalami dampak

66 R.Z., Leirissa., Op. Cit., 56-57.

tambahan sebagai akibat perpindahan mereka dari suatu masyarakat kolonial yang restriktif dan paternalitis kedalam masyarakat yang lebih terbuka, dimana mereka untuk pertama kalinya dianggap sederajat dengan bangsa Eropa baik didepan hukum maupun dalam masyarakat.

Perubahan kondisi lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh pelajar Indonesia ini juga telah berdampak pada terjadinya proses pencerabutan budaya asal, yang berhadapan dengan kehidupan masyarakat Eropa yang baru hiruk pikuk dengan terjadinya perang dunia. Kondisi psikologis dan sosiologis ini mengkondisikan pelajar Indonesia untuk mengatasi krisis identitas pribadi. Dan ini kemudian sejalan dengan usaha pencarian identitas sebagai bangsa Indonesia. Kedua persoalan identitas di atas kemudian tersalur dalam aktivitas gerakan kebangsaan.

Ada empat pokok dalam ideologi Perhimpunan Indonesia (PI) yang dikembangkan sejak permulaan tahun 1925. Dengan memperhatikan masalah-masalah sosial dan ekonomi, ideologi PI menempatkan kemerdekaan sebagai tujuan politik utama. Keempat pokok itu adalah:

1. Kesatuan Nasional; perlunya mengesampingkan perbedaan-perbedaan sempit dan perbedaan berdasarkan daerah dan perlu dibentuk kesatuan aksi melawan Belanda untuk menciptakan negara kebangsaan Indonesia yang merdeka dan bersatu.
2. Solidaritas; tanpa melihat perbedaan yang ada sesama orang Indonesia, maka perlu disadari adanya pertentangan kepentingan yang mendasar antara penjajah dan yang dijajah dan kaum nasionalis haruslah mempertajam konflik antara orang kulit putih dan sawo matang.
3. Noon-kooperasi; keharusan untuk menyadari bahwa

kemerdekaan bukannya hadiah sukarela dari Belanda tetapi harus direbut oleh bangsa Indonesia dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri dan oleh karena itu tidak perlu mengindahkan dewan perwakilan colonial seperti *Volksraad*.

4. Swadaya: dengan mengandalkan kekuatan sendiri perlu dikembangkan suatu struktur alternatif dalam kehidupan nasional, politik, sosial, ekonomi dan hukum, yang kuat berakar dalam masyarakat pribumi dan sejajar dengan masyarakat kolonial.⁶⁷

Unsur-unsur dari ke empat pokok pikiran PI di atas, nampaknya bukanlah sebuah hal yang baru pada konteks sejarahnya, karena pokok-pokok pikiran yang ada itu sudah ada pada tahun-tahun sebelum seperti yang ditunjukkan oleh *Indische Partij* sudah menekankan kesatuan nasional, Sarekat Islam telah menekankan perlunya swadaya dan PKI adalah kampium yang gigih dalam prinsip non-kooperasi dan kemerdekaan. Akan tetapi yang menjadi kelebihan PI adalah kemampuan menggabungkan beberapa unsur pemikiran yang terpadu guna menjawab tantangan persoalan yang ada, dan upaya ini belum pernah dilakukan oleh organisasi-organisasi sebelumnya.

Aktivitas politik mahasiswa Indonesia di negeri Belanda mulai memasuki proses kristalisasi pilihan metode perjuangan, selain beberapa isu-isu yang terus dikampanyekan dan dipropagandakan. Ketegasan pilihan metode perjuangan PI ini terlihat jelas, ketika PI pada bulan Januari 1925 mengeluarkan pernyataan mengenai prinsip-prinsip organisasi PI, yang menekankan bahwa ideologi PI harus dilaksanakan benar-benar oleh suatu partai yang

67 John Ingleson., "*Jalan Ke Pengasingan, Pergerakan Nasional Indonesia Tahun 1927-1934*" LP3ES, Jakarta, cet. II, 1988, hal. 5.

merasa bertanggungjawab kepada rakyat yang berusaha mencapai kemerdekaan melalui aksi massa.

Mahasiswa Indonesia sangat terpengaruh oleh berbagai aliran pemikiran yang sedang berkembang di Eropa pada permulaan tahun 1920-an dan terutama kuatnya pikiran-pikiran Marxis, Leninis dan sosialis, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Hatta, Gatot Mangkupraja, dan Subarjo. Daya tariknya terletak dalam penjelasannya tentang situasi penjajahan dan filsafat determinisme historisnya.⁶⁸

Suatu yang menarik dalam melihat dinamika pergulatan pemikiran PI, walaupun para pemimpin PI sangat terpengaruh pikiran-pikiran Marxis-Leninis, namun sedikit sekali dari mereka itu yang mengadakan analisa kelas dalam masyarakat Indoensia. Sebagai gantinya, mereka melancarkan suatu perjuangan ras, antara orang Indonesia yang berkulit coklat melawan orang Belanda yang berkulit putih, antara bangsa Asia melawan bangsa Eropa, Karena hampir semua mahasiswa Indonesia di negeri Belanda merupakan anggota elite tradisional Indonesia, tidaklah mengherankan bahwa mereka tidak menganalisa masyarakat mereka dari sudut perbedaan kelas. Apalagi toh mereka itu dengan jelas menempatkan diri mereka sebagai anggota kelompok elite yang akan memerintah Indonesia setelah Belanda berhasil diusir. Kesadaran kelas sebagian besarnya hanya terbatas pada kritik yang mereka lancarkan terhadap kaum priyayi yang bekerjasama secara sukarela dengan Belanda.⁶⁹ Selain itu tidak.

Para mahasiswa Indonesia di Eropa juga menyadari bahwa keadaan di Indonesia tidak jauh berbeda dengan keadaan di bagian-bagian Asia lainnya. Karena kondisi yang sama

68 John Ingleson., *Op Cit.*, hal 7.

69 John Ingleson., *Op Cit.*, hal.7.

dengan beberapa negara-negara wilayah Asia yang dijajah ini telah menjadikan hubungan yang akrab dengan mahasiswa dari berbagai penjuru Asia. Perhimpunan Indonesia juga mengirimkan utusan-utusan untuk menghadiri konferensi-konferensi internasional yang memerangi penjajahan. Organisasi semacam ini sering didasarkan pada ideologi Marxisme seperti Liga Democratie Internasional untuk perdamaian. Dengan demikian cita-cita sosialisme makin dikenal dikalangan mahasiswa-mahasiswa Indonesia.

Anggota-anggota Perhimpunan Indonesia yang kembali ke Indonesia meneruskan cita-cita kemerdekaan dan sikap non-kooperasi, dalam berbagai organisasi politik, pelajar dan pemuda. Khusus mengenai sikap non-kooperasi terhadap penjajah Belanda ini, terjadi perdebatan pada konteks penggunaan kekerasan dalam mengusir Belanda dan mencapai Indonesia merdeka, dan masalah kapan dan bagaimana kemerdekaan harus dicapai. Konsensus yang tercapai dalam lingkungan PI ialah bahwa mereka sebenarnya tidak menginginkan penggunaan kekerasan, tetapi konflik kepentingan dengan penjajah sedemikian rupa sehingga tujuan untuk memperoleh kemerdekaan hanya dapat dicapai dengan kekerasan, sikap PI ini kemudian ditegaskan kembali oleh Hatta, bahwa:

“Cepat atau lambat setiap rakyat ditindas akan memperoleh kemerdekaannya kembali. Ini merupakan pelajaran sejarah. Cara bagaimana kemerdekaan itu akan diperoleh kembali, banyak ditentukan oleh para pemegang kekuasaan. Sikap penguasa itulah yang menentukan apakah kemerdekaan akan dicapai melalui pengorbanan darah dan air mata atau akan dicapai melalui jalan yang sama sekali lain”⁷⁰

70 John Ingleson., Op Cit., hal. 11-12.

Dalam suatu karangan mengenai “*Perhimpunan Indonesia*” Soenario, pimpinan organisasi ini dipertengahan tahun 1920-an, membagi sejarah organisasi tersebut dalam lima kurun waktu:

1. 1908 – 1913: Massa berkelompok demi cita-cita dan cara untuk mencapainya, walaupun tanda-tanda patriotisme telah dapat dilihat.
2. 1913 – 1919: Orientasi politik kearah Indonesia merdeka, lantaran pengaruh tiga orang pemimpin Indische Partij yang diasingkan dari tanah airnya.
3. 1919 – 1923: Meningkatnya semangat nasionalisme yang mengarah keperubahan nama.
4. 1923 – 1930: Perubahan dari organisasi kemahasiswaan menjadi organisasi politik.
5. 1930 – sesudahnya: Kemunduran organisasi dan pergeseran dari politik anti kolonial ke inti fasis.⁷¹

Salah satu organisasi mahasiswa yang juga perlu dilihat bagaimana posisi signifikan yang telah dimainkannya dalam proses penyadaran terhadap kondisi dan persoalan penjajahan adalah organisasi yang didirikan oleh Ir. Soekarno pada tahun 1925 di Bandung, yakni *Agemeene Studie Club*. Pada organisasi ini peran Soekarno cukup memberikan andil yang besar dalam memainkan perannya dalam membawa dan meletakkan garis perjuangannya yang tidak hanya bergerak pada aspek perjuangan sosial dan budaya, tapi juga membangun perjuangan politik.

71 Akira Nagazumi., *Masa Awal Pembentukan 'Perhimpunan Indonesia': Kegiatan Mahasiswa Indonesia di Negeri Belanda, 1916-1917, dalam buku Indonesia Dalam Kajian Sarjana Jepang, Perubahan Sosial-Ekonomi Abad XIX dan XX, dan Berbagai Aspek Nasionalisme Indonesia*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, 1986, hal. 134-135.

Perjuangan politik organisasi ini kemudian telah menghantarkan kepada identitas perjuangan garis politik yang tegas, dengan terjadinya perubahan organisasi *Algemeene Studie Club*, menjadi Partai Nasional Indonesia (PNI).

Cita-cita Partai Nasional Indonesia tidak berbeda jauh dengan cita-cita Perhimpunan Indonesia. Nasionalisme radikal ditanamkan dengan cara propaganda agar rakyat menjadi sadar akan tujuan perjuangan pergerakan. Trilogi Partai Nasional Indonesia yang ditanamkan kepada rakyat, adalah jiwa nasional (*nationaale greest*), tekad nasional (*nationaale wil*), dan tindakan nasional (*nationaale dead*). Dengan cara ini Partai Nasional Indonesia ingin mengerahkan rakyat untuk memperbaiki keadaan politik, ekonomi dan budaya. Agar kondisi kemelaratan dalam alam penjajahan jelas tertulis dalam benak rakyat, bahwa Belanda sebagai suatu kekuatan imperialis bertujuan mengeruk kekayaan bumi Indonesia dan mengeringkan kekayaan itu dari bumi Indonesia. Kegiatan Belanda itu merusak seluruh tatanan sosial, ekonomi dan politik Indonesia. Untuk memperbaiki keadaan itu haruslah dicapai kemerdekaan politik.⁷²

Proses dan akumulasi kesadaran kaum muda terhadap persoalan-persoalan dan kondisi penjajahan semakin menemukan bentuk-bentuk nasionalisme dan perumusan isu-isu perjuangan terhadap penjajahan kolonial Belanda semakin tegas dilakukan dengan cara-cara politik, yang tidak lagi berkuat hanya pada aspek sosial dan budaya, dalam membangun kontradiksi kesadaran terhadap posisi penjajah dan yang dijajah. Pola perjuangan yang semua kooperatif, karena represifitas kolonial Belanda yang sangat keras, sebagaimana yang dialami oleh *Indesche Partij*, sudah tidak

72 R.Z., *Leirissa.*, Op. Cit., hal. 59.

lagi menjadi momok yang harus ditakutkan. Bersamaan dengan semangat kebangsaan yang mulai muncul. Dan ini menemukan muaranya pada tanggal 28 Oktober 1928, yang mana pada kongres pemuda Indonesia berhasil melahirkan ikrar “*Sumpah Pemuda*,” sebagai bentuk penegasan akan arti sebuah identitas nasional yang memiliki satu bangsa, satu tanah air dan bahasa persatuan Indonesia.

Para pemuda yang menggerakkan Sumpah Pemuda pada tahun 1928 umumnya mahasiswa yang tengah menuntut ilmu di *Recht Hoge School* (sekolah tinggi hukum), dan *Geneeskundige Hoge School* (sekolah tinggi kedokteran). Ketika itu mereka berkecimpung dalam organisasi pemuda yang anggotanya mayoritas sedang menuntut ilmu di Perguruan Tinggi atau Sekolah Menengah. Bahkan organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) berdiri pada 1926, yang merupakan pelopor penyelenggara Kongres Pemuda II tahun 1928, adalah organisasi mahasiswa ekstra kampus. Soegondo Djojopuspito dan Katja Sungkana duduk dalam panitia Kongres Pemuda II mewakili PPPI, sebagai catatan perlu dikemukakan bawah istilah “*pelajar*” pada waktu itu dipergunakan untuk pengertian mahasiswa perguruan tinggi, sedang bagi mereka yang masih duduk di bangku sekolah menengah disebut sebagai “*moerid*.”

BAB 4

ANGKATAN '45, PERGOLAKAN FISIK, DAN REVOLUSI SOSIAL

Kebangkitan dan kesadaran pemuda, pelajar dan mahasiswa yang semakin terbina kesadarannya akan arti kemerdekaan semakin menunjukkan perlawanan yang semakin radikal. Hal ini didukung oleh beberapa kondisi perubahan dan peralihan kekuasaan penjajah dari pemerintah Hindia Belanda ke pemerintah Jepang dan beberapa perubahan di tingkat internasional. Pada masa pendudukan Jepang kekuatan-kekuatan terpendam dalam masyarakat mendapat kesempatan untuk muncul kepermukaan. Kalau pada masa kolonial Belanda beberapa kekuatan masyarakat itu ditekan dan tidak diberikan kesempatan untuk muncul, maka pada waktu Jepang berkuasa justru beberapa kekuatan yang ada diberikan kesempatan untuk muncul, dan oleh pemerintah Jepang justru dipergunakan untuk memobilisasi secara maksimal

unsur-unsur kekuatan rakyat, demi kepentingan-kepentingan perangnya.

Ketika Jepang menyerah kalah kepada kekuatan sekutu Belanda, unsur-unsur kekuatan yang ada yang telah diberikan kesempatan untuk muncul selama pendudukan Jepang memainkan peranan yang penting dan menentukan dalam tahun-tahun pertama dari perang kemerdekaan. Jepang dalam upaya memenangkan peperangan Asia-Pasifik, telah juga membentuk kekuatan-kekuatan perang yang melibatkan pemuda, pelajar dan mahasiswa yang dilatih untuk membantu Jepang memenangkan peperangan melawan sekutu.

Perang Asia-Pasifik yang dimenangkan oleh sekutu dengan menyerahnya Jepang di Saigon, setelah Hiroshima dan Nagasaki di Bom atom oleh sekutu pada tanggal 13 dan 14 Agustus 1945. Indonesia merupakan salah satu front dari kekuatan angkatan perang Jepang di Asia juga hancur.

Pada saat itu pula situasi dimana elit politik yang ada pada saat itu sulit untuk mengambil sikap politik karena adanya pertentangan dimana satu kubu menginginkan kemerdekaan dalam artian mengadakan revolusi patriotik yang didorong oleh kekuatan nasionalitis, sosialis dan Pan Islamis. Dan kubu lainnya ingin mengadakan revolusi sosial.

Pergulatan politik ini kemudian dimenangkan oleh pihak yang menginginkan revolusi patriotik atau revolusi nasionalis. Gerakan pemuda rakyatpun akhirnya terpengaruh dan terseret di dalam revolusi patriotik ini. Konflik politik yang terjadi di elit ternyata berimbas kepada gerakan pemuda rakyat. Hal ini dapat dilihat dari seluruh kekuatan-kekuatan yang ada masing-masing mempunyai angkatan bersenjata. Seperti kubu Sosialis (Syahrir) mempunyai Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia), PNI mempunyai barisan pelopor dan

Tan Malaka mempunyai barisan Banteng, serta banyak lagi laskar-laskar lainnya.⁷³

Ketika pasukan Jepang mulai terdesak pada tahun 1943 dalam medan pertempuran di Pasifik dan Okinawa dapat direbut oleh Amerika pada bulan Mei 1945, Jepang membentuk Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPPKI). BPPKI mulai bersidang pada tanggal 28 Mei 1945. Tatkala Rusia bergabung dengan sekutu dan menyerbu Manchuria, pihak Jepang melangkah lagi dan mempercepat tanggal pembentukan negara-negara boneka tersebut (yang oleh BPPKI) direncanakan akan jatuh pada tanggal 17 September 1945. Soekarno, Hatta, dan Rajiman diterbangkan ke Dalat (Saigon) untuk menemui Jenderal Terauchi yang akan merestui pembentukan negara tersebut. Sekembali rombongan itu pada tanggal 14 Agustus, dikeluarkan pengumuman untuk memanggil anggota-anggota BPPKI, yang sedianya baru akan bersidang pada tanggal 18 Agustus sampai 7 September. Kini tanggal proklamasi diajukan pada tanggal 16 Agustus jam 10.00 WIB.

Namun seluruh rencana itu ternyata tidak dapat dilaksanakan. Golongan-golongan yang tidak terwakilkan dalam wadah yang dibentuk Jepang mempunyai rencana lain. Golongan-golongan ini terutama terdiri dari para pemuda yang tidak menyenangi Jepang. Sudah lama golongan ini menunjukkan sikap permusuhannya. Umpamanya pemberontakan PETA di Blitar merupakan salah satu contoh. Contoh lain adalah perlawanan pemuda pada bulan Juni. Pada waktu Jepang sudah membentuk wadah tunggal untuk golongan pemuda dengan harapan dapat menarik mereka kepihaknya. Organisasi yang bernama Gerakan

73 Bahan Diskusi., *Pokok Ketiga Gerakan Mahasiswa Indonesia*, "dikeluarkan oleh Serikat Mahasiswa untuk Kedaulatan Rakyat (SMKR).

Rakyat baru bersidang di Bandung untuk mengesahkan Anggaran Dasarnya. Dalam perdebatan, pihak Jepang mencegah pemasukan istilah “*Republik Indonesia*” dalam anggaran dasar. Para pemuda melawan dan mensabotase organisasi itu.

Kelompok-kelompok lain dari pemuda yang tidak sejalan dengan rencana BPPKI adalah:

1. Ika Dai Gakku (mahasiswa kedokteran di Asrama Perapatan) yang pro Syahrir, seorang tokoh dari sebelum perang menolak bekerjasama dengan Jepang dan melakukan gerakan “Bawah Tanah” dengan jaringan di seluruh Jawa.
2. Asrama Menteng 31 yang dipimpin oleh orang-orang yang bekerja pada kantor propaganda Jepang (Sukarni, Chairul Saleh, dan lain-lain).
3. Asrama Indonesia Merdeka dan Mr. Soebarjo yang mendapat perlindungan dari Admiral Maeda, dan yang berhasil memberi kursus-kursus pada kira-kira 100 orang pemuda.⁷⁴

Golongan-golongan yang berbeda pandangan inilah yang menyambut Soekarno dan Hatta dari Dalath pada tanggal 15 Agustus, dan mendesak agar proklamasi dikeluarkan tanpa sidang PPKI yang dianggap buatan Jepang. Alasan sebagian mereka adalah agar sekutu yang menang itu tidak mengecap RI sebagai buatan Jepang.

Namun Soekarno dan Hatta menolak permintaan para pemuda dengan alasan bahwa alat yang ada (PPKI) bisa saja dipakai untuk tujuan yang lebih murni. Selain itu mereka ingin menghindari pertarungan senjata dengan Jepang. Sebab itu para pemuda mengambil tindakan sendiri. Dalam

74 R. Z. Leirissa., Op. Cit., hal. 91.

suatu perundingan, diputuskan untuk mengungsikan Soekarno-Hatta ke Rangasdengklok diluar Jakarta, dari mana kedua tokoh itu bisa mengeluarkan proklamasi kemerdekaan tanpa halangan Jepang. Kemudian akan diadakan revolusi (perebutan kekuasaan dari pihak Jepang) dengan bantuan satuan-satuan PETA. Rencana ini mulai dilangsungkan pada tanggal 16 Agustus, namun ternyata PETA tidak bersedia berontak.

Sejarah telah mencatat bagaimana kenekatan generasi 1945 dalam mendorong proses terjadinya penegasan sikap akan kedaulatan Indonesia dengan dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno-Hatta. Ridwan Saidi mengatakan bahwa keterlibatan generasi muda pada era tersebut tercerminkan dalam suatu peristiwa bersejarah bagaimana para pemuda waktu itu, antara lain Adam Malik, Chairul Saleh, Sukarni, menculik Soekarno-Hatta agar segera mengumandangkan proklamasi kemerdekaan tanpa menunda-nunda waktu lagi. Keberhasilan dari usaha ini lalu menjadi contoh konkrit yang positif dari angkatan '45 sebagai tindakan berani, cepat dan tepat.⁷⁵

Sementara itu antara September dan Februari 1946 para pemuda merupakan faktor utama dalam perubahan-perubahan. Pelbagai badan perjuangan muncul dari berbagai suku bangsa, pelajar, pegawai dan lain-lain kelompok. Gerakan mereka terutama di dalam kota-kota dan semangat anti Jepang ataupun anti Inggris dan Belanda. Semboyan mereka adalah "*Merdeka atau Mati.*"

Pergolakan pemuda yang paling besar terjadi di Surabaya. Sejak semula mereka telah mempunyai persenjataan yang kuat berupa 12 tank dan senjata untuk satu resimen.

75 Ridwan Saidi., Op. Cit., hal. 74.

Golongan pemuda revolusioner yang dibangkitkan oleh pihak Jepang dalam pelbagai latihan militernya, kini muncul sebagai barisan terdepan Perang Kemerdekaan Indonesia. Menurut pendapat sementara sejarawan ciri-ciri mereka sebagai berikut:

1. Ciri-ciri kejiwaannya adalah dianggap kebal, dan lain-lain, yang diperoleh secara “*gaib*” (Jimat).
2. Faktor Islam dalam bentuk semangat Jihat dan mati syahid juga penting untuk menimbulkan keberanian melawan senjata modern.
3. Tokoh-tokoh “jago” dalam masyarakat pedesaan mendapat peran sebagai pelawan penjajah.
4. Peran radio pemberontakan seperti dari Bung Tomo sangat efektif dalam mengobarkan semangat.⁷⁶

Beberapa gejala yang juga perlu dilihat, tentang bagaimana gejala generasi muda antara tahun 1945-1946 adalah terjadinya gerakan-gerakan yang dinamakan revolusi sosial, dimana golongan pemuda melakukan aksi untuk meruntuhkan golongan adat yang dianggap kaki tangan penjajah sejak Belanda dan Jepang. Dalam hal ini para pemuda tidak terorganisir rapih, tetapi sering juga (seperti di Sumatera Timur) menggunakan badan-badan perjuangan yang dibentuk secara spontan. Faktor ideologi Marxisme sangat kuat, tetapi golongan elite Marxisme di Jakarta tidak mengambil bagian.

Revolusi sosial terjadi di Aceh, Sumatera Timur, Tapanuli, Banten, Pekalongan, Surakarta. Di Aceh, sejak zaman Belanda, golongan adat (ulebalang) dianak emaskan sebagai penguasa, para pemimpin dari golongan Islam dikesampingkan karena dianggap berbahaya. Pada masa

76 R.Z. Leirissa., Op. Cit., hal 96.

Jepang kedua golongan itu diperlakukan sama, sepanjang menguntungkan Jepang. Pada awal revolusi golongan ulebalang muncul lagi dengan perkiraan Belanda akan kembali. Sewaktu hal itu tidak terjadi, golongan elit Islam muncul. Wadah mereka adalah PUSA yang dipimpin oleh Daud Beureuh. Pemberontakan bermula di Pidie. Seluruh ulebalang digulingkan dan diganti oleh para ulama. Kemudian gerakan ini bergulir keseluruh Aceh dan baru berakhir pada pertengahan Maret 1946.

Sumatera Timur, para raja, di zaman Belanda dianak emaskan, pada mulanya juga bangkit dengan harapan Belanda akan kembali. Ketika hal itu tidak terjadi mereka mencoba mendekati pemimpin-pemimpin nasional di Medan untuk mengadakan perubahan dalam sistem pemerintahan kerjaan. Namun Golongan Marxisme tidak menerima hal ini dan melancarkan perlawanan terhadap para raja tersebut. Hanya dengan perantara pemerintah pusat peristiwa ini bisa diselesaikan. Hal-hal yang sama terjadi di Banten dan daerah pesisir Jawa Tengah.⁷⁷

Garis perkembangan selama Perang Kemerdekaan adalah, perbedaan dan pertentangan antara golongan yang memihak pada “*diplomasi*” (yang dijalankan oleh pemerintah dari golongan manapun) dan garis “*Perjuangan*” yang terutama diperlihatkan oleh para pemuda dalam bulan-bulan Agustus-Desember 1945, sampai dengan terjadinya Konferensi Meja Bundar (KMB), pada tahun 1949.

Kesadaran golongan mahasiswa yang ditunjukkan lewat pembentukan organisasi khusus untuk mereka sejak pertengahan tahun 1920-an, sesungguhnya merupakan bagian dari pertumbuhan kesadaran nasional (ke-Indonesiaan) yang

77 R.Z., Leirissa., Op. Cit., hal. 97.

terjadi dikalangan pemuda pada umumnya. Perwujudan kombinasi ikatan kemahasiswaan dengan ke-Indonesiaan di dalam PPPI pada tahun 1926, merupakan versi mahasiswa dari penampilan kombinasi ikatan kepemudaan dengan ke-Indonesiaan, seperti yang telah dimulai oleh IV tahun 1917 di Nederland yang kemudian berganti nama menjadi PI dalam tahun 1925 dan dilanjutkan dengan pembentukan IM di Jakarta tahun 1930. SIS yang terbentuk tahun 1936 melengkapi kombinasi kesadaran kemahasiswaan dan ke-Indonesiaan PPPI tersebut dengan kesadaran ke-Islaman.

Sekalipun SIS (Islam Studie Club) kembali menggunakan kesadaran primordial, namun mengingat PPPI serta USI (Unit Studiosorum Indonesia) dan RUPI (Rukun Pelajar Indonesia) tidak lagi memanfaatkan, maka gambaran umum yang memperlihatkan kecenderungan pergeseran kesadaran primordial kepada kesadaran kemahasiswaan sampai dengan perang dunia ke-II, tentulah dapat dipertahankan. Tetapi pengalaman perjuangan di bawah penjajahan Jepang dan revolusi kemerdekaan yang semakin melibatkan ideologi di dalam proses perumusan tujuan, strategi dan taktik serta perumusan susunan negara yang hendak didirikan, maka mencuat kesadaran baru di kalangan mahasiswa yakni kesadaran ideologi.

Interaksi mahasiswa dengan pemuda dan para pemimpin yang secara ideologi sudah matang seperti Soekarno, Hatta, Sjahrir dan lain-lain, diberbagai asrama dalam menghadapi Jepang dan menyongsong kemerdekaan, mendorong mereka untuk memahami serta meyakini ideologi sebagai pengaruh dan gambaran tujuan perjuangan. Perdebatan Panitia Persiapan Indonesia (PPKI) dalam mempersiapkan UUD yang penuh dengan pembahasan tentang pilihan dan penerapan ideologi, banyak mewarnai kesadaran ideologi mahasiswa.

Kesadaran ideologi mahasiswa semakin mengkrystal semenjak partai dibentuk kembali, berdasarkan maklumat Wakil Presiden tanggal 3 November 1945. Dapat dipercaya bahwa maksud dari maklumat itu yang mengharapkan partisipasi rakyat dalam rangka perjuangan (revolusi) untuk mempertahankan kemerdekaan, dan diwujudkan dalam bentuk partai politik sebagai organisasi keideologian, membangun persepsi mahasiswa tentang pentingnya peran ideologi di dalam organisasi sebagai alat perjuangan. Persepsi tersebut terlahir menjadi fakta sosiologis, lewat jalan perjuangan dengan ideologi dan organisasi, dalam bentuk peresmian Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada tanggal 5 Februari 1947, Perhimpunan Mahasiswa Kristen Indonesia (PMKI) tanggal 25 Mei 1947 dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI). Disertai dengan pembentukan partai yang seideologi yakni Masyumi (7 November 1945), Parkindo (18 November 1945) dan Partai Katholik (8 Desember 1945).

Sementara itu di masa revolusi kemerdekaan tersebut, mahasiswa menampilkan dua ciri lainnya sebagai pelengkap atas kesadaran golongan mereka, yaitu profesi dan komunitas dalam arti daerah pemukiman mereka. Maka dikenal organisasi seperti Perhimpunan Mahasiswa Kodokteran Hewan (PMKH) di Bogor, Perhimpunan Mahasiswa Djakarta (PMD), Perhimpunan Mahasiswa Yogyakarta (PMJ), dan Masyarakat Mahasiswa Malang (MMM).

Ada baiknya untuk mencatat pula pengaruh ideologi ke dalam pengorganisasian pelajar di masa itu. Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI) yang dibentuk dalam bulan Februari 1948, adalah hasil fusi di antara Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) sebagai organisasi mahasiswa kiri, dengan Ikatan Pelajar Indonesia (IPI) yaitu organisasi mahasiswa

kiri, dengan Ikatan Pelajar Indonesia (IPI) yaitu organisasi yang berhaluan sosialis yang dibentuk tanggal 27 September 1947. Sebagai alat perjuangan fisik, malah IPI membentuk Tentara Pelajar (TP) di Jawa Tengah dan TRIP di Jawa Timur.

BAB 5

GENERASI MAHASISWA '66

Sejarah membuktikan bahwa setelah kemerdekaan berhasil direbut, angkatan '45 mulai terkotak-kotak dalam kancah kehidupan politik nasional. Beberapa tokoh angkatan '45 segera masuk ke lingkaran kekuasaan dan menjadi bagian dari kekuatan politik di tahun 50 - 60-an, sebagian dari mereka yang tak berhasil masuk kedalam lingkaran kekuasaan - atau mereka yang tersingkir dari lingkaran itu (terutama setelah dicanangkannya Demokrasi Terpimpin⁷⁸ di tahun 1959 oleh presiden Soekarno) - mengambil sikap oposisi terhadap Soekarno: mereka mencela orientasi dan keabsahan rezim Soekarno.

Oposisi terhadap rezim Demokrasi Terpimpin ini datang dari dua kekuatan: yang pertama berasal dari tokoh-tokoh anti

78 Langkah Kembali ke UUD '45 dikumandangkan secara resmi melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pertama mengembalikan "jiwa '45' ini memungkinkan Soekarno memegang jabatan penting dalam tangannya berkat sifat UUD '45 yang memberikan kekuasaan utama dalam pemerintahan kepada presiden.

Soekarno di Angkatan Darat; yang kedua dari partai-partai yang dilarang di bulan Agustus 1960 yakni setelah terjadinya pemberontakan PRRI. Di Sumatera, pemberontakan PRRI yang pro barat pecah dalam tahun 1958 sampai dengan tahun 1960. Masyumi, partai Islam yang reformis (memiliki 20 persen di pemilihan umum 1955) dan Partai Sosialis Indonesia (partai kecil dimana anggota-anggotanya sebagian besar terdiri dari para kader dan intelektual pembaharu) terlibat dalam pemberontakan ini. Setelah gagal, kedua partai itu dilarang. Sebagian dari pemimpin mereka -- ditangkap walau tetap memiliki banyak pendukung sipil yang memilih menjadi oposisi terhadap Soekarno, terutama pada ormas yang tetap hidup seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang secara tidak resmi berafiliasi dengan Masyumi atau Gerakan Mahasiswa Sosialis (GEMSOS) yang dekat dengan Partai Sosialis Indonesia (PSI).

Masyumi dan PSI melakukan perlawanan bawah tanah pada Soekarno di tahun 1960 - 1965. Mereka terutama mengkritik keterbelakangan dan tidak rasionalnya sikap politik Soekarno yang amat bertolak belakang dengan gagasan-gagasan modern yang dimiliki para oposisi yang dibuat menurut model dari Dunia Barat.

Di antara kedua organisasi itu, meskipun lebih kecil PSI-lah yang paling aktif. Partai ini, paling tidak bekas anggota-anggotanya, mempunyai hubungan yang erat dengan para intelektual yang sebagian besar terdiri dari kalangan universitas. Mereka inilah yang menjelang akhir demokrasi dipimpin melakukan aksi-aksi bawah tanah dengan membuat berbagai agitasi (terutama di lingkungan universitas) sambil menunggu datangnya kesempatan baik untuk muncul kembali.⁷⁹

79 Francois., *Op. Cit.* hal. 8.

Sejumlah perwira Angkatan Darat yang anti Soekarno, terutama dari devisi Siliwangi, menunjukkan simpati terhadap PSI. Para cendekiawan bekas anggota PSI aktif dalam berbagai pertemuan, seminar dan colloquium, yang dilakukan bersama para perwira ini di Jawa Barat. Pada kesempatan-kesempatan itu diketengahkan tema-tema yang berhubungan dengan modernisasi di Indonesia dan keharusan Indonesia melakukan pembangunan ekonominya dengan menganut asas ekonomi liberal. Dasar-dasar ideologi oposisi terhadap Soekarno diperjelas untuk kemudian menentukan sebuah strategi bersama.

Pada konteks kondisi sosial, politik dan kekuasaan yang terjadi ini kita bisa melihat bagaimana proses kemunculan Angkatan '66 dan memberi peluang bagi mereka untuk memainkan peranan. Munculnya persekutuan antara unsur-unsur Angkatan Darat anti-komunis yang merasa bahwa cita-cita kemerdekaan telah dihinai oleh Soekarno dan karenanya harus dilakukan usaha untuk kembali pada sumber dan semangat '45 sambil membawa Indonesia dekat ke dunia barat dengan bekas anggota-anggota partai terlarang yang menunggu saat kemunculan mereka kembali ke dunia politik.

Angkatan Darat memegang peranan penting dalam tegaknya kekuasaan. Namun Soekarno mencoba membatasi pengaruh mereka dengan tujuan membuat sebuah keseimbangan antara kekuatan Angkatan Darat dan musuh utama mereka, Partai Komunis Indonesia (PKI).

Lalu karena kondisi ekonomi dan kritisnya sosial politik waktu itu, memungkinkan munculnya suatu angkatan baru dimana mereka diberi peluang oleh kondisi yang ada untuk memainkan peran. Angkatan tersebut tidak lain adalah angkatan '66 yang muncul pada arena politik pada awal

tahun 1966 bersamaan dengan peralihan kekuasaan pada militer.

Kemunculan ini didukung pula oleh membengkaknya jumlah mahasiswa di seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia. Menurut data yang dikutip Harsja W. Bachtiar, bila tahun 1946 - 1947 terdapat 387 orang mahasiswa, maka di akhir tahun 1965 jumlah tersebut melonjak menjadi 280.000 orang mahasiswa. Itu belum termasuk mahasiswa yang terdaftar di Perguruan Tinggi Swasta.

Catatan penting dalam kurun waktu ini, adalah munculnya berbagai organisasi mahasiswa yang bersifat berafiliasi ke partai politik tertentu. Misalnya HMI (Masyumi), PMII (NU), Sarekat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PSII), Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PERTI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, GMKI (Kristen), PMKRI (Katholik), GMNI (PNI) dan CGMI.⁸⁰

Pertarungan antar kekuatan-kekuatan politik di atas telah juga kemudian membawa pengaruh yang besar bagi polarisasi kehidupan kampus. Sejak sebelum tahun 1955, persepsi bertambah banyaknya mahasiswa serta prospek adanya Pemilihan Umum menyebabkan partai-partai politik tertarik pada dunia perguruan tinggi. Bila sebelumnya perguruan tinggi merupakan satu kelompok sosial yang sedikit sekali terpolitisir dan hanya ditugaskan untuk mencetak elit Indonesia, maka kini ia berubah menjadi satu ajang pertempuran politik.

Secara teoritis banyaknya jumlah mahasiswa ini sangat menarik perhatian para Partai Politik saat itu. Maka diciptakanlah kelompok-kelompok mahasiswa dan

80 Fahry Ali, *Mahasiswa, Sistem Politik di Indonesia dan Negara*, Inti sarana Aksara, Jakarta, 1985: 14-15.

diusahakan agar berafiliasi pada mereka. Seperti Central Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) berafiliasi ke PKI, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) berafiliasi ke Masyumi, Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) berafiliasi ke PNI, GMKI dan lain sebagainya. Hal yang mungkin sangat berpengaruh adalah karena pada masa ini pula Indonesia memasuki era demokrasi liberal dimana kebebasan dari tiap-tiap gerakan mahasiswa yang ada berhak dalam menentukan pilihan politiknya sendiri.⁸¹ Namun hal yang menjadi catatan dari analisis Francois Raillon dalam bukunya “Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia” dan Ridwan Saidi dalam “Mahasiswa dan Lingkaran Politik,” menegaskan bahwa proses radikalisis gerakan mahasiswa 1966 bukanlah dipengaruhi oleh berafiliasinya beberapa gerakan mahasiswa kepada Partai Politik. Namun radikalisis di perguruan tinggi ternyata lebih ditentukan oleh faktor-faktor yang lebih khusus.

Secara sistematis setiap partai politik menciptakan organisasi-organisasi kemahasiswaan yang berafiliasi kepada mereka. Dengan demikian mereka mulai memasukkan elemen-elemen pertama dalam debat politik di kalangan mahasiswa.

Di permulaan tahun '60-an dan pada periode Demokrasi Terpimpin, para mahasiswa dihadapkan juga dengan polemik dua kekuatan besar yang dengan cara dan dampak berbeda mencoba mempengaruhi mereka. Dua kekuatan berbeda ini terdiri dari kekuatan LEKRA (Lembaga Kebudayaan Rakyat) yang dekat dengan PKI disatu pihak melawan Manikebu (Manifesto Kebudayaan), yang muncul untuk membendung makin besarnya kekuasaan Lekra dalam

81 Makalah., “*Pokok Ketiga: Gerakan Mahasiswa Indonesia,*” Op. Cit.

kehidupan kesusastraan dan kesenian. Kelompok ini mengecam “diktator intelektual” yang dilakukan Lekra.

Kelompok Lekra memiliki gagasan dan pandangan di bidang kesenian dengan pendekatan “*realisme kritis*” atau “*romantisme revolusioner*.” Mereka anti nilai-nilai kebudayaan yang non Indonesia. Mereka mengutuk *chaufinisme*, *fasisme* dan *kosmopolitisme*. Lekra mengecam keras prinsip “*seni untuk seni*.” Kelompok Manikebu menolak politik kebudayaan nasional yang sempit yang dicanangkan Soekarno dengan dukungan kuat dari Lekra. Mereka menghendaki keterbukaan Indonesia pada dunia Barat, terutama pada Amerika Serikat.

Kedua kelompok Lekra dan Manikebu masing-masing menanamkan juga pengaruhnya di dunia kampus, keberadaan dari kedua kelompok ini bagaimanapun juga telah semakin menyemarakkan atmosfir mendukung dan anti Soekarno. Polemik antara kedua kekuatan Lekra dan Manikebu berakhir ketika Soekarno atas permintaan PKI yang menuduh Manikebu dan BPS (Badan Pendukung Soekarnoisme) yang terdiri dari para penerbit surat kabar anti PKI telah dibiayai CIA, maka Manikebu dan BPS dilarang. Tapi beberapa hal yang perlu dikritisi dari fakta-fakta yang ada, terlepas dari apapun peranan CIA, tuduhan PKI memiliki landasan cukup faktual ketika pada tahun '60 sampai '65 itu sebagian dari intelektual Indonesia, menunjukkan sikap pro-barat dan anti komunis. Hal ini diperkuat dengan adanya hubungan yang erat antara beberapa perguruan tinggi di Indonesia dengan berbagai perguruan tinggi di Amerika.

Hubungan ini sudah berlangsung lama. Sepanjang tahun '50-an dan bahkan pada masa demokrasi terpimpin berbagai program kerjasama yang dibiayai oleh pemerintah Amerika atau oleh Ford Foundation dan Rockefeller Foundation telah memungkinkan banyak pengajar di

universitas-universitas Indonesia tinggal dan memperdalam ilmu mereka di Amerika Serikat. Dua lembaga universitas yang tercatat sebagai penerima utama bantuan adalah Universitas Indonesia (terutama Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ekonomi) dan Institut Teknologi Bandung (ITB). Tepatnya kedua lembaga ini pula yang memberikan paling banyak kader pada Angkatan '66 di samping menjadi pusat gerakan mahasiswa yang paling aktif.⁸²

Tapi beberapa hal fundamental yang perlu diingat bahwa gaung gagasan-gagasan anti komunis dan pro-Barat yang diterima pada mahasiswa itu tidak semata-mata datang lewat para pengajar. Bukan juga hanya karena menolak orientasi kebudayaan dan indoktrinasi yang dilakukan oleh rezim itu. Sesungguhnya, salah satu faktor utama dalam politisasi dan radikalisasi mahasiswa itu ialah adanya evolusi kondisi material dalam kehidupan kampus.

Bertambahnya jumlah mahasiswa dibarengi pula dengan begitu cepat memburuknya kondisi belajar dan prasarana perguruan tinggi. Lagipula, kesukaran-kesukaran ekonomi seperti kenaikan harga buku, transportasi, tarif pengobatan, sewa tempat tinggal, mahalnya uang kuliah, uang ujian dan juga makin meningkatnya ongkos hidup secara umum membawa pengaruh yang tak kecil bagi mahasiswa.⁸³ Sementara itu, keadaan ekonomi makin memburuk, sejak dikeluarkannya peraturan pergantian uang dari Rp. 1.000,00 menjadi Rp. 1.00. harga barang-barang bukannya turun melainkan semakin didorong ke atas, rakyat bertambah gelisah. Kenaikan harga seolah-olah memojokkan persoalan Gestapu - PKI. Generasi muda tidak dapat tinggal diam

82 Francois., Op. Cit., 11

83 Francois Raillon., *"Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia, Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974, Jakarta, Cet. II, 1985, hal. 11-12.*

begitu saja.⁸⁴ Kemunculan gerakan mahasiswa '66 semakin eksis setelah peristiwa kegagalan kudeta 30 September 1965 oleh PKI.

Revolusi ini mempertebal perasaan anti Soekarno di kalangan mahasiswa, karena gagasan-gagasan nasionalis presiden bertentangan dengan kenyataan disamping karena janji-janji kemerdekaan tidak ditepati. Selain itu kondisi mahasiswapun makin mirip dengan kondisi kehidupan rakyat pada umumnya, ... Dengan sendirinya para mahasiswa menjadi juru bicara rakyat. Guna memperbesar pengaruh dan cara bertindak, untuk menjalankan tugas baru, para mahasiswa tak membutuhkan waktu lama untuk tampil sebagai satu “generasi baru” atau “generasi pembaharuan.”⁸⁵

Pada tanggal 25 Oktober 1965, Mayor Jenderal Sjarif Thayeb, Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) mengumpulkan para tokoh berbagai organisasi mahasiswa nonkomunis di rumahnya. Thayeb mengusulkan untuk membentuk sebuah organisasi Indonesia yang dinamakan Komite Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Seluruh hadirin menyetujui usul Thayeb. Dan KAMI pun berdiri.

Tanpa tunggu waktu lama, KAMI menjadi motor utama dari kegiatan-kegiatan Angkatan '66 dan memainkan peranan pokok dalam arena politik selama dua tahun berikutnya. Di dalam tubuh KAMI terdapat dua jenis organisasi mahasiswa reformis: *Pertama*, organisasi-organisasi berdasarkan keagamaan, seperti HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik

84 Yozer Anwar., “*Angkatan 66, Sebuah Catatan Harian Mahasiswa*,” Penerbit Sinar Harapan, 1979, hal. 1.

85 Francois., Op. Cit., hal. 12.

Indonesia), GMKI (Gerakan mahasiswa Kristen Indonesia). *Kedua*, organisasi-organisasi non-agama, seperti SOMAL (Sekretariat Bersama Organisasi-Organisasi Mahasiswa Lokal), PELMASI (Pelopor Mahasiswa Sosialis Indonesia), GEMSOS (Gerakan Mahasiswa Sosialis), IPMI (Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia).

Sepanjang tahun 1966 KAMI melancarkan aksi-aksi dan demonstrasi yang mendapat dukungan dari masyarakat karena sifat mereka yang non-konformis dan tuntutan-tuntutan yang mereka bawakan. KAMI juga pandai menggunakan kekuatan para pelajar yang tergabung dalam organisasi mirip dengan KAMI yaitu Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia (KAPPI). Usia anggota-anggota KAPPI yang begitu muda, kepolosan mereka dan kesan bahwa mereka itu masih lemah merupakan kekuatan-kekuatan psikologis dan taktis yang mereka miliki untuk menguasai jalan-jalan di Ibukota.

Selain itu, secara diam-diam KAMI mendapat dukungan tentara yang selalu melindungi mereka dari serangan elemen-elemen tentara dan kekuatan politik yang memusuhi mereka, hal ini ditandai dengan dekatnya KAMI dengan beberapa tokoh militer yang dianggap berpandangan luas dan menjadi pahlawan di mata angkatan '66, seperti Jenderal Dharsono, Kemal Idris dan Sarwo Edhi.⁸⁶

Gerakan mahasiswa '66 telah mampu memainkan posisi strategisnya dalam merespon beberapa kondisi persoalan-persoalan pemerintah Orde Lama. Isu-isu yang diangkat oleh gerakan mahasiswa '66 adalah berkisar pada kondisi yang memang real dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat, terutama persoalan keterpurukan ekonomi dan ditambah dengan kudeta yang dilakukan oleh PKI, yang cenderung

86 Ridwan Saidi., *Op. Cit.*, hal. 77

dilegalkan atau dibiarkan oleh presiden Soekarno, sehingga memunculkan rasa ketidakpuasan rakyat dan khususnya mahasiswa. Pola pergerakan mahasiswa '66 memakai pola-pola non-konformis, dengan menggelar aksi-aksi demonstrasi turun jalan, aksi pemboikotan dan mogok kuliah.

Isu pokok yang menjadi tuntutan gerakan mahasiswa yang dipelopori oleh KAMI yang kemudian dikenal dengan Tri Tuntutan Rakyat atau disingkat TRITURA, berisi: 1. Bubarkan PKI, 2. Rombak kabinet dwikora, dan 3. Turunkan harga. Untuk memahami lebih jauh latar belakang persoalan tuntutan gerakan mahasiswa '66, bisa dilihat dari lagu dan yel-yel yang menjadi top hit para demonstran selama melakukan aksi, seperti lagu tentang “*Ganyang PKI*,” yang antara lain syairnya berbunyi:

“Hancurkan musuh kita PKI dan antek-anteknya.

Minggir-nyingkir pimpinan yang curang.

Kita tuntutan murah sandang pangan”

Kemudian lagu yang menyerang ketidakmampuan para menteri dan pimpinan negara

Dalam berita yudha tersebut kisah

Hadeli Hasibuan menghadap raja

Tiga bulan lamanya turunkan harga

Kalau tidak berhasil putuskan kepala

Sungguh jenaka hidup pimpinan kita

Tidurnya enak-enak di atas paha

Mereka sudah lupa Ampera

Yang dicetuskan sejak merdeka.

Atau

“Tek, kotek, kotek...”

Menteri ngobyek, rakyat tercekek,

Kotek, kotek, kotek ...

Menteri goblok disambar geledek

Kotek, kotek, kotek...

Menteri goblok tukang ngobyek.

Adapun yel-yel dalam aksi demonstrasi yang biasa dipakai untuk mengorbankan semangat perjuangan antara lain:

~ sekarang juga kami ke Pintu Kecil ~ Beras sudah 5000 rupiah seliter ~ Mana keadilan? ~ Turunkan harga beras sekarang ini ~ Pimpinan yang tidak becus mundur.

Yel-yel yang menyerang menteri:

“Siapa yang menaikkan harga?”

“Menteri”

“Siapa yang nggak pernah naik bis PPD?”

“Menteri”

“Siapa yang Ampera cuma di bibir?”

“Menteri”

“Siapa yang goblok”

“Menteri”⁸⁷

Tiga bulan di tahun 1966 merupakan saat yang menentukan baik dari segi politik maupun dari sudut bangkitnya generasi muda di bawah pimpinan KAMI. Peristiwa-peristiwa pada periode ini mempunyai 3 aspek. *Pertama*, memberikan nilai penting pada angkatan '66 diuji dan diakui. *Kedua*, membentuk suatu bingkai dimana angkatan '66 diuji dan diakui. *Ketiga*, Berfungsi sebagai suatu referensi pokok dalam arti bahwa gagasan-gagasan, aksi-aksi dan tingkah laku yang muncul pada waktu itu akan dijadikan

87 Yozar Anwar., Op. Cit., hal. 3-15.

model yang patut ditiru disamping sekaligus menampilkan gagasan-gagasan orisinil yang musti diketengahkan. Bila ada jiwa '45 maka adapula semangat '66.⁸⁸

Disamping sisi kepeloporan KAMI sebagai lokomotif penggerak aksi-aksi mahasiswa, yang cukup memusingkan penguasa, ada beberapa hal yang KAMI juga ternyata sarat dengan internal “*vested interest*.” Karena memang harus diakui bahwa komposisi keanggotaan KAMI banyak berasal dari “*onderbow*” partai-partai dan ormas-ormas di luar mahasiswa, dan sudah tentu secara aspek politis KAMI menjadi ajang pertarungan kekuatan antar beberapa kepentingan partai ataupun ormas-ormas yang ada, ini bisa dilihat sebagaimana yang disinyalir oleh Soe Hok Gie, bahwa Dalam Presidium KAMI Pusat yang berbicara bukanlah suara-suara mahasiswa yang jujur dari kampus-kampus. Tetapi suara-suara SOKSI (Pelmasi), NU (PMII), Muhammadiyah (IMM), Katolik (PMKRI), Parkindo (GMKI), almarhum PSI (GM Sos) dan lainnya. Semua partai yang ada, mulai dari Perti sampai dengan IPKI, terwakili dalam KAMI Pusat. Demikian pula ormas-ormas besar seperti Soksi, Muhammadiyah dan lain-lain.⁸⁹

Selama masih ada PKI-Soekarno, KAMI mudah mencari konsensus bersama dalam memformulasikan isu-isu dan pilihan gerakan. Tetapi setelah sasaran bersama hilang, daya pengikat juga hilang, disinilah kemudian kekuatan-kekuatan KAMI yang ada kemudian sarat dengan kepentingan induk organisasinya. Pada tahapan ini kekuatan KAMI mulai pecah dan terkotak-kotak, dan itu tidak hanya terjadi pada tubuh KAMI saja, tapi telah juga membawa implikasi tidak langsung

88 Francois., Op. Cit., hal. 15-16.

89 Soe Hok Gie., “*Zaman Peralihan*,” Penerbit Bentang Budaya, Yogyakarta, cet III, 1996, hal. 18-19.

bagi terjadinya pengkotakan baru di dunia mahasiswa. Dan perpecahan di dunia politik, melalui KAMI dibawa ke universitas, kepentingan kampus hampir tak terwakili oleh KAMI, KAMI mulai kehilangan basis masa kampus, mahasiswa-mahasiswa tidak melihat lagi kegunaan KAMI yang cuma mengurus politik-politik partai. Sebuah titik awal kematian peran vital KAMI sebagai sebuah gerakan mahasiswa.

Mencatat dari sejarah kemunculan gerakan mahasiswa '66 paling tidak ada dua faktor besar yang melatar belakangnya, yakni: *pertama*, ledakan jumlah mahasiswa Indonesia terutama pada tahun 1960-an yang menyebabkan menguatnya basis massa mahasiswa, dan yang *kedua* adalah kemunculan mereka tidak lepas dari kebuntuan elit Orde Lama dalam menyikapi perkembangan dan gejolak masyarakat. Kejenuhan dari membanjirnya “*air kata-kata*” penuh slogan, janji para elite politik ditengah memburuknya ekonomi, membuat mahasiswa turun ke jalan menentang pemerintah.

Angkatan '66 menyanggah dua sisi sejarah pergerakan: moral dan kepentingan. Dari sisi moral, penumbangan rezim menjadi tujuan. Disisi kepentingan, gerakan mahasiswa juga menjadi bagian dari rezim baru. Kelompok ini diantaranya dimotori beberapa aktivis KAMI. Usai kejatuhan Soekarno pemikiran dan aktivitas mahasiswa belum berkembang jauh, selain melalui parlemen. Tidak heran juga beberapa aktivis mahasiswa memilih jalur perjuangan dengan menjadi anggota legislatif.

BAB 6

GERAKAN MAHASISWA 70-AN, SAMPAI PERISTIWA “MALARI”

Sebagaimana sejarah munculnya gerakan mahasiswa '66, yang memang dituntut serta dikondisikan oleh kondisi sosial, politik dan kekuasaan, maka gerakan mahasiswa '70 pun muncul sebagai anti tesis terhadap persoalan yang dilihat oleh mahasiswa sebagai persoalan dimana mereka harus bicara dan bertindak.

Orde baru atau pemerintahan Soeharto yang terlahir dari peran aktif mahasiswa dan pada perodesasi awal pemerintahannya banyak melibatkan mantan aktivis mahasiswa '66. Akan tetapi dalam proses selanjutnya pemerintahan Orde Baru dilihat semakin menunjukkan gejala yang tidak sehat dalam menjalankan kekuasaan dan merumuskan kebijakan-kebijakan pembangunan.

Beberapa kasus yang menjadi latar belakang munculnya gerakan mahasiswa '70-an dan kemudian diikuti dengan meletusnya Malapetaka 15 Januari, yang kemudian dikenal

dengan singkatan MALARI adalah: *Pertama*, persoalan korupsi yang terjadi dalam tubuh pemerintahan Orde Baru. *Kedua*, masalah membanjirnya Penanaman Modal Asing dan pinjaman utang luar negeri Indonesia yang terus meningkat. *Ketiga*, disparitas pendapatan yang terlalu tajam (senjang) antara golongan kaya dan kelompok miskin. *Keempat*, refresifitas pemerintah Orde Baru terhadap kelompok-kelompok yang dianggap membahayakan kekuasaan dan penghambat pembangunan Orde Baru.

Awal pemicu terjadinya proses radikalisi gerakan mahasiswa pada awal 70-an, adalah ketika Ibu Tien Soeharto mengusulkan mendirikan suatu kompleks hiburan dan kebudayaan yang disebut Taman Mini Indonesia Indah (TMII), yang menelan biaya Rp. 10,5 milyar. Inisiatif dari Ibu Negara ini dilihat khusus oleh pihak mahasiswa sebagai hal yang tidak tepat, sebab selain bukan sebagai kebutuhan pokok, juga bertentangan dengan kepentingan negara karena biaya yang mahal dan tidak jelas cara memperoleh dananya. Bersamaan dengan itu Presiden baru saja giat meminta mengurangi pengeluaran yang tidak perlu dan mencurahkan seluruh usaha pada pembangunan.

Kasus TMII ini langsung direspon oleh mahasiswa dengan membentuk berbagai gerakan *ad-hoc* dengan nama-nama lucu seperti Gerakan Penghemat, Gerakan Akal Sehat (GAS) dan Gerakan Penyelamat Uang Rakyat, yang dilakukan terutama oleh mahasiswa Bandung dan Jakarta.

Suhu politik meningkat. Pemerintah memperkeras sikap mereka sehingga menimbulkan kritik yang lebih keras lagi dari mahasiswa. Kelompok-kelompok garis keras di kalangan pemerintah menggunakan kesempatan ini untuk memenangkan posisi mereka. Meningkatnya kritik tidak boleh ditolerir lebih lama dan situasi harus dikuasai dengan tegas oleh pemerintah.

Gerakan anti TMII dilarang. Penanggungjawab gerakan antara lain Arif Budiman dan H. J. Princen ditangkap. Beberapa koran ditutup selama beberapa hari, Menyusul dilakukannya pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan politik dan mengemukakan pendapat telah juga kemudian melahirkan reaksi keras dari beberapa kelompok yang tidak sepakat dengan kebijakan represif pemerintah Orde Baru.

Kasus kekurangan beras akibat buruknya pengelolaan Bulog dan penyelewengan-penyelewengan dalam lembaga ini telah juga menjadi sasaran baru oleh gerakan-gerakan protes yang menggemakan ketidakpuasan rakyat. Persoalan GNP yang dilihat tidak diikuti dengan pendapatan yang adil. Mahasiswa mencela munculnya jurang antara yang kaya dan rakyat kecil semakin tajam. Dipihak lain orang-orang kecil makin menderita karena harga meningkat lagi pada semester kedua tahun 1973 disamping makin dipersukarnya oleh pihak polisi dan pemerintahan. Peraturan-peraturan baru yang dibuat misalnya melarang pusat-pusat kota dipakai untuk berniaga oleh para pedagang kaki lima, semakin mempertegang beberapa persoalan yang ada.

Dalam konteks sosial yang tegang itu pecah kerusuhan anti Cina di Bandung pada tanggal 5 Agustus 1973, yang hanya dipicu oleh persoalan kecil dari terjadinya kecelakaan yang melibatkan orang dari etnis Cina, kemudian berakhir dengan terjadinya perusakan, pembakaran dan aksi kekerasan terhadap orang-orang Cina di Bandung.

Pada bulan Desember 1973, mahasiswa Jakarta dan Bandung melancarkan kritik terhadap cara pembangunan berlandaskan bantuan asing yang akhirnya pemerasan negara dan ketidakadilan sosial, karena orang-orang Jepang dan Cina bekerjasama dengan beberapa tokoh nasional “yang menjual Indonesia.” Pada tahapan ini respon gerakan

mahasiswa angkatan 70-an menghadapi tema baru, dan sudah tentu membutuhkan taktik yang baru pula. Sikap moderat yang selama ini menandai kritik-kritik mahasiswa sehingga konfrontasi langsung dengan Soeharto selalu dihindarkan, bahkan pada perkara TMII mulai ditinggalkan mahasiswa, atas dorongan Hariman Siregar (Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia), Sjahrir dan pemimpin generasi muda lainnya. Apalagi kini mahasiswa tidak menganggap diri mereka sebagai suatu kekuatan moral “*avan-garde*” rakyat seperti yang mereka nyatakan dulu.

Sejak beberapa waktu para mahasiswa menyatakan diri sebagai kekuatan politik yang ingin secara langsung bekerjasama dengan rakyat seperti ditahun 1966. Demonstrasi-demonstrasi yang awalnya berlangsung di bawah pimpinan bersama Bandung dan Jakarta meledak diseluruh Indonesia. Berlainan dengan tahun-tahun sebelumnya kali ini kota Medan, Padang, Yogyakarta, Surabaya, Makasar dan lain-lain tersentuh oleh gerakan itu.⁹⁰

Aksi demonstrasi terhadap persoalan penanaman modal asing dimulai ketika kedatangan Menteri Kerjasama Belanda, Pronk, ke Jakarta sebagai ketua IGGI, badan yang mengatur bantuan internasional pada Indonesia. Kedatangan Pronk disambut dengan sikap anti modal asing oleh mahasiswa, dengan menggelar aksi demonstrasi pada tanggal 11 November 1973.

Sepanjang bulan November dan Desember berlangsunglah serentetan demonstrasi dengan pernyataan anti modal asing dan anti para Asisten Pribadi Presiden (ASPRI). Para mahasiswa di Bandung juga bergerak. Sebuah delegasi ITB datang ke BAPPENAS dan menuntut “agar

90 Francois., *Op. Cit.*, hal. 104.

permainan kotor modal asing jangan diteruskan.” Tiga Dewan Mahasiswa (ITB, Unpad, Unpar) berdemonstrasi di depan Kedutaan Besar Jepang dan mengutuk kerjasama modal Jepang dan para “*Dukun Indonesia*.” Akumulasi dari ketegangan terhadap penentangan mahasiswa terhadap modal asing ini kemudian meletus pada saat kedatangan Perdana Menteri Jepang, Tanaka, yang dijadwalkan akan datang pada 15 Januari 1974.

Dalam suasana semacam itu keadaan bukan semakin tenang. Para mahasiswa melanjutkan gerakan bahkan melipatgandakan. Tanggal 14 Januari mereka berdemonstrasi di lapangan terbang Halim Perdanakusuma sebagai protes terhadap rencana kedatangan Tanaka. Para mahasiswa tidak memperdulikan peringatan-peringatan dari Laksamana Sudomo dan menteri pertahanan M. Panggabean.

“*Kontak*” antara para demonstran dengan tamu dari Jepang itu tidak terjadi. Karenanya, frustrasi dan suhu politik meningkat. Akhirnya pada tanggal 15 Januari pecah huru-hara sosial yang dikenal sebagai Malapetaka 15 Januari (MALARI). Perusakan berlangsung terhadap toko-toko dan pembakaran terhadap mobil-mobil Jepang. Peristiwa MALARI menelan korban 9 orang mati, 23 luka-luka. Kedutaan Jepang, salah satu sasaran demonstran tidaklah tersentuh. Sebaliknya, seluruh pusat perdagangan Senin dan banyak kendaraan dibakar. Berbagai bangunan milik Jepang maupun bangunan lainnya rusak berat.⁹¹

Gerakan mahasiswa '70-an sampai dengan meletusnya peristiwa MALARI memperlihatkan kembali pola yang sama dengan gerakan mahasiswa '66 yang menggunakan cara ekstra-parlemeter (baca: aksi turun jalan) dalam

91 Francois., Op. Cit., hal. 112-113.

menyuarakan isu-isu dan tuntutan. Dalam hal perumusan isu dan tuntutan gerakan mahasiswa '70-an masih terkesan ada upaya meromantisir apa yang telah dilakukan oleh gerakan mahasiswa '66, sekalipun substansi persoalan yang dihadapi relatif berbeda, akan tetapi kemasan dan tuntutan sebagaimana terlihat pada momentum tanggal 15 Januari, ketika mahasiswa berkumpul sebelum melakukan aksi turun jalan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di jalan Salemba, mengingatkan pada Tritura 10 Januari 1966 disusun. Tuntutannya sama diistilahkan dengan Tritura, isinya ialah: 1. Bubarkan ASPRI, 2. Turunkan harga, 3. Ganyang korupsi.

Meletusnya peristiwa MALARI merupakan akumulasi dari beberapa hal yang dilihat oleh mahasiswa sebagai hal yang tidak sehat dilakukan oleh rezim Orde Baru, diantaranya: 1. Persoalan korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara, 2. Besarnya pinjaman luar negeri Indonesia, dan yang ke 3. Penanaman Modal Asing (PMA) yang melanda Indonesia.

Pasca peristiwa MALARI '74 ini kemudian pemerintah melakukan upaya penangkapan-penangkapan, disamping adanya pembreidelan beberapa penerbitan pers. Persoalan yang paling tragis dialami oleh mahasiswa pasca peristiwa MALARI, adalah terciptanya implikasi politik represif negara dalam hal ini pemerintah Orde Baru terhadap setiap kegiatan-kegiatan mahasiswa yang dilihat mengancam stabilitas keamanan dan mengganggu kebijakan pembangunan ekonomi kapitalistik rente Orde Baru dan juga mengancam kekuasaan rezim Soeharto.

Organisasi Dewan Mahasiswa (DEMA) yang ditengarai sebagai dalang kegiatan-kegiatan aksi demonstrasi dibubarkan. Pada fase ini tingkat represifitas aparat negara terhadap

gerakan-gerakan mahasiswa semakin keras dan masif, dengan dikeluarkan dan diberlakukannya konsep NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/ Badan koordinasi Kampus). Konsep NKK/BKK ini memang dipersiapkan untuk melakukan regulasi dan kontrol langsung penguasa negara (pemerintah), melalui birokrasi kampus terhadap semua aktifitas mahasiswa. Dan konsep NKK/BKK ini ternyata begitu efektif menekan potensi-potensi pergolakan mahasiswa yang memang berbasis massa di kampus.

Pada medio diberlakukannya konsep NKK/BKK inilah kemudian mahasiswa mencari beberapa format perlawanan dengan melalui beberapa saluran, seperti membentuk kelompok-kelompok diskusi, membuat pers kampus dan beberapa kegiatan lain yang itu tidak bersentuhan langsung dengan hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan negara.

Salah satu format gerakan perlawanan mahasiswa terhadap hegemonisasi kekuasaan rezim Orde Baru melalui kehidupan kampus, dijawab oleh mahasiswa yang memang melihat sempitnya ruang bagi upaya membangun perlawanan dan kontrol terhadap kekuasaan dengan melakukan upaya aliansi dan bergabung dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Hal ini dilakukan oleh mahasiswa 70-an akhir dan pertengahan '80-an. LSM mulai muncul sebagai alternatif baru sistem pengkaderan bangsa pada dekade awal 1970.

Pada saat kehidupan mahasiswa yang penuh beban psikologis seperti itu, pemerintah begitu kentara sarat menerapkan kebijakan "*Security Approach.*" Selain itu, kebijakan tersebut merupakan tekanan yuridis yang sulit ditembus mahasiswa sejak pasca MALARI. Akan tetapi tingginya tingkat represifitas negara tidak juga sepenuhnya menjadikan mahasiswa berhenti berkreasi mencari beberapa format gerakan, sekalipun ada kesan sepertinya gerakan mahasiswa lesu "*kurang darah,*" dan tidak bergairah.

Dalam perjalanan sejarah selanjutnya, mahasiswa dalam menyalurkan aspirasinya rupanya pelan-pelan mulai diberi kesempatan berinisiatif agar menumbuh kembangkan berbagai macam kegiatan-kegiatan. Perjuangan berat untuk dapat melepaskan diri dari belenggu kekuasaan supra struktur itu, rupanya ditempuh melalui beberapa cara. Antara lain membentuk grup-grup diskusi di kampus, pagelaran kesenian (khususnya teater) yang banyak memberikan sindirian terhadap situasi kehidupan sosial politik saat itu, pembacaan puisi yang kebanyakan mengubah ekspresi kritik sosial, menjamurnya 'folk song' (musik rakyat) yang dipentaskan dalam acara kemahasiswaan yang kebanyakan mengubah lirik lagu-lagu disesuaikan dengan tuntutan-tuntutan perubahan keadaan yang semakin mencekam, tidak ketinggalan pula banyak terbentuk grup paduan suara yang memberikan dorongan semangat perjuangan disajikan pada acara-acara kemahasiswaan dan yang terlebih penting dan sangat menonjol perkembangannya adalah kehidupan pers kampus sebagai sarana komunikasi antar mahasiswa atau antar kampus se Indonesia, baik berupa penerbitan berkala, maupun terbatas dalam bentuk pers dinding yang dikelola hampir disetiap kampus-kampus di Indonesia tumbuh subur pada masa itu.⁹²

Dari varian-varian format gerakan mahasiswa di atas yang sarat dengan kegiatan muatan lokal kampus, sekalipun kecil dan sepertinya kurang darah, tapi bagaimanapun masih memberikan kontribusi bagi terjaganya stamina idealisme mahasiswa dibawah represifitas dan hegemonisasi kekuasaan Orde Baru. Berbeda dengan gerakan mahasiswa '66, gerakan mahasiswa 70-an hingga 90-an telah terlepas

92 Hariyadhie., "*Perspektif Gerakan Mahasiswa 1978 Dalam Percaturan Politik Nasional*," PT.. Golden Terayon press, Jakarta, Cet. I, 1994.

dari partnership dengan elit TNI. Sudah tentu gerakan mahasiswa semakin memiliki tantangan yang semakin berat karena harus juga berhadapan secara diametral dengan kekuatan-kekuatan aparat yang bersenjata, dan tidak jarang menggunakan pendekatan *security approach* (penggunaan kekerasan bersenjata) dalam meredam gejolak yang ditimbulkan oleh mahasiswa. Beberapa kejadian di tahun '77-78, tindakan anarkis pihak Militer begitu kantara dipertunjukkan dalam bentuk-bentuk penyerangan dan penguasaan kampus, sebagaimana yang menimpa kampus ITB dan Universitas Gadjah Mada.

Kesadaran baru gerakan mahasiswa selama menjalani masa-masa represif dari rezim Orde Baru mulai terbangun. Bersamaan dengan semakin berkurangnya legitimasi pemerintah terhadap dukungan rakyat, generasi mahasiswa 90-an semakin menyadari beberapa kelemahan gerakan mahasiswa 80-an yang banyak melakukan gerakan dengan meninggalkan kampus dan langsung terjun ke rakyat, sehingga tanpa disadari kampus sebagai basis massa mahasiswa kehilangan orientasi politiknya. Kesadaran baru untuk "*back to campus*" guna membangun kekuatan basis ini kemudian menghantarkan gerakan mahasiswa 90-an. Tepatnya gerakan mahasiswa 98 mampu menciptakan sebuah gerakan yang spektakuler dalam menumbangkan rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama kurang lebih 32 tahun.

BAB 7

RADIKALISASI GERAKAN MAHASISWA '98

Gerakan mahasiswa 98 menjadi suatu fenomena gerakan sosial yang spektakuler dalam masa sejarah Indonesia. Ini berarti gerakan-gerakan yang coba dibangun oleh anasir-anasir perubahan sebenarnya sudah sering kali dilakukan, dari sejak awal 70 s.d 90an awal, tapi pengalaman-pengalaman sebelumnya menunjukkan kuat dan terkonsolidasinya rezim Orde Baru yang ditopang oleh tiga kekuatan inti yakni, Golongan Karya (GOLKAR), Birokrasi dan Militer, selalu berhasil membangun dan melokalisir gejala-gejala gerak perubahan sosial menjadi letupan-letupan kecil yang teralienasi dari cita-cita pembebasan nasional rakyat Indonesia.

Gerakan mahasiswa '98 muncul bersamaan dengan akumulasi kekecewaan rakyat terhadap pemerintah Orde Baru dan terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan beberapa negara di Asia lainnya.

Berawal dari krisis moneter di Asia pada pertengahan tahun 1997, luapan kekecewaan rakyat yang sudah terakumulasi selama puluhan tahun semakin memuncak dengan semakin memburuknya kondisi perekonomian nasional yang berpengaruh mendalam terhadap pemenuhan kebutuhan subsistem masyarakat luas.

Kebangkrutan yang dialami oleh rejim Orde Baru yang disebabkan oleh krisis moneter kemudian memaksanya menyambung nasib dengan menandatangani *Letter of Intent* (LoI) dengan lembaga imperialis IMF pada tanggal 15 Januari 1998: sebuah pernyataan takluk dari seorang diktator kepala batu Soeharto kepada perompak kapitalis asing.⁹³

Menjadi suatu pukulan keras bagi publik dimana konsekwensi dari kesepakatan yang ada utamanya adalah pencabutan subsidi atas listrik dan BBM. Pengumuman pemerintah 4 Mei 1998 tentang kenaikan tariff listrik dan BBM sebagai rekomendasi IMF untuk meniadakan subsidi bagi kedua komoditas tersebut selanjutnya menjadi barometer dimulainya gejolak sosial yang meluas di kalangan rakyat yang kemudian direspon oleh kalangan kampus (baca: mahasiswa). Mahasiswa Indonesia kembali memperoleh ruang untuk mendinamisir gerakan dan mendorongnya lebih maju dengan memanfaatkan akumulasi kekecewaan massa-rakyat terhadap kebijakan rejim yang dinilai semakin menambah kesengsaraan. Analisis atas konstelasi politik dimana kondisi negara melemah dan rakyat memiliki momentum/ peluang untuk menghimpun kekuatan melapangkan jalan untuk membangun sentimen kesadaran tentang Rezim Orba

93 Yudas Ermadi., "*Menuju Reformasi Total: Perspektif Gerakan Mahasiswa Sumatera*," Makalah disampaikan sebagai materi pada Lokakarya Nasional Gerakan Mahasiswa Indonesia-Jerman, 14 s.d 16 September 1999 di Yogyakarta.

sebagai representasi negara yang menindas dan rakyat kebanyakan yang selalu ditindas dan dirugikan.

Entry point bagi kondisi seperti ini dengan mengedepankan isu-isu populis tentang protes terhadap kenaikan tariff listrik dan BBM serta keterpurukan perekonomian rakyat disebabkan oleh kenaikan harga-harga dan anjloknya nilai rupiah, mengalirkan simpati terhadap gerakan mahasiswa yang kembali bangkit yang kian massif dan mengeskalasi secara nasional. Keresahan masyarakat akibat melangitnya harga-harga sembako dan ancaman putus kuliah serta masa depan yang suram sebagai faktor intern penggerak dikalangan mahasiswa, pada Februari 1998 berdampak makin meningkatnya kuantitas aksi demonstrasi tidak saja di kota-kota “*tradisional*” gerakan mahasiswa semacam Bandung, Solo, Jakarta dan Yogyakarta tetapi juga mulai berjangkit di berbagai daerah luar Jawa.

Belajar dari keberhasilan gerakan mahasiswa baik nasional maupun internasional, gerakan mahasiswa '98 menyadari betul bahwa kekuatan sentry vugal sebuah gerakan dalam mendobrak kekuasaan sebuah rezim yang otoriter, hegemonic dan fasis tidaklah cukup hanya dengan mengandalkan kekuatan sektor mahasiswa semata, yang sangat terbatas wilayah dan basis massa kampus, terlebih lagi ketikga gerakan mahasiswa '90-an harus berhadapan dengan kekuatan rezim untouchable Soeharto yang telah mampu membonsai potensi kekuatan-kekuatan rakyat selama 32 tahun masa berkuasanya, dengan tiga pilar kekuatan pendukungnya, yakni: kekuatan bersenjata (TNI), kekuatan politik (GOLKAR), dan kekuatan regulasi (Birokrasi), dan ditambah dengan kekuatan modal para konglomerat yang memang dibesarkan oleh Soeharto (Soeharto croni). Kesadaran ini menghantarkan gerakan mahasiswa untuk

mencoba mengemas isu-isu populis (kerakyatan) dan membangun aliansi-aliansi dengan kekuatan-kekuatan sektor rakyat lainnya.

Peristiwa penembakan mahasiswa Tri Sakti 13 Mei 1998, menjadi martir pendorong gerakan mahasiswa di seluruh Indonesia yang sudah ada, meningkat menjadi lebih maju dalam kualitas isu yang dikonsentrasikan untuk penekanan opini bagi tuntutan diturunkannya Soeharto dan pengagendaaan segera Sidang Istimewa (SI) MPR guna pertanggungjawaban masa pemerintahannya yang bengis dan otoriter.

Ditingkatkan aksi, peristiwa tersebut membangkitkan secara serempak sikap solidaritas atas gugurnya empat orang "*Pahlawan Reformasi*." Lanutan dari paruh pertama bulan Mei sampai dengan menjelang waktu turunya Soeharto, 21 Mei 1998, adalah masa dimana momen-momen aksi mahasiswa di seluruh Indonesia sudah demikian tereskalasi, massif, dan melibatkan ribuan demonstran di hampir tiap kota. Puncak gerakan aksi massa mahasiswa mencapai titiknya yang tertinggi ketika memasuki peringatan hari besar nasional "*Hardiknas*," 20 Mei 1998, belasan ribu massa tumpah ruah berdemonstrasi di jalanan mengumandangkan spectrum tuntutan yang terkonsentrasi pada satu focus: "*turunkan Soeharto*."

Pola pergerakan mahasiswa '98 masih dominan mengandalkan aksi-aksi demonstrasi turun jalan dalam melakukan tuntutan dan kampanye itu terhadap massa rakyat, sehingga rakyat yang memang merasakan langsung bagaimana penyimpangan dan penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru pada saat-saat akhir turunya Soeharto bersama dengan massa mahasiswa turun memenuhi jalan-jalan, mendesak Soeharto segera turun dari

kekuasaannya pada kondisi sosial, politik dan kekuasaan Orde Baru dibawah rezim Soeharto inilah segenap elemen mahasiswa dan sektor rakyat lainnya menemukan consensus bersama terhadap apa yang dinamakan “*common enemy*” (*musuh bersama*).

Adapun beberapa tuntutan yang sering diangkat oleh mahasiswa dalam setiap aksi, adalah persoalan yang berkisar pada beberapa persoalan yang muncul dari akumulasi kekuasaan Orde Baru, seperti:

1. Protes Kenaikan BBM dan Krisis Ekonomi
2. Reformasi Ekonomi dan Politik Secara menyeluruh
3. Pencabutan Paket 5 UU Politik

Isu-isu dikampanyekan pasca turunnya Soeharto:

1. Penabatan Dwi Fungsi ABRI
2. Pengadilan Soeharto dan kroni-kroninya
3. Tanah Untuk Kaum Tani
4. Upah Buruh Yang Layak dan Manusiawi
5. Pendidikan Murah Untuk Rakyat.

Akbar Tanjung Abyoso⁹⁴ mencatat, gerakan mahasiswa pada tahun 1998 merupakan gerakan terbesar sepanjang orde baru. Orientasinya gerakan mahasiswa pada tahun 1998 mengenai KKN (Kolusi, Korupsi, Nepotisme) sehingga disebut dengan perjuangan reformasi. Bentuk dari gerakan mahasiswa pada tahun 1998 adalah melakukan diskusi serta demonstrasi terhadap pemerintahan yang berkuasa, hingga akhir dari gerakan mahasiswa pada tahun 1998 ketika berkumpulnya berbagai elemen mahasiswa dari perguruan tinggi di Indonesia dengan cara ”menduduki” gedung DPR/MPR pada bulan

94 Bentuk-bentuk Gerakan Mahasiswa Pada Tahun 1966 sampai dengan 1998: abstrak skripsi, tanpa tahun.

Mei 1998, yang menghasilkan turunya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan.

Pasca turunnya Soeharto, yang kemudian diganti oleh Wakil Presiden Habibie telah menciptakan suatu kondisi euforia pada segenap aspek kehidupan masyarakat. Kondisi euforia pada segenap sektor dan bidang kehidupan ini menjadi batu ujian tersendiri bagi gerakan mahasiswa '98, ketika disatu sisi tuntutan untuk menuntaskan agenda reformasi terhadap sisa-sisa Orde Baru dan sisi fenomena euforia masyarakat pasca turunnya Soeharto, yang tidak jarang melahirkan kerusuhan-kerusuhan dan tindakan anarkisme massa, sebagai buah akumulasi penindasan Orde baru.

Ujian bagi konsistensi gerakan mahasiswa '98 bagaimanapun secara umum harus diakui pasca turunnya rezim Soeharto, terjadi penurunan kualitas yang cukup signifikan, ketika mahasiswa "*back to campus*" dan harus puas dengan pemerintahan transisi Habibie dengan agenda "Sidang Istimewa" MPR Nopember 1998, yang kemudian terbukti tidak menyentuh esensi perjuang reformasi yang didorong dan diteriakkan oleh gerakan mahasiswa, yakni agenda pertanggungjawaban dan pengadilan yang setimpal terhadap Soeharto, dan justru pada dimensi yang lain menciptakan polarisasi gerakan mahasiswa kedalam dua kutub yang saling berseberangan antara yang mendukung dan menolak SI MPR.

Proses peredupan stamina gerakan mahasiswa '98 terus terjadi sampai dengan terpilihnya pemerintahan Gus Dur, hal ini telah juga menunjukkan bahwa kesiapan infrastruktur gerakan mahasiswa '98 masih sangat rentan dan cenderung reaksioner. Fenomena gerakan mahasiswa '98 ini, umumnya masih menunjukkan kecenderungan pada suatu kondisi yang berhenti pada pola "*student protes*" sebagai lawan dari

“*student movemen*” dengan karakteristik gerakan yang sifatnya kondisional, tidak terorganisir dengan baik dan basis massa mahasiswa yang cepas puas, karena pengaruh pendidikan politik yang tidak massif di tingkat kampus.

Isu-isu demiliterisasi, adili Soeharto dan beberapa isu lainnya, secara khusus memang masih terus dituntut oleh beberapa kekuatan kelompok gerakan mahasiswa '98, akan tetapi eskalasi tuntutan isu ini masih berputar pada kekuatan-kekuatan kecil kelompok gerakan mahasiswa yang masih konsisten terhadap agenda awal bergulirnya reformasi, dan ini kebanyakan hanya dilakukan oleh kelompok-kelompok organisasi semi legal atau ekstra kampus (meminjam istilah yang biasa digunakan), untuk membedakan dengan organisasi legal atau intra kampus (yang bernaung dalam sistem birokrasi kampus), seperti Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dll.

Nampaknya cita-cita reformasi bagi umumnya gerakan mahasiswa '98 hanya berhenti pada keberhasilan menurunkan Soeharto, sehingga gerakan yang sudah dibangun sebelumnya, dalam bentuk-bentuk kesatuan aksi, komite, front dll, di awal-awal bergulirnya reformasi sebagaimana munculnya jamur dimusim hujan itu dianggap sebagai sebuah final gerakan mahasiswa '98, selain itu mahasiswa kembali keruang-ruang kuliah dan sibuk dengan beban Sistem Kredit Semester (SKS) yang harus ditempuh, sekalipun pada pemerintahan transisi Habibie masiha da beberapa aksi-aksi mahasiswa yang menyuarakan tuntutan reformasi total sampai dengan terpilihnya pemerintahan yang baru (Gus Dur), melalui PEMILU pada tanggal 7 Juni 1999.

Akhir Gerakan mahasiswa '98 yang fenomenal adalah ketika mahasiswa '98 merumuskan 6 agenda reformasi total yang terdiri dari:

1. Penghapusan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
2. Adili Soeharto dan kroni-kroninya
3. Cabut Dwifungsi ABRI (TNI/Polri)
4. Penegakan Supermasi Hukum
5. Amandemen Konstitusi
6. Otonomi Daerah

Dan nampaknya bahwa apa yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa '98 yang mencoba mengusung tuntutan reformasi total sampai dengan terjadinya pergantian kekuasaan dari pemerintahan Habibi ke pemerintahan Gus Dur belum memperlihatkan terjadinya sebuah perubahan, tapi bahkan fenomena terkini yang muncul adalah bagaimana polarasi kekuatan-kekuatan gerakan mahasiswa dalam polemic antara pro dan kontra anti Gus Dur terus terjadi (DPR Vs Eksekutif).

Kegagalan gerakan mahasiswa dan elemen pro-demokrasi lainnya dalam mewujudkan reformasi total di Indonesia diidentifikasi oleh Budiman Sujatmiko sebagai indikasi bahwa masih bercokolnya sisa-sisa kekuatan lama di dalam proses terjadinya reformasi total, ditegaskan oleh Budiman Sujatmiko dengan melakukan perbandingan sejarah dengan revolusi Prancis, bahwa kekuatan yang menggulirkan perubahan tanpa kenal ampun menghancurkan kekuatan Louis XVI. Begitu juga dengan revolusi Rusia, membat habis kekuatan Tzar yang jelas-jelas otoriter sampai tidak ada sama sekali. Castro juga memukul hancur kekuatan Batista dan revolusi Spanyol memukul hancur fasisme.⁹⁵

Hal yang sama juga dicontohkan oleh Budiman Sujatmiko terhadap kegagalan Komune Paris (1817) dimana kekuatan

95 Budiman Sujatmiko, *Pembubaran Parlemen, Lapangan Reformasi Total*" dalam kolom artikel SKH Komnas, Sabtu, 24 Februari 2001.

democrat sejati yang telah menjalankan kekautan separus dari “revolusi” akhirnya hancur kembali karena melakukan kompromi politik dengan sisa-sisa lama. Begitu juga dengan Allende (1974) yang sudah memulai proyek “*populisme*” di Cile, akhirnya digulingkan Pinochet, karena ia membiarkan militer berkeliaran bebas. Belajar dari keberhasilan dan kegagalan dalam menyelesaikan transisi demokrasi dari beberapa negara di atas, nampaknya Indonesia berada pada kecenderungan sejarah kegagalan beberapa negara di atas, yang diindikasikan dengan bagaimana kekuatan “*reformis*” tidak menghancurkan sisa-sisa kediktatoran Orde Baru. Dan bahkan ada kecenderungan kekuatan reformis bahkan melakukan kompromi dan kadang bersekutu.

Bagaimana dengan kekuatan gerakan mahasiswa, ketika realitas politik dalam pemerintahan Gus Dur masih menunjukkan dominasi dari kekuatan-kekuatan lama (Orde Baru), seperti Golkar dan TNI. Kekuatan Golkar baik melalui lembaga Eksekutif ataupun Legislatif masih menunjukkan kekuatan yang cukup dominan, keberadaan TNI dengan Dwi Fungsinya sampai saat ini belum memperlihatkan perubahan yang signifikan dalam penyelesaian agenda transisi demokratik. Gerakan-gerakan mahasiswa yang muncul belakang ini selalu ditangkap sebagai bagian dari pro dan anti Gus Dur, polarisasi gerakan mahasiswa 2000-2001, seperti yang dipertunjukkan oleh kekuatan-kekuatan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia (BEMI), Famred, Forkot, LMND, KAMI, Alfonso, dan kekuatan gerakan mahasiswa untuk menunjukkan semakin krisisnya kekuatan gerakan mahasiswa untuk diharapkan sebagai salah satu kekuatan yang mampu menuntaskan agenda transisi demokratik sebagai bagian dari reformasi total, semakin jauh dari harapan.

Pertanyaannya adalah berkaitan dengan persoalan polarisasi gerakan mahasiswa di atas adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Budiman Sujatmiko di atas, apakah sudah sepatutnya segenap elemen gerakan mahasiswa dan kekuatan rakyat mulai menginventarisir kembali anasir-anasir kekuatan lama Orde baru disegenap level kekuasaan negara dan partai politik untuk kemudian dihancurkan, atau bahkan menuntut terjadinya pembubaran parlemen karena diindikasikan sebagai salah satu alat yang efektif digunakan oleh kekuatan lama, kemudian melakukan PEMILU ulang menjadi anggota-anggota besar gerakan mahasiswa yang mungkin akan penuh dengan perdebatan dan tarik menarik kepentingan dari kekuatan-kekuatan di tubuh gerakan mahasiswa itu sendiri. Gerak sejarah saat ini semakin mempertanyakan keberadaan gerakan mahasiswa, apakah ia mampu menjawab tantangan sejarah saat ini, atau ia akan larut dalam putaran sejarah, menjadi tantangan gerakan mahasiswa untuk menjawabnya.

BAB 8

POLA GERAKAN MAHASISWA 1998 DARI AKSI ELITISME KE POPULISME

Sejarawan Taufik Abdullah mengemukakan bahwa, setiap generasi memiliki sejarahnya masing-masing, dan paralelisme dalam sejarah pada dasarnya ada batasnya. Selagi kesejajaran itu hanyalah berkisar pada pencarian suasana hati dan sumber-sumber kekuatan sosial-ekonomis, maka ia masih bisa dipertanggungjawabkan. Ia merupakan suatu sindrom dari generasi muda sekarang.

Apa yang ditampilkan gerakan mahasiswa memasuki dekade 90-an menunjukkan gejala itu. Belajar dari gerakan-gerakan yang berlangsung sebelumnya, generasi kritis 90-an memiliki karakter yang berbeda.

Eksperimentasi politik Orde Baru untuk memisahkan mahasiswa dengan rakyat secara eksklusif terbukti gagal memperoleh pengakuan sosiologis dari rakyat itu sendiri.

Pada titik itulah kelemahan gerakan mahasiswa itu terasa, dimana dengan model-model penguatan di dalam dirinya tidak jarang hanya mampu memproduksi gerakan-gerakan sporadis. Karenanya mudah diberangus dan dipatahkan, sebagaimana generasi terdahulu.

Dilandasi oleh asumsi dan keyakinan bahwa gerakan mustahil dapat mewujudkan perubahan seperti yang berlangsung di Filipina, Korea Selatan, dan Negara-negara lainnya, maka untuk mampu mendorong perubahan politik perlu kerjasama dengan massa rakyat yang menjadi "*pemukulnya*." Dengan demikian gerakan mahasiswa tidak lagi memitoskan dirinya sebagai satu-satunya oposisi efektif dan mampu melakukan perubahan dengan sendirian, namun justru koalisi dengan rakyat kebanyakan menjadi pilihan utama.

Dilandasi keyakinan itulah, aliansi dengan rakyat menjadi alternatif signifikan. Sejarah memang membuktikan bahwa, bukan kelompok mahasiswa yang bereaksi sampai akhirnya terlaksana gerakan revolusioner, namun mereka adalah katalisator yang penting dalam aksi yang bersifat politis.

Penjara besar Orde Baru yang memenjarakan kesadaran mahasiswa, ternyata tidak berhasil mengalienasi mereka, namun hanyalah dengan diistilahkan Kleden (1999) mengkarantina mahasiswa. Jika fase sebelumnya gerakan mahasiswa berlangsung dengan tanpa perlawanan yang memadai, geliat diakhir 80-an dan awal 90-an mulai terasa. Dekade akhir 1980-an dan diawal 90-an ditandai dengan model-model gerakan yang populis, dengan mengangkat isu-isu di lintasan struktur marginal. Misalnya saja, merujuk pada studi yang dilakukan oleh Edward Aspinall (1993) ditunjukkan bahwa tidak kurang 155 demonstrasi mahasiswa

yang terjadi selama periode 1987 – 1990. Pada fase 1989-1990 kota Yogyakarta, Bandung dan Jakarta marak dengan aksi protes mahasiswa terutama mengangkat isu-isu penggusuran tanah dan kekerasan militer. Mahasiswa Bandung memprotes penggusuran tanah Badega, Cimacan, sedangkan di Yogyakarta dan Jawa Tengah mahasiswa membela masyarakat korban waduk Kedungombo.⁹⁶

Upaya mengangkat isu-isu populis ini gerakan mahasiswa era 90-98-an sebagai sebuah evaluasi terhadap beberapa kegagalan gerakan mahasiswa terdahulu yang cenderung elit dan tidak memiliki basis massa, sehingga mudah dipatahkan dan diredam oleh kekuatan penguasa Orde Baru ini menjadikan mahasiswa mulai menggarap isu-isu yang tidak terbatas pada persoalan kampus, walaupun mahasiswa tetap menyadari bahwa basis massa adalah masyarakat kampus, dengan tetap juga berupaya membangun aliansi dengan kekuatan-kekuatan politik lainnya, yang diharapkan sebagai sebuah kekuatan integral perlawanan rakyat, pola gerakan populisme yang dilakukan oleh mahasiswa ini untuk mewujudkan bahwa perjuangan elitis selama ini telah menjebak mahasiswa terhadap apa yang diistilahkan oleh Magenda sebagai “*pelopor tanpa pengikut.*”

Dekonstruksi wacana elitis yang mengandalkan mahasiswa sebagai *agent of change*, *agent of modernization*, *agen of development* atau bahkan sebagai pejuang pembebas rakyat yang cenderung menjadikan mahasiswa maupun dengan statusnya dan arogan-elitis dalam membangun gerakan menjadi persoalan yang harus disingkirkan ketika

96 Arie Sujito., “*Dari Elitisme Menuju Populisme: pilihan Strategis Gerakan Mahasiswa Indonesia Era '90-98.*” Dalam Epilog Arbi Sani “*Pergolakan Melawan Kekuasaan Gerakan Mahasiswa Antara Aksi dan Politik,*” Pustaka Pelajar dan Insist Press, Yogyakarta, 1999, hal. 177-178.

gerakan mahasiswa masih membutuhkan dukungan massa rakyat lainnya. Dan harus diakui dalam proses politik yang dilakukan Orde Baru dalam membangun hegemonisasi kekuasaannya bahwa sektor mahasiswa tidak lebih baik nasibnya dibandingkan dengan sektor buruh, tani, nelayan, kaum miskin kota dan sektor rakyat lainnya dihadapan kekuasaan otoriter-militeristik dan fasis Orde Baru.

Mengacu pada beberapa gerakan mahasiswa yang terjadi di beberapa Negara Amerika Latin, memang harus diakui bahwa kekuatan mahasiswa membutuhkan rumusan pola gerakan yang populis dan egalitarian dengan kekuatan sektor rakyat lainnya kalau ingin sukses dalam membangun perlawanan. Sejarah Bolivia, ketika mahasiswa pada bulan Oktober 1964 mengobarkan perlawanan terhadap pemerintahan Paz Estensoro di Cochabamba, kota kedua di Bolivia, mahasiswa membangun aliansi dengan kekuatan buruh. Kemudian sejarah Peru dimana mahasiswa memainkan peran yang penting dalam perjuangan petani di Peru pada tahun 1965, dalam mengambil alih tanah untuk petani, begitu juga dengan gerakan mahasiswa di Venezuela ketika menentang rezim diktator Perez Jimenez.

BAB 9

DINAMIKA GERAKAN MAHASISWA YOGYAKARTA

Dinamika gerakan mahasiswa di Yogyakarta juga memiliki kaitan historis yang kuat sebagai bagian dari gerakan mahasiswa di kota-kota pelajar lainnya, dalam merespon setiap kondisi tuntutan perubahan zaman, dimana mahasiswa senantiasa dituntut untuk memainkan posisinya, baik pada masa penjajahan, Orde Lama, dan Orde Baru.

Keberadaan kota Yogyakarta sebagai kota pelajar, dalam setiap kurun generasi mahasiswa yang melakukan studi di Yogyakarta telah juga melahirkan angkatan-angkatan dalam sejarah gerakan mahasiswa, apakah itu berupa organisasi-organisasi, komite-komite ataupun tokoh-tokoh pergerakan. Kemunculan organisasi-organisasi ekstra, seperti HMI, PMII, IMM, PMKRI, PMKI, GMNI dan organisasi intra seperti DEMA, SMPT, Keluarga Mahasiswa (KM), Lemabga Dakwah Kampus (LDK) dan organisasi lainnya merupakan organisasi-

organisasi yang juga di Yogyakarta muncul sebagai bagian sinergis kekuatan gerakan mahasiswa.

Mengenai sejarah kemunculan dari beberapa organisasi di atas mungkin sudah banyak yang mengulas dan membahasnya, akan tetapi bagaimana kemunculan beberapa organisasi mahasiswa yang kemudian dalam perkembangan dekade 90-an sampai tumbangya Soeharto dengan Orde Barunya, cukup memberikan warna yang relatif baru dalam kancan gerakan mahasiswa. Khususnya di Yogyakarta menjadi hal penting untuk dilihat keberadaannya, seperti Sarekat Mahasiswa untuk Kedaulatan Rakyat (SMKR), P3Y, SMID, KAMMI, dan beberapa organisasi-organisasi lokal kampus yang tidak bernaung di bawah sistem organisasi intra kampus.

Kemunculan organisasi ekstra kampus yang disebutkan di atas itu memang muncul dari respon kelompok-kelompok mahasiswa terhadap:

1. Kondisi internal organisasi yang bernaung di bawah birokrasi kampus dengan segenap aturannya, tidak memberikan ruang yang lebar bagi mahasiswa dalam merespon kondisi sosial, politik dan kekuasaan yang ada.
2. Represifitas birokrasi pemerintahan terhadap keberadaan aktivitas kemahasiswaan yang berbau politik, tidak memungkinkan mahasiswa untuk mengembangkan diri kalau bernaung pada institusi kampus karena birokrasi kampus sebagai perpanjangan birokrasi pemerintah memaksa mahasiswa untuk bergerak di luar sistem birokrasi kampus.
3. Upaya mahasiswa membangun organisasi perlawanan dengan mencari format organisasi yang efektif dalam menjawab tekanan, intimidasi, teror dan upaya pembubaran organisasi kemahasiswaan yang dianggap

mengancam kekuasaan yang ada oleh penguasa Orde Baru.

Upaya dekonstruksi regulasi Orde Baru melalui organisasi intra kampus telah dijawab dengan kemunculan organisasi-organisasi ekstra kampus di era 90-an menjadi fenomena tersendiri dari gerakan mahasiswa. Kemunculan banyak komite-komite gerakan mahasiswa di Yogyakarta, telah menandai hancurnya ruang hegemonisasi Orde Baru dengan sistem organisasi formalnya, seperti halnya NKK/BKK dan konsep Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT). Terbukti kemudian bahwa yang banyak memainkan aksi-aksi massa di lingkup Yogyakarta dalam menumbangkan Orde Baru adalah gabungan dari komite-komite organisasi ekstra kampus, seperti:

1. SMKR yang semula pada awal kemunculannya pada awal tahun 1998 bernama Solidaritas Mahasiswa untuk Kedaulatan Rakyat, yang kemudian berubah menjadi Sarikat Mahasiswa untuk Kedaulatan Rakyat pada Kongres I di Kaliurang, SMKR merupakan gabungan dari organisasi eksternal lokal kampus seperti, KAM (UWMY), SEKAM (UMY), SMAL (STTL), Semar (UCY), BARA (ABAYIPK), LIDI (ISI).
2. P3Y (Paguyuban Pemuda Pejuang Yogyakarta) yang merupakan gabungan dari IAIN Sunan Kalijaga (KMPD), Univ. Jabanadra, Univ. Atmajaya, UMY (Komunitas Shopping), APMD, Univ. Sanatadharma, P3Y sekarang memiliki komite nasional yang bernama Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI).
3. Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID), Komite Mahasiswa ini merupakan cikal bakal bagi lahirnya Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan pada perkembangan selanjutnya SMID berubah menjadi

KPRP, setelah itu berubah lagi menjadi KNPD dan sekarang menjadi Komite Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), yang merupakan komite nasional dari kekuatan mahasiswa yang berada di bawah kekuatan PRD (onderbow PRD).

Sejarah singkat metamorfosa gerakan mahasiswa Yogyakarta yang disebutkan di atas, setelah pasca MALARI sampai dengan diberlakukannya NKK/BKK yang tidak memungkinkan gerakan mahasiswa untuk bergerak bebas melakukan kritik terhadap berjalannya kekuasaan Orde Baru, dimulai sekitar tahun 1989-1990, yang ditandai dengan kemunculan organ Forum Komunikasi Mahasiswa Yogyakarta (FKMY), yang pada awal tahun 1990 pecah menjadi dua organ, yakni: 1) Solidaritas Mahasiswa Yogyakarta (SMY), dan 2) Dewan Mahasiswa dan Pemuda Indonesia (DMPY). Pada tahun 1994 SMY pecah menjadi dua kekuatan, satunya adalah Persatuan Rakyat Demokratik (1994) dan pecahan keduanya adalah organ RODE. Persatuan Rakyat Demokratik mengalami perubahan menjadi Partai Rakyat Demokratik (PRD) pada tahun 1996. Sedangkan untuk DMPY juga berubah dan melahirkan P3Y, yang telah disebutkan di atas.

Kelebihan pola gerakan organisasi ekstra kampus yang muncul di awal dekade 90-an adalah kemampuan mereka membangun gerakan yang mampu leluasa bergerak, dengan tetap membangun basis massa di kampus, yang mana hal ini tidak dilakukan oleh gerakan mahasiswa 70-an akhir dan 80-an yang cenderung meninggalkan basis massa kampus, dengan membangun pola gerakan aliansi langsung atau bergabung dengan kekuatan-kekuatan lainnya di luar mahasiswa, seperti dengan kelompok-kelompok NGO dan sebagainya.

Organisasi ekstra kampus yang muncul di awal tahun 1990-an, itu memang merupakan refleksi mahasiswa dari

kegagalan gerakan mahasiswa sebelumnya yang elitis dan tidak berbasis massa, karena bagaimanapun gerakan mahasiswa adalah gerakan yang lahir dari kampus, maka sudah tentu basis massa yang real adalah massa mahasiswa yang ada di kampus-kampus, dengan tetap membuka peluang untuk melakukan aliansi dengan kekuatan sektor rakyat lainnya.

Untuk melihat dan memahami gambaran umum dari dinamika gerakan mahasiswa Yogyakarta, maka bisa dilihat dari salah satu kegiatan yang biasa dilakukan oleh mahasiswa adalah aktivitas unjuk rasa (aksi demonstrasi), sekalipun sudah barang tentu bahwa gerakan mahasiswa memiliki beberapa aktifitas atau kegiatan yang tidak sekedar melakukan aksi unjuk rasa. Adapun data tentang aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa Yogyakarta dapat dilihat sebagaimana yang digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 11.1
Jumlah Unjuk Rasa Mahasiswa D.I. Yogyakarta
Tahun 1998 s.d 2001

No	Tahun	Jumlah
1	1998	98
2	1999	69
3	2000	11
4	2001	13
Jumlah Total		191

Sumber: SKH, Kedaulatan Rakyat dan DPRD Yogyakarta

Sebagai perbandingan pada tabel 11.2 berikut ini dikemukakan jumlah unjuk rasa yang diselenggarakan oleh mahasiswa Yogyakarta dalam rentang tahun 1998.

Tabel 11.2
Jumlah Unjuk Rasa Mahasiswa D.I. Yogyakarta
Tahun 1998

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	1
2	Pebruari	3
3	Maret	13
4	April	18
5	Mei	20
6	Juni	8
7	Juli	1
8	Agustus	2
9	September	4
10	Oktober	9
11	Nopember	14
12	Desember	5

Sumber: SKH. Kedaulatan Rakyat

Dari data tabel 11.1 dan 11.2 di atas, dapat diketahui bagaimana gelombang aksi unjuk rasa atau demonstrasi itu mengalami kenaikan pada akhir masa pemerintahan Orde Baru, yakni pada tahun 1996, atau tepatnya pada tanggal 21 Mei 1998, dan berangsur-angsur mengalami penurunan angka bersamaan dengan terjadinya pergantian kekuasaan dari Orde Baru, kemudian Orde Reformasi dibawah kepemimpinan Habibie, sampai dengan pemerintahan Gus Dur. Tetapi dari data unjuk rasa tahun 2001 pada tabel 11.1 ada kenaikan angka, karena pengaruh disekitar isu pro dan kontra Gus Dur (polemik disekitar persoalan Brunai gate dan Bulog gate), sampai dengan keluarnya memorandum pertama Dewan Perwakilan Rakyat terhadap keberadaan pemerintahan Gus Dur.

BAB 10

GERAKAN MAHASISWA 2000

A. Awal Mula Munculnya Gerakan

Gerakan mahasiswa '98 mencapai titik kulminasi dengan tumbangnya penguasa Orde Baru, Soeharto. Kemudian berlanjut euforia selama dua tahun. Nah, memasuki tahun 2000 mulai muncul kegelisahan, karena gerakan reformasi itu ternyata tidak sepenuhnya selaras dengan tujuan awal. Banyak terjadi penyimpangan di sana-sini.

Setelah 1998 dan masuk tahun 2000, mahasiswa kembali ke kampus. Mereka belajar dan bekerja keras menyelesaikan studinya yang tertunda. Dalam rentang waktu dua tahun itu, sebagian besar aktifis '98 berhasil lulus dan menjadi sarjana. Mereka masuk ke dunia kerja, terlibat dalam profesi yang dipilihnya. Mereka menjadi aparatur pemerintah, anggota DPR/ DPRD dan DPD, pengusaha, karyawan perusahaan, hingga terlibat dalam LSM. Jikapun ada aktifis '98 yang masih 'betah' kuliah, dapat dipastikan

akan mendapatkan ‘rongrongan’ dari keluarganya, cibiran dari dosen atau adik tingkat, desakan dari kampus dan ancaman droup out (DO), tuntutan psiko-biologis dirinya, hingga tuntutan pacar yang mendesak dinikahi. Membuat mereka mau tidak mau melakukan kompromi-kompromi untuk menjawab desakan-desakan tersebut. Secara otomatis idealisme yang telah dibangun selama menjadi mahasiswa ‘dipaksa’ untuk menerima realitas dirinya sebagai makhluk sosial. Mereka harus kembali menjejakkan kaki di Bumi. Menghadapi realitas kehidupan yang sebenarnya. Meminjam konsepsi Maslow, mereka dituntut untuk memenuhi hirarki kebutuhan pribadinya; mulai dari kebutuhan fisiologi, lalu kebutuhan rasa aman, kebutuhan dicintai dan menyintai, kebutuhan harga diri, hingga kebutuhan aktualisasi diri. Bila dibagi dalam konteks kategorisasi gerakan, mahasiswa tahun 2000 terbagi tiga, yaitu: mahasiswa struktural, mahasiswa semi-struktural, dan mahasiswa otonomi. Mahasiswa struktural merupakan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), mereka dalam posisi sebagai organ internal kampus. Dalam banyak kegiatannya mereka mendapatkan bantuan pembiayaan dari kampusnya. Mahasiswa semi-struktural merupakan aktivis-aktivis yang berhimpun dalam organisasi ekstrakampus seperti kelompok Cipayang (HMI, GMNI, PMKRI), PMII, IMM, KAMMI, HIMMAH NW, dan lain-lain. Organ mereka terentang dari tingkat Pusat hingga ke kampus-kampus. Sedangkan mahasiswa otonomi merupakan aktivis-aktivis yang bergerak bebas, tidak terikat oleh satu organisasi yang ketat, serta berhimpun berdasarkan isu-isu tertentu.

Satu komentar yang patut dicermati. Pada perayaan ulang tahunnya yang ke-81 di tahun 2006, Pramoedya Ananta Toer mengajukan sebuah pertanyaan yang cukup menarik:

mengapa pemuda yang dengan gemilang menyingkirkan rezim Soeharto, tidak menghasilkan tokoh politik nasional? padahal pemudalah yang memberikan kepemimpinan dan energi dalam setiap perubahan penting disepanjang sejarah Indonesia serta tampil menjadi tokoh politik nasional. Mengapa sekarang tidak?⁹⁷

Arif Novianto berkomentar lebih jauh atas pertanyaan Pramodya Ananta Toer di atas. Dia menyatakan:

“.....Gerakan mahasiswa atau pemuda yang berhasil menggulingkan Soeharto tersebut ternyata tidak menghasilkan tokoh politik nasional pada periode era reformasi. Bahkan sampai sekarang, tokoh nasional hanya diisi oleh orang-orang dari enclave orba. Pada 1999 ada Amin Rais, Megawati dan Gus Dur, sedangkan sampai sekarang hanya diisi oleh SBY, Jusuf Kalla, dan Prabowo. Jokowi memang tidak termasuk enclave peninggalan orba, namun ia tak terlahir dari proses gerakan dan tak memiliki gagasan besar tentang ke-Indonesiaan.”⁹⁸

Gerakan mahasiswa 2000 mulai dilihat dalam bingkai pesimistis. Pandangan itu dinyatakan oleh seorang peneliti tanpa nama⁹⁹. Dia menyatakan:

“*Namun peran mahasiswa sebagai agen perubahan itulah yang tidak begitu terlihat kontribusinya ataupun menjadi kabur (disorientasi) dalam gerakan mahasiswa baik isu yang berskala nasional maupun daerah.*”

Berdasarkan temuan dan analisis data, peneliti menarik beberapa kesimpulan yang menjadi faktor utama penyebab disorientasinya gerakan mahasiswa, yaitu:

97 arifnovianto.wordpress.com

98 Ibid. arifnovianto

99 Pandangan ini ditemukan di internet tanggal 27 September 2019. Merupakan hasil penelitian tentang penyebab disorientasinya gerakan HMI Cabang Padang pada tahun 2013-2014.

Pertama, perubahan fundamental sistem politik pascareformasi 1998 dari rezim otoriter-sentralistik kepada demokrasi-desentralisasi menjadi peluang sekaligus tantangan bagi gerakan mahasiswa. Sistem politik yang terbuka telah menciptakan kebebasan berekspresi masyarakat dan memberi kesempatan politik bagi lahirnya gerakan mahasiswa. Tantangannya yaitu dengan sistem pemerintahan yang terdesentralisasi menjadikan pengambil kebijakan tidak hanya berada di pusat namun juga berada di daerah-daerah otonom. Hal ini menyebabkan fokus isu mahasiswa terbagi antara isu-isu yang bersifat nasional dan isu-isu yang bersifat sektoral kedaerahan. Sehingga untuk isu-isu berskala nasional menjadi lebih sulit menciptakan perasaan yang sama antar daerah. Akan tetapi untuk isu-isu yang bersifat sektoral kedaerahan meskipun didukung kesempatan politik yang terbuka juga belum menunjukkan visi bersama yang hendak diwujudkan dalam gerakan mahasiswa. Terbukanya kesempatan politik memberi celah bagi lahirnya gerakan mahasiswa, namun peluang tersebut justru belum mampu dimanfaatkan sebagai motor gerakan mahasiswa. Mahasiswa justru masih terlihat gagap dan sedang mencari posisi seperti apa, format gerakan yang pas untuk mengambil peran seperti apa dalam sistem politik yang demokratis pascareformasi.

Kedua, sistem pendidikan yang berorientasi dunia kerja telah merubah orientasi mahasiswa terhadap kondisi sosial politik di masyarakat. Tuntutan agar mahasiswa cepat menyelesaikan studinya dengan jadwal perkuliahan yang padat membuat kesempatan mahasiswa untuk melakukan kajian-kajian sosial semakin berkurang. Hal tersebut semakin mengurangi minat dan perhatian mereka seputar isu-isu sosial yang ada. Sehingga mahasiswa menjadi lemah secara kognisi dan kehilangan daya kritis karena ketidaktahuannya. Selain

itu adanya beberapa kampus yang melakukan larangan untuk berunjuk rasa membuat mahasiswa perlahan-lahan menjadi patuh dan takut untuk bersikap kritis. Faktor tersebut juga dirasakan dampaknya kepada minimnya pilihan kader potensial. Adanya kader yang cenderung memanfaatkan organisasi kemahasiswaan untuk mencapai kepentingan politik namun bukan untuk tujuan pergerakan politik atau sebagai alat perjuangan namun keuntungan pribadi.

Ketiga, permasalahan internal organisasi dalam hal sumber daya yaitu terkait dengan basis keanggotaan, jejaring komunikasi, dan kepemimpinan. Secara basis keanggotaan terdapat persoalan seperti ketidakdisiplinan anggota dan kurangnya rasa tanggung jawab. Hal ini menyita perhatian organisasi kemahasiswaan yang lebih disibukan dengan permasalahan internal sehingga kurangnya perhatian terhadap isu-isu diluar. Dukungan keanggotaan banyak secara moral namun sedikit dalam tindakan di lapangan karena kurang optimalnya proses kaderisasi membentuk militansi anggota. Kurang dimanfaatkannya teknologi informasi sebagai jejaring komunikasi dan belum adanya wadah pertemuan rutin antar lembaga mahasiswa untuk mendiskusikan isu-isu terkini menyebabkan tidak terbangunnya soliditas antar organisasi mahasiswa.

Keempat, minimnya kajian dan analisa terhadap suatu permasalahan. Hal itu dikarenakan kurangnya dukungan data investigasi lapangan yang membuat kajian mahasiswa tidak mendalam dan cenderung bersifat normatif sehingga aksi-aksi yang dilakukan lebih sering bersifat reflektif dalam bentuk aksi-aksi solidaritas. Kurangnya kajian menyebabkan pembingkaiian isu yang dilakukan tidak maksimal dan tidak mampu meyakinkan target peserta gerakan sehingga gerakan nyata yang harus dilakukan menjadi kabur. Kondisi demikian

menyebabkan gerakan yang dilakukan menjadi tidak konsisten, reaktif, dan rendahnya partisipasi gerakan mahasiswa. Kondisi yang lebih buruk adalah adanya kecurigaan antar lembaga mahasiswa yang dianggap membawa kepentingan politik tertentu hal tersebut terjadi karena organisasi kemahasiswaan kurang mengedepankan gagasan-gagasan dan ide-ide yang konstruktif untuk mengcounter isu-isu politik sebagai bentuk pencerdasan bagi masyarakat awam.

Pemerintah dan DPR sepakat: mengesahkan revisi UU KPK! Dalam sesaat ruang paripurna DPR riuh tepuk tangan, tidak ada instruksi, hanya wajah-wajah sumringah. Pemerintah dan DPR bersalaman, puas dan melegakan. Namun dalam hitungan jam, Republik Indonesia gejer. Terjadi gelombang pro dan kontra atas revisi UU KPK di seluruh pelosok negeri.

B. Nama Gerakan

Berdasarkan durasi waktu, penamaan gerakan mahasiswa di Indonesia dihitung dalam siklus rentang waktu per-dua puluhan tahun. Misalkan mulai 1908 - 1928, 1928 - 1945, 1945 - 1966, 1966 - 1978,¹⁰⁰ 1978 - 1998, dan 1998 - 2019.

Terdapat banyak penamaan atas gerakan mahasiswa tahun 2000. Mereka disebut generasi Gadget, generasi 4.0, generasi pasca reformasi, Santa Fest, generasi Reformasi-Revolusi, dan Deki R Abdillah menyebutnya: Generasi milenial.¹⁰¹ Dari banyak penamaan itu, sebagian besar bernada negatif.

100 Satu catatan, terdapat pengecualian pada rentang waktu 1966 - 1978, dimana puncak gerakan dilihat dengan meledaknya peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari (Malari). Namun secara umum, siklus puncaknya per-20 tahun.

101 <https://news.detik.com/kolom/d-4207800/matinya-gerakan-mahasiswa-milenial>

Dinamakan Generasi Gadget.¹⁰² Penamaan itu dilekatkan pada gaya hidup mahasiswa 2000 yang selalu membawa Gadget kemana-mana. Gadget seolah-olah menjadi simbol identitas. Termasuk juga ketika berkoordinasi dan memobilisasi massa untuk melakukan aksi gerakan (baca: unjuk rasa). Hebatnya mesin satu ini, memudahkan mahasiswa berkomunikasi dan menyebarkan isu-isu gerakan dalam waktu cepat dan kepada massa yang masif.

Generasi 4.0.¹⁰³ Sosok yang paling gencar mempopulerkan penyebutan ini adalah Presiden Joko Widodo, terutama ketika peristiwa debat calon presiden melawan Prabowo. Secara 'sadar' Jokowi mengidentikkan dirinya dengan generasi 4.0, minimal sebagai penyokong utamanya. Berhadapan dengan Prabowo yang secara sadar atau tidak diidentikkan dengan kaum tua atau yang paling dekat adalah bagian dari rezim Orde Baru. Nampaknya, kampanye itu berhasil. Jokowi menjadi pilihan kebanyakan pelaku bisnis muda yang termasuk juga mahasiswa.

Generasi pasca reformasi.¹⁰⁴ Dinisbahkan pada peristiwa Mei 1998, dimana jutaan mahasiswa seluruh Indonesia bergerak, Gedung Parlemen diduduki, dan presiden Soeharto meletakkan jabatannya. Setelah itu, mahasiswa kembali ke kampus. Kehidupan kembali normal, mereka dituntut untuk belajar keras meraih masa depan.

102 Gadget (Indonesia: Gawai) adalah alat komunikasi berukuran kecil yang mempunyai banyak fungsi (id.m.wikipedia.org).

103 Industri 4.0 adalah tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Hal itu mencakup system cyber-fisik, internet of things, komputasi awan, dan komputasi kognitif (www.maxmanroe.com).

104 Mei 1998 adalah momen yang menentukan bagi sejarah Indonesia. Pemerintahan otoriter Soeharto selama 32 tahun berakhir ketika rezim Orde Baru yang korup runtuh di tengah kekacauan ekonomi dan politik yang dipicu oleh krisis Ekonomi Asia. (www.Matamatapolitik.com)

Ahmad Rizky Mardhatillah Umar mencermati lebih jauh mahasiswa 2000 ini:

“Ada kecenderungan migrasi aktivis-aktivis tahun 1998 ke dunia politik yang, ironisnya, membawa adik-adik mereka ke dalam gerbong mereka. Di dunia politik Indonesia, bawa-membawa dan tarik-menarik gerbong sudah menjadi lazim. Jadi, wajar jika banyak aktivis 1998 yang terjun ke politik dan lantas memiliki hubungan khusus dengan adik-adiknya, seperti Fahri Hamzah di KAMMI, Anas Urbaningrum di HMI, Muhaimin Iskandar di PMII, dan lain sebagainya. Kecenderungan semacam ini membuat gerakan mahasiswa Islam, sebutlah HMI (Diponegoro dan MPO), KAMMI, PMII, IMM, dan lain sebagainya, berfungsi menjadi semacam “pintu gerbang” atau bahkan “lokasi kaderisasi” bagi calon-calon politikus.”¹⁰⁵

Generasi Reformasi-Revolusi.¹⁰⁶ Merupakan sebutan bernada kekaguman, karena gerakan mahasiswa 2000 merupakan gerakan yang cepat namun tetap dalam bingkai konstitusional. Dalam gerakannya, mereka tidak anarkis, banyak dialog-dialog terutama di media-media massa khususnya televisi.

Generasi milenial.¹⁰⁷ Dinisbahkan pada kaum-kaum

105 Baca selengkapnya di artikel "*Melupakan Gerakan Mahasiswa Islam?*", <https://tirto.id/b27V>

106 Kaum revolusioner tidak saja berasal dari kaum buruh, tani, dan nelayan yang tertindas, tetapi juga golongan intelektual, cendekia, maupun kelas menengah yang mempunyai kesadaran ideologis untuk melakukan perubahan secara fundamental pada sebuah sistem. Malah, mereka yang intelek, cendekia dan kelas menengah ini memiliki peran strategis untuk memelopori, mengorganisir, mengagitasi, dan mendorong massa dalam melakukan perlawanan (kompasiana.com).

107 Milenial (juga dikenal sebagai Generasi Y, Gen Y atau generasi Langgas) adalah kelompok demografi setelah Generasi X (Gen

muda yang produktif. Mereka gemar dengan inovasi dan kreativitas, namun di sisi lain tidak peduli dengan kegiatan politik praktis. Mereka terlibat dalam usaha-usaha online, e-shop, hingga usaha jasa konsultan. Ledakan bagi mereka, masih muda sudah tajir. Namun sebutan kaum milenial ini secara tidak langsung menjauhkan mahasiswa dari kehidupan politik.

C. Isu-Isu Gerakan

Terdapat beragam isu diangkat oleh gerakan mahasiswa 2000. Isu-isu ini merupakan wacana yang paling banyak mengemuka di media massa, dalam forum-forum ilmiah, dan diskusi-diskusi yang dilakukan oleh para aktivis mahasiswa.

Pertama, kapitalisasi pendidikan. Moh. Taufik (2014)¹⁰⁸ mencatat: Dalam konteks kampus Unesa sebagai salah satu kampus di Indonesia juga harus ikut mendukung terwujudnya pendidikan yang sesuai dengan kepentingan kapitalis. Sebagai wujud liberalisasi pendidikan di Unesa masuknya lembaga keuangan IDB (*Islamic development bank*) sebagai pihak investor untuk melakukan berbagai pembangunan infrastruktur di Unesa dan adanya kerja sama juga dengan BTN (Bank Tabungan Nasional), Bank Jatim, dan BNI (Bank Nasional Indonesia) untuk memenejemen administrasi keuangan kampus. Dan sebagai lembaga yang otonom Unesa membuat usaha mandiri seperti menjual air

X).Tidak ada batas waktu yang pasti untuk awal dan akhir dari kelompok ini. Para ahli biasanya menggunakan awal 1980-an sebagai awal kelahiran kelompok ini dan pertengahan tahun 1990-an hingga awal 2000-an sebagai akhir kelahiran (id.m. wikipedia.org.).

108 Moh. Taufik. 2014. *Resistensi Gerakan Mahasiswa terhadap Kapitalisasi Pendidikan*. Surabaya: Paradigma, volume 2 Nomor 3 tahun 2014.

mineral, penyewaan fasilitas kampus, dan penarikan pajak bagi pedangan yang ada di kantin. Akibat dari adanya kapitalisasi pendidikan ini yang menimbulkan komersialisasi pendidikan mengakibatkan pendidikan semakin mahal dan hanya mendukung pada kepentingan pemodal serta menempatkan kebijakan pendidikan untuk mendapatkan *profit*.

Adanya komersialisasi pendidikan terlihat jelas ketika adanya kebijakan dari kampus untuk menaikkan biaya pendidikan seperti adanya kebijakan BPKP (biaya peningkatan kualitas pendidikan) pada tahun 2011 dan akhir-akhir ini adanya kebijakan UKT (uang kuliah tunggal) pada tahun 2013. Kebijakan tersebut mau tidak mau yang mengharuskan seorang mahasiswa untuk membayar lebih mahal agar bisa mengenyam pendidikan di bangku kuliah. Isu kapitalisasi pendidikan itu menimbulkan resistensi mahasiswa namun juga aksi pelemahan resistensi.

Resistensi mahasiswa dimulai dari pandangan organisasi ekstra kampus terhadap situasi pendidikan atau kampus di atas, menyebabkan timbulnya resistensi dari gerakan mahasiswa, ada beberapa tindakan resistensi yang dilakukan oleh organisasi ekstra kampus (SMI dan GMNI) untuk menyikapi isu-isu yang kemudian mereka angkat. Berawal dari pembentukan ruang konsolidasi antar organisasi dimulai dengan melakukan diskusi situasi kampus, diskusi dilakukan untuk membangun sebuah konsensus terhadap kebijakan-kebijakan kampus yang dianggap tidak memihak terhadap mahasiswa. Kegiatan diskusi dilakukan di dalam kampus, dengan melibatkan semua organisasi eksternal kampus maupun organisasi internal kampus, semua organisasi berhak menyampaikan analisisnya terhadap

objek pembahasan hingga muncul perbedaan pandangan maupun kesamaan pandangan. Dari kesamaan pandangan itulah yang kemudian menjadi embrio membentuk suatu aliansi.

Aliansi antar organisasi dilakukan untuk membentuk wadah komunikasi untuk melakukan pembahasan tindak lanjut untuk menyikapi isu-isu yang kemudian diangkat. Kegiatan konsolidasi terhadap organisasi ekstra kampus yang memiliki pandangan yang sama terhadap situasi kampus yang sekarang telah dikapitalisasikan, konsolidasi dilakukan untuk menghimpun kekuatan dengan elemen mahasiswa yang lain yang sesuai dengan kesamaan pandangan, saat ini SMI sedang melakukan konsolidasi dengan salah satu organisasi ekstra yaitu GMNI, konsolidasi ini menyekapati untuk membuat wadah persatuan aliansi yang diberi nama KAM Unesa (Kesatuan Aksi Mahasiswa Unesa).

Dari hasil konsolidasi tersebut kemudian diwujudkan untuk melakukan penyikapan isu-isu yang ada di kampus Unesa dengan aksi-aksi demonstrasi dengan mengangkat isu-isu seperti: “Tolak BPKP (Biaya Kualitas Pendidikan),” “Tolak UKT,” dan “Tolak Investor masuk kampus.” Penyikapan isu-isu kampus bisa berbentuk penempelan pamflet di tiap mading jurusan kampus Unesa, pamflet tersebut yang berisi tentang kebobrokan birokrasi kampus, kemudian penyebaran selebaran yang dibagikan terhadap mahasiswa luas juga berisikan kritikan-kritikan terhadap kebijakan kampus. Tujuan dalam melakukan penempelan pamflet dan penyebaran selebaran bertujuan untuk membangun kesadaran mahasiswa agar sadar akan kondisi kampus yang sekarang yang seharusnya menjadi perhatian mahasiswa.

Kemudian melakukan aksi demonstrasi, demonstrasi dilakukan dengan pengumpulan massa sebanyak-banyaknya dari fakultas ke fakultas yang lain, di setiap fakultas setiap organisasi melakukan orasi, hingga menuju rektorat untuk menyampaikan aspirasi terkait isu-isu kampus. Di rektorat, para mahasiswa yang berdemonstrasi dihadang aparat keamanan kampus agar tidak masuk kedalam gedung rektorat, hanya ada beberapa perwakilan tiap organisasi untuk masuk ke dalam melakukan negosiasi dengan Rektor selaku pembuat regulasi-regulasi yang ada di kampus.

Sedangkan aksi pelemahan resistensi gerakan mahasiswa merupakan tindakan atas adanya upaya resistensi yang dilakukan beberapa organisasi eksternal kampus di atas yang kemudian dapat dilemahkan oleh birokrasi kampus, agar tidak timbul gejolak-gejolak dari mahasiswa untuk melakukan protes terhadap kebijakan-kebijakan kampus seperti: pemberian wacana mahasiswa liar, wacana Unesa yang akan menjadi *world class university*, banyaknya pembangunan infrastruktur, perkuliahan kewirausahaan, sistem kurikulum yang kompetitif, hingga konflik horizontal dengan organisasi intra kampus¹⁰⁹.

Kedua, Hak Asasi Manusia. Isu HAM juga tidak luput dari gerakan mahasiswa. Kasus-kasus pelanggaran HAM di negara ini dapat dimoncongkan pada dua jenis pelanggaran. *Pertama*, pelanggaran HAM bersifat berat yang meliputi pembunuhan massal (genosida) dan kejahatan kemanusiaan. Genosida merupakan upaya kekerasan demi penghancuran atau pemusnahan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, dan agama. Kejahatan kemanusiaan adalah perbuatan yang dilakukan berupa serangan langsung

109 Ibid. Moh. Taufik, 2014.

terhadap penduduk sipil seperti pengusiran penduduk secara paksa, pembunuhan, penyiksaan, perbudakan, dll. *Kedua*, kasus pelanggaran HAM biasa yang meliputi pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, penghalangan ekspresi pendapat, dan penghilangan nyawa orang lain (<https://bukuonlinestore.com>).

Peran dan fungsi mahasiswa dalam pemajuan Hak Asasi Manusia, sebagai kekuatan penekan, mahasiswa dapat memainkan peran dalam penegakan HAM dengan pilihan strategi dan taktik seperti menggunakan parlemen jalanan sebagai sebuah taktik gerakan ketika pelanggaran HAM terjadi. Membangun jejaring gerakan HAM dengan lembaga-lembaga yang relevan dan penting, misalnya Komnas HAM, Komisi Hukum DPR RI, Mahkamah Konstitusi, LSM, dan kelompok-kelompok mahasiswa di berbagai universitas, melakukan advokasi kebijakan untuk memastikan bahwa pola, struktur dan kelembagaan negara betul-betul ramah terhadap penghormatan HAM¹¹⁰.

Pada tahun 2000an pelanggaran HAM masih terus terjadi. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mencatat 33 peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dialami mahasiswa asal Papua selama 2018-2019. Berdasarkan catatan 33 peristiwa pelanggaran HAM itu terjadi di Surabaya 9 peristiwa, Jakarta 4 peristiwa, Semarang 4 peristiwa, Yogyakarta 3 peristiwa, Bali 5 peristiwa, dan Papua 8 peristiwa ([Tribunnews.com](http://tribunnews.com)).

Ketiga, Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam. Masalah-masalah lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang dihadapi gerakan mahasiswa 2000 mulai dari

110 <http://ham.go.id>

pembakaran lahan gambut yang dilakukan oleh sekelompok oknum yang memihak kepada para pengusaha kelapa sawit (CPO) di Riau, pembalakan liar tak terkendali di pedalaman hutan tropik Kalimantan, para petani di Jawa Barat yang melakukan sistem perladangan berpindah, hingga peralihan lahan hijau menjadi permukiman di berbagai daerah (<https://www.kompasiana.com>).

Secara umum dua pilihan aksi gerakan mahasiswa atas lingkungan hidup dan sumberdaya alam. Pertama, membentuk organisasi pencinta lingkungan. Salah satu contoh peranan mahasiswa dalam melestarikan lingkungan hidup adalah ditandai dengan adanya kelompok mahasiswa pecinta alam yang ada di setiap universitas. Tidak hanya mahasiswa pecinta alam yang mempunyai tanggung jawab besar dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup, namun masyarakat sekitar juga harus turut berpartisipasi untuk memenuhi kebutuhan generasi mendatang. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat direalisasikan dengan melakukan kegiatan positif seperti bersih-bersih desa, melakukan tebang pilih dalam penebangan pohon, membuang sampah pada tempatnya, memilah antara sampah organik dan non-organik dan melakukan kegiatan daur ulang sampah, meminimalisir pemakaian kendaraan, efek gas rumah kaca maupun barang-barang yang dapat mencemari lingkungan dan menyebabkan rusaknya lapisan ozon sehingga akan terjadi peningkatan suhu udara dan mempercepat perubahan iklim global. Selain itu peranan mahasiswa dalam lingkungan hidup adalah mensosialisasikan tindakan atau cara-cara agar sumber daya tetap lestari seperti menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien, tidak mengurangi kemampuan dan kelestarian sumber daya alam lain dalam satu ekosistem serta mengadakan sumber daya alam alternatif

untuk pembangunan di masa depan (<https://dindincam18.wordpress.com>). Kedua, aksi unjuk rasa. Lihat saja, dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Internasional 10 Januari, sejumlah mahasiswa dari Imam Ghozali Pecinta Alam kampus Institut Agama Islam Imam Ghazali (IAIG) Kesugihan Cilacap menggelar aksi unjuk rasa. Mereka menggelar orasi dan membentangkan spanduk di depan Taman Zebra kompleks alun-alun menuntut keadilan ekologi. Beberapa tulisan di spanduk yang dibentangkan antara lain Patuhi Undang-undang Lingkungan, Industri Merusak Masyarakat Sekarat, Selamatkan Bumi Cilacap, Tolak Kerusakan Lingkungan Hidup dan lain-lain. Koordinator Aksi Chajat Gus Hidayat menilai peran perusahaan dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup masih buruk. Hal ini ditunjukkan dengan catatan 13 perusahaan di Cilacap yang meraih Proper Biru Minus dan 4 perusahaan diganjar Poper Merah (<http://rri.co.id>). Di Bangkalan Madura, puluhan anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bangkalan mendatangi kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat. Mereka membentangkan beragam spanduk bertuliskan, 'Bangkalan Banjir Sampah' dengan tagar *savebangkalan* dan *bangkalanbukantongsampah*. Selain itu, 'UUD Kau Jadikan Sampah', hingga 'Ubah Sampah Jadi Berkah' (<https://surabaya.tribunnews.com>).

Keempat, Isu-isu Lokal. Dalam arti masalah-masalah khusus yang terjadi di satu tempat/wilayah tertentu, termasuk juga pemberdayaan masyarakat lokal. Dalam perspektif gerakan mahasiswa, satu contoh paling banyak terjadi adalah kegiatan Kuliah Kerja Nyata. Skala kegiatan ini bersifat massif, terjadi di seluruh perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswa terlibat jutaan. Di samping itu, banyak juga aksi-aksi lainnya seperti pemberdayaan pengamen, pemberantasan buta aksara

di Nusa Tenggara Barat (NTB), hingga aksi-aksi pembelaan atas masyarakat adat korban Freport dan pembelaan atas pendulang emas ilegal di Sumbawa NTB.

Kelima, Peraturan dan Perundang-Undangan. Selain revisi undang-undang KPK yang telah disahkan, mahasiswa juga kecewa terhadap pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Revisi UU Pertanahan, Revisi UU Ketenagakerjaan, RUU Minerba. Mereka menilai semua undang-undang tersebut tak mencerminkan aspirasi masyarakat dan justru lebih memihak kepentingan kelompok tertentu. Hal lainnya yang juga menjadi sorotan mahasiswa adalah terpilihnya Firli Bahuri sebagai Ketua KPK. Padahal Firli dianggap sebagai tokoh yang sarat kontroversi dan mendapatkan banyak penolakan dari para penggiat anti korupsi.¹¹¹

Selasa, 24 september 2019, di Jakarta Faesal kritis mahasiswa Al Azhar. Kamis, 26 september 2019, Imawan Randi meninggal luka tembak di dada, Muhammad Yusuf Kardawi meninggal karena benda tumpul di kepala; keduanya mahasiswa Halu Oleo Kendari. Sedangkan jumlah korban mahasiswa yang luka-luka ringan hingga berat lebih dari 300an orang mahasiswa.

D. Ideologi Gerakan

Ideologi gerakan mahasiswa 2000 patut dipertanyakan. Menariknya, sejauh pengamatan tidak ada diskursus serius mengenai ideologi yang menggerakkan aksi-aksi mahasiswa.

Dalam Bukunya “Ideologi Gerakan Pasca Reformasi,” As’ad Said Ali mengungkapkan ada lima tipologi besar

111 <https://fokus.tempo.co/read/1250280/demo-mahasiswa-kecewaaan-berujung-parlemen-jalanan/full&view=ok>

ideologi gerakan yang secara aktual menjadi orientasi masyarakat Indonesia. Empat di antaranya bersumber dari pemikiran Barat, dan satu lagi bersumber dari pemikiran Keagamaan (Islam). Secara sederhana klasifikasinya sebagai berikut: kiri-radikal, kiri-moderat, kanan-konservatif, kanan-liberal dan Islamisme. Istilah kiri dan kanan sebenarnya berasal dari tradisi politik Prancis. Kelompok politik kanan adalah mereka yang secara umum mendukung kebijakan pemerintah saat itu, sedangkan kiri identik terhadap kritik dan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah.

Ideologi kiri-radikal muncul akibat ketidakpercayaan terhadap sistem demokrasi. Karena pada dasarnya sistem demokrasi dengan liberalisasi ekonominya hanya menguntungkan kaum kapitalis. Mereka yang berlandaskan ideologi ini menginginkan mobilisasi politik kelompok-kelompok tertindas, khususnya buruh dan petani. Kemunculan wacana ini di Indonesia diarahkan untuk membangun demokrasi yang partisipatoris dan kesetaraan retribusi ekonomi. Kelompok ini bergerak melalui gerakan-gerakan sosial yang mereka bentuk. Front Perjuangan Rakyat misalnya, merupakan kekuatan kelompok sosial yang menyatukan kekuatan proletariat industri dan proletariat agraris.

Berbeda dengan ideologi kiri-radikal, pada masa Orde Baru umumnya tumbuh di kalangan gerakan mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Di Indonesia terdapat dua jenis ideologi kiri-moderat yang berkembang seperti: Sosial Demokrasi. Sosial demokrasi memiliki gagasan pokok berupa *welfare state* serta kombinasi antara persamaan sosial dan pasar ekonomi. Sedangkan bentuk pergerakannya, melalui lembaga-lembaga perwakilan kepentingan rakyat.

Di sisi ekstrem yang lain, selama pasca reformasi, ideologi kanan yang menjadi orientasi gerakan sosial,

dapat dibedakan antara kanan-konservatif dan kanan-liberal. Konservatisme itu sendiri adalah sebuah falsafat ilmu politik yang mendukung nilai tradisional dalam struktur demokrasi. Kelompok ini mengawal jalannya arus reformasi agar nilai-nilai tradisional, seperti Pancasila tidak larut dalam arus liberalisme. Sementara itu, kanan-liberal cenderung berkembang sejalan dengan kapitalisme dan filsafat liberalisme. Dalam landasan pikirnya, mereka berkeyakinan mengenai pentingnya kebebasan individu untuk mencapai setiap tujuan yang diharapkan.

Tipologi yang terakhir yaitu islamisme, sebagai salah satu ideologi politik terbesar diantara ideologi lainnya. Secara garis besar As'ad Said Ali mengelompokkan ideologi islamisme yang pertama dalam kategori islam mainstream dengan berbagai contoh seperti: Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis) dan sejenisnya. Yang Kedua, islam nonmainstream yaitu gerakan baru yang mengikatkan diri dengan semangat mewujudkan doktrin secara *kaffah* berdasarkan sumber literal. Ideologi ini serta varian-varianya bersaing dengan ideologi lain yang berasal dari barat untuk memperebutkan pengaruh politik dalam suasana liberalisme.

Sama halnya dengan ideologi gerakan yang berkembang di Indonesia, pada level mahasiswa, terdapat pula beragam ideologi yang melandasi lahir dan berkembangnya organisasi Pergerakan Mahasiswa. Tidak perlu saya sebutkan satu persatu apa nama organisasi beserta ideologinya. Tidak penting bagi saya membahas ulang tentang jenis dan keragaman ideologi di level Kemahasiswaan. Setelah membaca mengenai perkembangan ideologi gerakan di Indonesia, anda dapat mengkontekstualisasikan dengan kehidupan organisasi gerakan kemahasiswaan. Silakan diamati dan

ditarik garis lurus kesesuaian masing-masing organisasi dengan keragaman ideologi yang telah dijelaskan di atas.

Persoalan berikutnya yang terpenting adalah membahas matinya sensitifitas atau dalam bahasa saya “syahwat” mahasiswa hari ini dalam berideologi dan “bergerak.” Masa Reformasi adalah kenangan terindah bagi kaum mahasiswa. Dimana pada saat itu, seluruh elemen mahasiswa bersatu dalam usaha menumbangkan Rezim Soeharto. Kenangan hanya tinggal kenangan, pasca 1998, terjadi stagnasi peran mahasiswa bagi kemajuan bangsanya. Tidak ada lagi perubahan besar yang bisa dilakukan oleh kalangan mahasiswa. Stagnasi ini dikarenakan beberapa hal berikut:

Pertama, Kesalahan memahami keberadaan *common enemy*. Sebelum reformasi terdapat rezim Soeharto, sosok musuh yang bisa mempersatukan mahasiswa. Pasca turunnya Soeharto, mahasiswa menganggap sudah tidak punya musuh bersama lagi. Kesalahan penafsiran yang fatal adalah menganggap bahwa musuh bersama hanya berbentuk rezim. Padahal, masih banyak masalah di negeri ini, pendidikan mahal, banyak rakyat yang hidup tidak layak dan banyak konspirasi korupsi.

Kedua, sikap apatisisme mahasiswa. Kesalahan pola pendidikan OSPEK di kampus merupakan akar masalah ini. Indoktrinasi Senior terhadap mahasiswa baru dengan kalimat semacam ini, “Jangan ikut organisasi gerakan mahasiswa, disana kamu akan kehilangan teman, bermusuhan dengan temanmu sendiri bahkan diajari berpolitik.” Padahal di organisasi gerakan, mahasiswa tidak diajarkan berpolitik, mahasiswa akan dididik bagaimana berpikir kritis, bagaimana menyelesaikan masalah bangsa ini dengan berbagai jalan dan cara. Ironisnya lagi, mahasiswa hari ini berpikir bahwa semua masalah bangsa ini hanya dapat diselesaikan dengan

mengikutsertakan gagasan pemikirannya melalui Lomba Penulisan Ilmiah saja. Dalam hati dan berbagai kesempatan saya sering berkata pada adik-adik mahasiswa: “Emank SBY baca tuh Karya Tulis Ilmiah ente? .

Ketiga, Setiap mahasiswa memiliki visi yang berbeda, bahkan bersebrangan antara yang satu dengan yang lain. Sehingga, akan mengarah ke dalam persoalan friksi-friksi yang bersifat teknis. Saling mencela satu sama lain. Fakta inilah yang kemudian menjadi penyebab gerakan mahasiswa kehilangan orientasi. Akibatnya, mereka lupa dengan cita-cita utama bangsa Indonesia.

Belajar dari sejarah bangsa ini yang sudah memberikan pelajaran sikap paranoid terhadap ideologi luar, seperti masa Orde Baru yang dianggap terlalu mengadopsi ideologi impor. Sebaliknya, apabila terlalu abai, seperti awal reformasi, menjadikan kita kehilangan pegangan ketika terjadi gejolak konflik yang luas (<https://pmiitub.wordpress.com>).

Satu anggapan kuat, bahwa mahasiswa 2000 tidak menganut satu ideologi gerakan yang jelas. Aksi-aksi mereka lebih banyak digerakkan oleh empati¹¹² sosial tinggi atas nasib masyarakat bawah. Kata empati berawal dari kata bahasa Jerman *Einfuhlung* yang secara harfiah artinya adalah ‘memasuki perasaan orang lain’ (<http://dosensosiologi.com>).

112 empati adalah kemampuan untuk membayangkan apa yang mungkin dirasakan atau dipikirkan oleh orang lain dan juga kemampuan untuk merasakan kemampuan orang lain. Empati kerap kali dianalogikan sebagai ‘berada di dalam sepatu orang lain’ atau ‘melihat dari mata orang lain’

BAB 11

MARXISME DAN GERAKAN MAHASISWA

A. Makna Sebuah Gerakan

Gerak sejarah perubahan bangsa Indonesia dalam setiap kurun waktu telah menempatkan posisi dan peran mahasiswa selalu saja mampu memainkan posisi strategis dan menentukan, sebagaimana terlihat dalam periodisasi sejarah gerakan mahasiswa dari mulai generasi 1908 s.d. 1998.

Namun demikian, tetap saja gerakan mahasiswa harus dilihat sebagai sebuah refleksi dari kondisi-kondisi sosial, politik dan kekuasaan yang melingkupinya, begitu pula dengan rumusan dari proses pembentukan wacana dominan dan pilihan pola gerakan dalam menyikapi tuntutan perubahan sosial yang ada, beserta segenapuntutannya. Lebih jauh lagi dalam mengkaji korelasi bagaimana wacana dan pola gerakan, beserta tuntutan yang dilakukan oleh mahasiswa menjadi hal yang penting dalam melihat kondisi-

kondisi obyektif dari setiap dinamika yang terjadi pada jaman dimana mahasiswa itu berada, dimana mereka selalu tampil sebagai pencetus dan pelopor. Sebutan yang lahir dari kemampuan mereka untuk mengamati tanda-tanda zaman, sembari mencari jawaban yang tepat sesuai tuntutan zamannya. Karena itulah, kepeloporan senantiasa menjadi benang merah penghubung antara gerakan-gerakan mahasiswa, sebagaimana yang telah dibuktikan oleh sejarah.

Untuk membedah persoalan gerakan mahasiswa, maka menjadi hal yang mendasar untuk memahami makna dasar arti sebuah gerakan. Secara umum gerakan selalu berasosiasi dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk memberikan respon atau reaksi atas kondisi tertentu (realitas sosial) di masyarakat.¹¹³ Yang dimaksud dengan respon atau reaksi terhadap sesuatu keadaan, adalah respon oleh pihak-pihak tertentu dalam masyarakat yang ingin mendorong perubahan. Pihak yang dimaksud di sini tentu bukan individu (perorangan), melainkan kelompok atau suatu group kekuatan tertentu, dalam hal ini kelompok mahasiswa.

Mengingat keadaan di suatu negeri selalu merupakan kondisi di bawah kekuasaan penguasa tertentu, maka gerakan di sini dapat pula bermakna sebagai bentuk perlawanan terhadap penguasa. Sebagai suatu bentuk perlawanan terhadap penguasa (penyelenggara kekuasaan yang despotik dan tidak disukai rakyat), gerakan tidak lain dari kumpulan keinginan untuk mengubah keadaan. Reaksi tersebut tidak mengabdikan kepada hanya sekedar reaksi, melainkan dimaksudkan untuk mengubah kondisi tersebut kepada suatu keadaan baru, yang dipandang lebih baik dan lebih bermakna. Gerakan dapat dipahami sebagai usaha untuk

113 Timur Mahardika, "GERAKAN MASSA, Mengupayakan Demokrasi dan Keadilan Secara Damai," Lepera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2000, hal3

mengubah suatu situasi atau kondisi kepada keadaan baru. Dalam kerangka kehidupan masyarakat, maka gerakan tidak lain dari berbagai upaya yang dimaksudkan untuk mengubah tatanan yang tidak adil, menuju sebuah tatanan baru yang lebih memberi jaminan pada realisasi keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia.

Sepanjang sejarah kehidupan manusia, gerakan timbul tenggelam dengan berbagai argumen atau landasan. Hal ini menunjukkan pula bahwa kenyataan sosial yang ada selalu saja menimbulkan ketidakpuasan, terutama akibat (selalu) termuatnya ketidakadilan dalam tatanan yang ada, yang menjadikan sebagian manusia atau kelompok tidak beruntung, nestapa, tertekan dan termarginalisasi. Karena mahasiswa sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat, karena itu gerakan mahasiswa akan sangat dipengaruhi oleh kondisi-kondisi sosial yang ada.

Dari beberapa pengertian gerakan di atas, terdapat beberapa unsur yang bisa dikatakan sebagai variabel utama konsep gerakan, sebagaimana yang dikonseptualisasikan oleh Timur Mahardika dalam pengertian gerakan, dimana gerakan mahasiswa berada pada salah satu variabel yang diantaranya adalah:

1. Keadaan masa kini yang dipandang buruk, menyimpan ketidakadilan, dan karena itu akan dirubah
2. Keadaan masa depan yang menjadi harapan, dalam hal ini diidentifikasi sebagai suatu keadaan yang lebih baik dan bermakna.
3. Pihak penguasa, rezim, sebagai penanggung jawab keadaan. Tidak bisa dihindari bahwa penguasa pada akhirnya harus menuai perlawanan atas tindakan atau keadaan yang diciptakannya.

4. Pihak yang melawan, yang menjadi kekuatan yang memiliki kepentingan untuk mendorong perubahan.
5. Dinamika konflik antara berbagai kekuatan yang ada.

Untuk memahami apakah itu gerakan atau bukan gerakan pada konteks fenomena gerakan mahasiswa, maka ada empat dimensi untuk mengukur atau menganalisa sebuah fenomena apakah itu sebuah gerakan atau bukan gerakan, yakni:

1. Tingkat adanya kesadaran bersama tentang nasib yang dialami.
2. Tingkat dimana aksi itu bersifat kolektif baik dalam:
3. Lingkup orang yang terlibat;
4. Tingkat koordinasi dan organisasi aksi (sampai kepada titik yang tinggi ketika itu organisasi dengan cara yang kompleks).

Lingkup dimana aksi itu bersifat "*instrumental*" dirancang untuk mencapai sasaran diluar aksi itu sendiri; dan kadar "*ekspresinya*": dilaksanakan karena gratifikasi yang terkandung di dalam aksi itu sendiri.

Tingkat dimana reaksi itu didasarkan secara eksklusif atas kerendahan status sosial, ekonomi dan politik, berlawanan dengan reaksi dimana isu lain ... agama, nasional ... memainkan peranan yang murni dan merdeka.¹¹⁴

Dari keempat aspek ukuran di atas mensyaratkan adanya pembatasan dalam memahami posisi dan peran gerakan mahasiswa dalam kurun generasinya, disamping beberapa aspek sejarah lainnya. Guna memudahkan dalam memahami wacana dominan dan pola gerakan beserta tuntutananya

114 Henry A. Landsberger dan Yu.G. Alekandrov., "*Pengelolaan Petani dan Perubahan Sosial*," CV. Rajawali, Jakarta, 1984, hal. 24-25.

maka menjadi hal yang menarik dalam melihat diskursus Karl Marx dan aliran Marxisme lainnya, sebagai salah satu varian kiblat dalam menawarkan alternatif jalan keluar bagi gerakan mahasiswa dalam melihat problem zamannya.

B. Varian Marxisme

“KARL MARX, *Aku Bukan Marxis*,” judul buku yang ditulis oleh John Molyneux, mungkin telah menjadi kilasan yang mewakili banyaknya varian aliran Marxisme dan klaimnya atas kebenaran dari interpretasinya terhadap ajaran-ajaran Karl Marx oleh beberapa tokoh aliran Marxis, mulai dari interpretasi yang dilakukan oleh Lenin, Stalin, Kautsky, Rosa Luxembour, Hilferding, Gramsci, Tan Malaka, Plekhanov dan banyak lagi generasi-generasi setelah meninggalnya Karl Marx, yang terus mencoba mengaktualisasikan pemikiran-pemikiran Karl Marx pada kontek sejarah perkembangan masyarakat dimasing-masing Negara mereka.

Lenin, Luxembour dan Hilferding mengihtiarakan lanjutan dari pada pemikiran Karl Marx tentang kapitalisme. Mereka mengemukakan ajaran tentang kapital dan imprialisme. Ketiga-tiganya itu mempertahankan, bahwa mereka berbuat seluruhnya dengan menggunakan cara berpikir Karl Marx dan dalam suasana jiwa Karl Marx ketika ia menciptakan Das Kapitalnya. Dengan perkataan lain pandangan serta jiwa Karl Marx yang sungguh serta sempurna. Hanya saja, ketiga-tiganya sampai pada teori-teori yang berbeda. Cara Lenin menerangkan perkembangan kapitalisme sudah meninggalkan Karl Marx. Dia sangat menekankan aspek politis, sedangkan Dilferding dan Luxembour mencoba menyempurnakan teori Marxisme itu tentang kenyataan yang dihadapi secara apa yang dinamakan ilmu ekonomi saja (*rein-economisch*)¹¹⁵

115 Sjahrir., Op cit., Hal. 11.

Ada banyak perbedaan yang bahkan cukup mendasar dari para tokoh pemikir tradisi Marxis. Tidak jarang karena perbedaan diantara tafsir atas pemikiran Karl Marx, sebagaimana dikemukakan oleh John Molyneux, persoalan jauh lebih rumit: bahwa kaum “Marxis” sering saling memenjara, memerangi serta membunuh. Lebih merisaukan lagi, dalam semua konflik sosial banyak kelompok atau tokoh “Marxis” mengambil sikap yang sama sekali bertentangan.¹¹⁶

Dari gambaran perbedaan dan pertarungan internal dari para tokoh tradisi Marxian di atas, kiranya menjadi persoalan yang cukup sulit untuk lebih jauh mengidentifikasi bagaimana relevansi teori-teori Karl Marx, dalam hubungannya dengan penjelasan mengenai gerakan mahasiswa Indonesia khususnya. Karena beberapa perbedaan di atas telah membelah pemikiran-pemikiran awal Karl Marx ke dalam beberapa aliran mazhab. Ada yang dinamakan Revisionis, ada yang disebut reformis dan ada pula yang dinamakan Orthodoxi-Marxis. Dan diantara yang kemudian disebut ini terdapat pula beberapa pendirian, pandangan serta aliran. Ada yang menjadi Leninist, ada yang menjadi austro-Marxist, kemudian ada pula yang menjadi Stalinist, Trotskist, Spartakist, Syndikalist, dsb.

Memahami perbedaan tafsir atau interpretasi terhadap keberadaan pemikiran Karl Marx, hal ini terjadi juga karena di dalam pemikiran Karl Marx sendiri pada periodesasinya mengalami perubahan yang cukup mendasar dalam hal karakteristik, orientasi dan kontekstualisasinya ketika Karl Marx harus berhadapan dengan tuntutan yang mengharuskannya untuk mampu menjawab persoalan yang ada. Pada tahapan ini biasanya para pengikut atau pemerhati

116 John Molyneux., *"Karl Marx, Aku Bukan Marxis,"* Teplok Press, Jakarta, 2000. Hal.2.

pemikiran Karl Marx membagi kedalam dua periodisasi pemikiran Karl Marx, yakni Marx muda dan Marx tua, yang ditandai dengan karakteristik yang berbeda. Marx muda dikenal lebih ilmiah dan intelektualis, penggolongan periodisasi pemikiran Karl Marx ini yang melihat paling radikal adalah yang dilakukan oleh Louis Althusser dalam bukunya 'Pour Marx', yang mengatakan bahwa di antara pemikiran Marx muda dan Marx tua terjadi sebuah "potongan" (*coupure*) tajam, Marx pra-1846 adalah humanis, Marx pasca 1845 anti humanis.¹¹⁷

Yang menjadi inti dari munculnya dikotomi dalam melihat keberadaan Marx muda dan Marx tua sebenarnya terjadi pada konteks melihat antara persoalan kontinuitas dan diskontinuitas. Dikemukakan oleh Magnis Suseno bahwa sebenarnya penggolongan kedalam Marx muda dan Marx tua itu kurang tepat, karena tahap "Marx Tua" pada umumnya dianggap sudah dimasuki Karl Marx dengan *the German Ideologi* yang ditulisnya bersama Engels sekitar tahun 1846, jadi waktu ia baru berumur 28 tahun. Antara gaya berpikir "Marx muda" dan gaya berpikir "Marx tua" jelas ada perbedaan yang cukup mencolok. Tapi apakah hal itu berarti bahwa pemikiran Karl Marx berubah arah atau pemikirannya hanya sekedar berkembang? Gaya khas pikiran Marx muda baru diketahui dalam abad ini. Tulisan-tulisan penting, seperti "*the German Ideologi*" dan terutama '*Naskah-Naskah Paris*' yang ditulisnya pada tahun 1943 (dimana istilah kunci Karl Marx adalah 'keterasingan', istilah yang kemudian menghilang dari perbendaharaan bahasanya) baru diterbitkan dalam abad ini, jauh sesudah Karl Marx meninggal dunia. Marxisme klasik yang mempengaruhi buruh industri Eropa, sebagaimana dikenali dan dikooptasi

117 Magnis Suseno., Op cit, hal. 7-8

oleh Lenin ke dalam ideologi komunisnya, tidak tahu sama sekali tentang gaya berpikir Marx muda itu.

Terlepas dari beberapa perbedaan tafsir atas wacana Karl Marx di atas, untuk tidak terjebak pada klaim terhadap apa yang dikatakan J. Molyneux sebagai pertanyaan terhadap: Mana tradisi Marxis yang sejati? maka upaya mengembalikan dari sifat dasarnya dan kepentingannya perlu dilakukan. “Seperti dalam kehidupan biasa kita membedakan antara apa yang dipikir dan dikatakan seseorang tentang dirinya sendiri dengan watak dan kelakuannya yang sebenarnya, lebih lagi dalam perjuangan sosial kita harus membedakan ungkapan-ungkapan dan khayalan-khayalan semua pihak dari sifat dasar dan kepentingan mereka yang sebenarnya...”¹¹⁸

Dari perbedaan interpretasi terhadap gagasan-gagasan Karl Marx yang terjadi karena beberapa perbedaan dalam melihat dimensi perubahan masyarakat, tetap diletakkan pada semangat awal filsafat berpikir Karl Marx. Dikemukakan oleh Friedrich Engels, Marxisme “*bukanlah sebuah dogma melainkan harus memandu aksi.*” Ditambahkan oleh Trotsky bahwa, “*Pada pokoknya Marxisme adalah metode analisis: bukanlah analisis akan teks-teks saja melainkan terutama akan hubungan sosial.*”¹¹⁹ Sementara itu George Lukacs mencoba memberikan jawaban terhadap pertanyaan tentang apa itu Marxisme? jawabannya: *Marxisme ortodok tidak ... berarti menerima tanpa kritik segala hasil karya penyelidikan Karl Marx. Bukan berarti ‘percaya’ kepada tesis ini atau itu, atau pengkajian semua kitab suci. Sebaliknya, istilah ‘ortodok’ hanya berkenaan dengan masalah metode.*” Karena itu yang terjadi maka apa yang dilakukan oleh Lenin, Che Guevara, Mao Tze Dong, Trotsky, Gramsci, Tan Malaka dan pemikir Marxisme lainnya

118 Ibid., hal . 1

119 Ibid., hal. 4

adalah merupakan sebuah rasionalisasi dari metode yang harus ditetapkan pada konteks sejarah dan realitas sosial dimana mereka melakukan derivasi terhadap pemikiran Karl Marx untuk menjawab persoalan di masing-masing wilayah dimana mereka berada. Bahkan mungkin lebih dari pada sebuah perbedaan metode, untuk tidak mengatakan bahwa diantara klaim tradisi Marxis justru bertolak belakang dari apa yang telah digagas Karl Marx?

C. Posisi Mahasiswa

Kembali kepada Filsafat Materialisme Dialektika dan Historis (MDH) yang menggunakan metode berfikir tesa, antitesa dan sintesa telah menghantarkan Karl Marx pada kesimpulan dimana faktor determinasi ekonomi sebagai intrastruktur yang membangun suprastruktur (hukum, politik, budaya, ideologi dll). Dengan filsafat MDH Karl Marx menarik kesimpulan tentang persoalan kesadaran kelas dan munculnya kelas, sampai dengan perlawanan kelas itu sangat ditentukan oleh keberadaan material dari kelas yang ada.

Kelas proletar melakukan perlawanan terhadap kelas borjuis/kapitalis itu didorong oleh faktor kesadaran terhadap kondisi material, diantara mana kaum buruh (kaum proletar) terdorong untuk melakukan perlawanan terhadap kondisi-kondisi yang dialaminya. Pentingnya persoalan kesadaran terhadap kondisi material dalam hubungannya dengan kaum proletar ini menjadi penting untuk juga melihat apakah gerakan mahasiswa juga melakukan perjuangan atau gerakan juga dipengaruhi oleh hal yang sama? Kalau tidak lalu oleh faktor apa ? Sebagaimana penunjukan kelas pada tahapan masyarakat kapitalis oleh Karl Marx, yang dibaginya dalam dua kelas yang kontradiktif (*vis a vis*), yakni kelas pemilik modal dan kelas pekerja (proletar).

Persoalan umum kelas proletar yang muncul karena pengaruh kondisi materialnya (ekonomi), kemudian melahirkan perjuangan kelas, jelas merupakan hal yang tidak berlaku dalam sektor mahasiswa, ketika mahasiswa melakukan perjuangan atau membangun gerakan. Karena mahasiswa umumnya masih berada pada posisi tergantung kepada '*belas kasihan*' orang tua yang membiayai studinya. Lalu, pertanyaan tentang faktor apa yang mendorong kesadaran mahasiswa? Untuk menjawab persoalan munculnya kesadaran mahasiswa untuk bergerak, ini bisa ditarik pada kondisi kehidupan mahasiswa sebagai insan akademik yang banyak bersentuhan dengan gagasan-gagasan perubahan teoritik dan akses informal yang lebih dibandingkan dengan sektor-sektor rakyat kecil lainnya.

Kelebihan dan sekaligus keuntungan sektor mahasiswa di atas secara langsung telah memberikan kemampuan mereka untuk mampu lebih kritis melihat realitas-realitas kontradiksi persoalan yang terjadi. Munculnya kesadaran mahasiswa untuk terlibat dalam gerakan-gerakan perlawanan terhadap beberapa problem yang terjadi, kalau ditarik kesimpulannya adalah ketika mahasiswa tidak menemukan kondisi antara apa yang dipelajari, dan apa yang terlihat atau terjadi di sekelilingnya. Kata "*Ídealisme*" menjadi kata yang mewakili guna menggambarkan, bagaimana mahasiswa tergerak untuk terlibat dalam persoalan-persoalan politik, sosial ekonomi dan budaya, yang tidak sebatas pada ruang lingkup kelompoknya, guna melakukan perubahan pada kondisi atau situasi yang dilihatnya menyimpang atau menyeleweng dari konsep idealisasi mahasiswa, sebagai insan akademis.

Kata idealisme pada konteks gerakan mahasiswa, tidak diartikan labih jauh pada makna aliran pemikiran filsafat,

sebagaimana gagasan dan pemikiran Hegel serta aliran-aliran idealis lainnya, akan tetapi idealisme dalam kaitannya dengan gerakan mahasiswa diartikan dalam tataran praksis, untuk menggambarkan suatu kondisi dimana mahasiswa sebagai salah satu kekuatan perlawanan terhadap kondisi-kondisi penindasan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa atau rezim yang ada. Dengan berlandaskan kepada sebuah konsepsi pemahaman terhadap idealisasi teoritik persoalan yang ada dan sedang terjadi.

Mahasiswa mempunyai dua bentuk sumber daya yang menjadi tenaga pendorong bagi mereka untuk melibatkan diri di dalam proses politik. *Pertama* ialah, ilmu pengetahuan. Kombinasi diantara watak ilmiah yaitu kritis-obyektif dengan pengetahuan yang sistematis tentang masalah yang menjadi bidang spesialisasinya, mendorong mahasiswa untuk mengadakan penilaian dan menentukan sikap tentang kehidupan politik yang mengelilinginya. *Kedua* ialah, sikap idealisme yang lazimnya menjadi ciri mahasiswa. Sebagai unsur masyarakat yang masih bebas dari ikatan struktur kekuasaan, mereka lepas dari kungkungan kepentingan-kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Kombinasi diantara kebebasan struktur itu dengan pengetahuan dan pemahaman mereka akan cita-cita, ide atau pikiran politik dan kemasyarakatan yang tertuang di dalam ideologinya, memungkinkan mahasiswa untuk mempunyai sikap idealisme.¹²⁰

Dalam konteks pemikiran Karl Marx, posisi mahasiswa bukanlah sebuah kekuatan yang terdorong untuk melakukan perjuangan atau perlawanan karena terdorong oleh kondisi-

120 Arbi Sanit., "*Pengelolaan Melawan Kekuasaan, Gerakan Mahasiswa Antara Aksi Moral dan Politik*," Pustaka Pelajar dan Insist Press, Yogyakarta, 1999, hal. 36-27

kondisi kesadaran material ekonomi, karena mahasiswa merupakan kelompok atau sektor yang tidak memiliki basis material ekonomi, sebagaimana sektor buruh dan sektor rakyat lainnya. Untuk memahami keberadaan mahasiswa dalam konteks perjuangan kelas ini, akan lebih tepat kalau sektor mahasiswa diposisikan sebagaimana definisi kelas yang dikembangkan oleh Hans Dieter Evers dan Tillman Schiel, yang memberikan tafsir baru terhadap kelas dengan pengertian *'kelompok strategis'*, meskipun banyak ilmuwan sosial curiga, jangan-jangan istilah kelompok strategis dari Evers dan Schiel ini hanya kamufase dari istilah kelas yang sudah duluan dicanangkan oleh Karl Marx.¹²¹

Lebih jauh membedah keberadaan sektor mahasiswa dalam relasinya dengan perjuangan kelas dari perspektif Karl Marx, maka jelas keberadaan sektor mahasiswa bukanlah merupakan kelas tersendiri dalam memainkan posisi dan perannya. Akan tetapi menjadi menarik ketika Poulantzas mengembangkan definisi kelas yang lebih transparan dan pluralis, dalam melihat keberadaan mahasiswa. Poulantzas mengartikan konsepsi kelas sebagai *suatu terminologi dimana yang terpenting bukan pemilikan alat-alat produksi, akan tetapi akses seseorang kepada sumber-sumber kekuasaan, seperti kekayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dsb.*¹²²

Kalau meminjam definisi kelas yang digunakan oleh Poulantzas di atas, maka mahasiswa kemudian menjadi kelas tersendiri yang dimasukkan ke dalam kelas menengah. Dalam sejarah Indonesia, kelas mahasiswa memang muncul sebagai akibat dari ketika penjajah Belanda membutuhkan tenaga-tenaga administrasi dari penduduk pribumi guna menangani daerah jajahan di Indonesia yang semakin luas.

121 Happy Bone Zulkarnaen, Faisal Siagian, Laode Ida, (Editor)., Op Cit Hal. 11.

122 Op Cit., hal 11.

Szyamanski menjelaskan lebih rinci lagi tentang kemunculan kelas menengah, yang disebabkan karena tingkat pendidikan yang mereka tempuh (Ir, S.Pd, ME, SH, Ph.D, MBA). Mereka menjadi profesional dibidangnya. Inilah yang benar-benar dapat dikategorikan sebagai kelas menengah baru Indonesia. Mereka termasuk kelas menengah baru, karena: *pertama*, ia mempunyai akses yang besar terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, *kedua*, kelas menengah baru ini termasuk kaum intelektual yang mempunyai konsep dan pemikiran yang benar-benar modern, *ketiga*, kelas menengah baru ini mempunyai kecerdikan dalam merambah akses kepada kekuasaan, dan mereka melakukan apropriasi terhadap kelas-kelas lain dalam masyarakat.¹²³

Karl Marx tidak menghitung kekuatan mahasiswa sebagai salah satu kekuatan inti pendorong perubahan pada kondisi-kondisi penindasan yang muncul pada masyarakat kapitalis, selain dari kekuatan kaum buruh (kaum proletar). Lalu, bagaimana menjelaskan keberadaan sektor mahasiswa dalam konteks pemikiran Karl Marx, ketika mahasiswa dalam beberapa kurun sejarah telah juga membuktikan eksistensi dirinya sebagai salah satu kekuatan strategis, terutama pada Negara-negara dunia ketiga atau sedang berkembang, dalam melakukan perjuangan terhadap realitas-realitas penindasan yang dilakukan oleh para kapitalis dan para penguasa di masing-masing Negara yang ada?

Kalaupun memasukkan mahasiswa sebagai bagian dari kelas yang ada, maka ia akan selalu berada pada dua posisi kelas yang kontradiktif. Pada konteks Negara kapitalisme, maka jelas mahasiswa kalau digolongkan kedalam kelas berpendidikan dan Sarjana, ia akan masuk kedalam kelas Borjuis.

123 Op Cit., hal 16.

Untuk memahami bagaimana posisi dan peran mahasiswa dalam hubungannya dengan perjuangan kaum buruh (proletar), ketika berhadapan dengan para borjuis/kapitalis, hal ini bisa dipahami dari apa yang dilontarkan oleh Ernest Mandels seorang Marxist dari Belgia, yang berpendapat bahwa kebutuhan kapitalisme saat ini akan tenaga kerja yang terlatih dalam jumlah besar merangsang ekspansi universitas yang cepat dan menghasilkan ‘*proletarianisasi*’ tenaga intelektual, yang tunduk kepada tuntutan-tuntutan kapitalis dan tidak berhubungan dengan bakat perorangan atau kebutuhan manusia. Makin terasingnya tenaga kerja intelektual ini sedikit banyak menggerakkan perlawanan mahasiswa, walaupun tidak menduduki posisi sebagai pelopor kelas buruh, dapat menjadi picu peledak di dalam masyarakat luas. Menurutnya mahasiswa memiliki kewajiban menerjemahkan pengetahuan teoritis, yang mereka peroleh di perguruan tinggi kedalam kritik-kritik yang radikal terhadap keadaan masyarakat sekarang dan tentunya relevan dengan kebutuhan penduduk. Mahasiswa harus berjuang di dalam perguruan tinggi dan dibalik itu untuk masyarakat yang menempatkan pendidikan untuk rakyat di depan penumpukan barang.¹²⁴

Pemikiran Karl Marx yang dilandasi pada analisis determinasi ekonomi yang memunculkan kondisi sosial dimana kelas itu terbagi pada dua kelas yang kontradiktif yakni kelas pemilik modal (borjuis/kapitalis) dan kelas proletar. Perkembangan sejarah kemudian diwarnai oleh pertentangan antar kelas, dimana inti kekuatan yang akan merubah sejarah menurut Karl Marx adalah kelas buruh (kaum proletar).

124 Ernest Mandels., dalam pidatonya tentang “*Gerakan Mahasiswa Revolusioner: Teori dan Praktek*,” yang disampaikan pada acara perayaan 70 tahun Universitas Leiden Belanda pada tahun 1970.

Sekalipun kemudian sejarah dunia mencatat posisi dan peran mahasiswa telah mampu membuktikan dirinya sebagai agen perubahan. Mahasiswa telah membuktikan dirinya sebagai salah satu kekuatan penghancur *establishment* sebuah pemerintahan yang menyimpang. Sejarah mencatat beberapa peristiwa, seperti penggulingan Juan Peron pada 1955 di Argentina, Perez Jimenez pada 1958 di Venezuela, Soekarno pada 1966 di Indonesia, jatuhnya Ayub Khan pada 1969 di Pakistan, dan sejarah spektakuler serta dramatis ketika gerakan mahasiswa 1998 di Indonesia berhasil meruntuhkan kekuasaan rezim '*untochable*' Soeharto yang berkuasa selama kurang lebih 32 tahun.

Kalau menggunakan analisis kelas Karl Marx dalam membedah keberadaan mahasiswa, maka gambaran posisi mahasiswa dalam struktur sosial secara sederhana akan berada pada posisi diantara kelas atas dan kelas bawah (kelas borjuis kapitalis dan kelas proletar). Mahasiswa tidak memiliki basis material sebagaimana sektor buruh, petani dan sektor rakyat kecil lainnya, bersamaan dengan itu mahasiswa juga tidak memiliki alat produksi sebagaimana kelas borjuis kapitalis. Posisi mahasiswa yang berada pada dua posisi kelas ini ternyata telah memberikan posisi strategis bagi mereka untuk senantiasa mampu bersuara jernih dan kritis dalam melihat dan bergerak pada kondisi-kondisi dimana ia harus memainkan posisi dan perannya. Akan tetapi posisi mahasiswa ini secara sosiologis juga tidak jarang melahirkan posisi yang ambiguitas, karena secara posisi kelas mahasiswa di beberapa Negara sebagaimana Indonesia, mahasiswa merupakan kelas elit yang dilahirkan dari kelas menengah ke atas, hal ini kemudian terkadang memunculkan ketidak konsistenan mahasiswa dalam menyuarkan keberpihakannya.

Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana konsistensi gerakan mahasiswa itu dalam memainkan posisi strategisnya dan konsistensi keberpihakannya, maka menjadi penting untuk melihat bagaimana mahasiswa membangun gerakan perjuangannya, ketika Karl Marx membangun analisis bahwa kontradiksi kelas itu terjadi tatkala kaum buruh dan kaum proletar lainnya memiliki kesadaran terhadap kondisi penindasan dan eksploitasi terhadap basis materialnya, dan terjadinya kondisi ketidakadilan dalam penguasaan *mode of production* antar kelas. Terlepas dari beberapa diskursus di atas, bahwa yang harus dicatat dalam kerangka memahami munculnya gerakan mahasiswa yang harus dicatat dalam kerangka memahami munculnya gerakan mahasiswa adalah bukanlah sebuah hal yang ahistoris dalam refleksi sejarah pergerakan mahasiswa terutama yang membentuk kesadaran IV dan PI pada masa awal kemunculannya di negeri Belanda akan arti dijajah, merupakan cermin bagaimana kontradiksi idealisme kesadaran pada kondisi Indonesia adalah tanah jajahan, itu muncul dari terinspirasi mahasiswa Indonesia terhadap gagasan Karl Marx tentang eksploitasi dan ekspansionisme yang dilakukan oleh negara-negara kapitalis Eropa waktu itu kepada negara-negara jajahannya.

Ernest Mandels mencoba menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya perlawanan mahasiswa khususnya yang terjadi di beberapa Negara Eropa Barat, dengan tetap berpijak pada analisis Karl Marx tentang faktor material-ekonomi sebagai penyebab munculnya perlawanan kaum buruh. Menurutnya, alasan-alasan perlawanan itu secara mendasar bersifat material. Bukan berarti bahwa kondisi hidup mereka tidak memuaskan, mereka bukan diperlakukan sebagaimana buruh pada abad XIX. Tapi karena secara sosial

kita menciptakan sejenis proletariat di perguruan tinggi yang tidak berhak berpartisipasi dalam menentukan kurikulum, serta tidak berhak setidaknya untuk ikut menentukan kehidupan mereka sendiri selama empat, lima, atau enam tahun mereka habiskan di perguruan tinggi.

BAB 12

GERAKAN MAHASISWA DAN IDEOLOGI

Dalam artian luas, ideologi berisi tatanan nilai yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai pedoman untuk kehidupan bersama dalam rangka meraih harapan-harapan mereka. Tatanan nilai tersebut berasal dari tradisi atau adat-istiadat dan dapat pula bersumber dari ajaran agama.

Pengertian ideologi secara khusus, mengacu pada perangkat cita-cita tentang kehidupan masyarakat dengan Negara yang tersusun secara alamiah atau dirancang secara sistematis dalam rangka memenuhi kebutuhan segenap warganya. Agama yang diideologikan, seperti halnya Demokrasi, Nasionalisme dan Liberalisme, termasuk kedalam ideologi yang tersusun secara alamiah karena proses pembentukannya terjadi secara berangsur dan tanpa melalui prosedur yang diatur secara ketat. Sedangkan ideologi seperti Marxisme, Komunisme, dan Marhaenisme termasuk ideologi yang dirancang secara sistematis oleh pencipta atau penggagasnya.

Ideologi yang didasarkan pada agama, menggambarkan susunan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang dicita-citakan, dalam keterkaitan diantara hubungan kekuasaan sesama manusia di dalam masyarakatnya dengan pengabdianya kepada Tuhan sebagai penguasa tertinggi. Sedangkan ideologi sekuler menawarkan tatanan masyarakat dan Negara ideal yang sepenuhnya didasarkan kepada pemikiran tentang hubungan manusia di dalam masyarakat. Ideologi sekuler tidak memasukkan hubungan kekuasaan diantara Tuhan dan manusia sebagai landasan susunan kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang dianjurkan.

Karena ideologi merupakan suatu gambaran tentang masyarakat dan Negara yang dicita-citakan, dengan sendirinya ideologi berfungsi sebagai pengarah bagi kehidupan masyarakat di dalam Negara. Tapi sudah barang tentu keberhasilan ideologi dalam rangka fungsi utamanya itu, tergantung kepada penerimaan masyarakat luas dan penguasaan terhadapnya. Akan tetapi tidak jarang dalam sejarah fungsi ideologi ini diberlakukan dengan cara-cara kekerasan oleh penguasa demi tercapainya kepentingan - kepentingan politik kekuasaannya.

Ideologi memang hanyalah salah satu faktor yang ikut menentukan corak proses dan arah kehidupan politik dan kemasyarakatan suatu bangsa. Akan tetapi lebih jauh dalam memahami proses perubahan gerakan mahasiswa bagaimanapun faktor pergeseran fokus perannya dan setiap even kesejahteraan menjadikan persoalan fungsi ideologi menjadi penting untuk ditelaah, baik itu menyangkut kehidupan Ideologi mahasiswa itu sendiri, ataupun ideologi Negara dan kekuasaan yang melingkupi keberadaan mahasiswa.

Sekalipun mahasiswa bukanlah pelopor ideologi utama di dalam masyarakat Indonesia, tapi sejarah telah membuktikan bahwa peran mereka di dalam kepeloporan itu pernah ada. Tiga periode dimana mahasiswa terlihat berada dalam kelompok ideologi pelopor ialah dimasa awal perjuangan kemerdekaan yaitu pertama di antara tahun 1910-an sampai 1930-an. Ketika itu mahasiswa tampil sebagai pencetus dan penggagas ideologi yang kemudian mewarnai pemikiran politik sampai sekarang. Dan kedua ialah di awal Orde Baru yaitu diantara tahun 1965 - 1978. Dan ketiga adalah ketika Orde Baru runtuh sebagai penguasa.¹²⁵

Sekalipun jenis ideologi yang dikembangkan oleh mahasiswa di ketiga periode itu berbeda, yaitu ideologi untuk mengisi kemerdekaan serta ideologi untuk demokrasi dalam periode terakhir namun ketiganya berada pada satu garis pemikiran. Mahasiswa dalam ketiga periode ini berfikir atas landasan nasionalisme, perlindungan HAM dan pemerintahan yang bersih baik secara politik maupun ekonomi.

Latar belakang kondisi sosial yang digambarkan oleh ketidakbebasan dari kemiskinan atau ketimpangan sosial, serta berbagai bentuk ketergantungan kepada bangsa asing, merupakan perangsang bagi tumbuhnya mahasiswa ideologi yang berupaya menemukan langkah-langkah alternatif. Keterikatan mereka terhadap permasalahan masyarakat luas, biasanya dilatari oleh keterkaitan mereka terhadap struktur masyarakat luas tersebut yang berkombinasi dengan kelaziman berfikir bebas dan menantang problema sebagai bagian dari kebiasaan di dunia pendidikan. Mahasiswa sebagai warga dari lapisan menengah berpandangan jeli

125 Arbi Sanit., *Op Cit*, hal. 52

terhadap sistem kekuasaan yang dibangun oleh lapisan atas sambil memahami dan merasakan penderitaan lapisan bawah. Malah tidak jarang tokoh mahasiswa berasal dari lapisan bawah itu sendiri.

Keterlibatan mahasiswa dalam upaya mewujudkan cita-cita ideologinya tidak jarang memang harus berhadapan dengan pemilik ideologi yang lebih besar yakni penguasa Negara yang tidak jarang merasa terusik dan terganggu kepentingan-kepentingan kekuasaannya, dan karena itu kemudian melakukan peredaman dengan berbagai cara, baik dengan cara-cara yang halus, sampai dengan cara-cara kekerasan. Tindakan kekerasan yang dialami oleh mahasiswa ini, menghadapkan mahasiswa pada beberapa kondisi dilematis, seperti yang pernah dipraktekkan oleh rezim Orde Baru selama 32 masa berkuasanya. Mahasiswa berada pada dua pilihan yang tidak mengenakkan.

Pertama: mahasiswa akan menguncurkan diri ke “*dunia dalam*” (inner world), yang bersifat subyektif dan sangat pribadi. Mereka cenderung memalingkan diri dari dunia luar (pragmatis) kepada sumber daya pribadi dengan memberikan penilaian sangat subyektif atas semua peristiwa di sekelilingnya. Pilihan ini memiliki asumsi, dirinya menjadi pusat dari semua makna hidup. Sebagai kompensasi logis dapat disaksikan terutama dalam hal etos kerja keras dan produktivitas. Kendati demikian, kecenderungan utama tampak dalam apa yang di dunia barat pernah dikenal sebagai budaya “*hippies*,” dan penyebarannya ke seluruh dunia sebagai “*drug and music culture*,” yang cenderung sangat, meminjam istilah Nasikun (1995), apokaliptik, ekspresif, anti segala yang serba formal, dan hedonistik, melenyapkan semangat idealisme di bawah bayang-bayang pragmatisme, yang menurutnya sangat menjanjikan. Inheren

dengan merosotnya peran ideal yang dimilikinya, Orde Baru telah membentuk penampilan mahasiswa lebih jaga jarak dengan aktivitas politik dan bertindak pasif. Kepasifan manusia seperti ini, sebagaimana dijelaskan Fromm (1996) merupakan salah satu simptom dari seluruh sindrom yang sering disebut “*sindrom keterasingan*.” Menjadi pasif artinya, dia tidak menghubungkan dirinya dengan dunia secara aktif dan dipaksa untuk tunduk kepada berhala-berhala.¹²⁶ Fenomena keterasingan mahasiswa ini sebagai sebuah paralelisme sebagaimana Karl Marx membahas masalah keterasingan yang dialami oleh kaum buruh dalam proses produksi pada sistem kapitalisme, sekalipun bentuk outputnya tidak harus sama. Lebih lanjut implikasinya bagi gerakan mahasiswa, maka sudah dapat diprediksikan bahkan gerakan mahasiswa akan mengalami kemerosotan, sebagaimana diungkapkan Daniel Levy, kondisi politik di suatu Negara Dunia Ketiga dapat saja mengubah lingkup dan implikasi keterlibatan politik mahasiswa. Misalnya, kediktatoran militer Amerika Latin dan di Asia seperti Korea Selatan dan Thailand merupakan contoh dimana rezim melakukan represif secara keras terhadap gerakan mahasiswa, mengakibatkan menurunnya gerakan mahasiswa.

Kedua: mahasiswa keluar dari “*dunia dalam*” dan memberontak terhadap setiap manifestasi sosial politik. Aktualisasi dapat ditemukan dalam bentuk gerakan anti status quo, gerakan anti kapitalisme, gerakan feminis, berupa kelompok-kelompok studi sampai gerakan mahasiswa radikal. Baik berkaitan dengan masalah ekonomi, sosial, maupun politik. Kesadaran mahasiswa berpijak dari keberadaannya di perguruan tinggi atau dengan bacaan-bacaan dari berbagai literatur politik, diasumsikan memiliki kebebasan intelektual,

126 Arie Sujito., Op cit, hal. 174-175

sehingga mereka dapat melakukan tindakan analisis terhadap beberapa kondisi kemasyarakatan, terutama dikaitkan dengan nilai-nilai idealistik yang telah mereka dapatkan. Struktur ini menumbuhkan sikap kritis mahasiswa dalam memandang persoalan - persoalan bangsanya, merumuskan gagasan atau tuntutan-tuntutan dan ketetapan menempatkan diri dalam kancah kehidupan politik. Mahasiswa kemudian menarik kesimpulan mengenai langkah selanjutnya yang harus diambil untuk menghapus diskrepansi antara idealitas dan realitas.

Tindakan dan aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh aparat Negara yang telah menjadikan polarisasi perilaku mahasiswa ke dalam dua kecenderungan pilihan sikap di atas diperparah juga oleh tuntutan modernisasi yang merasuk melalui wilayah pendidikan secara hegemonik. Ia bukan semata menjadi jalur mobilitas sosial, namun juga menjadi ancaman tersendiri oleh munculnya marginalisasi dan proletarisasi mahasiswa.

Polarisasi perilaku mahasiswa yang disebabkan oleh tekanan-tekanan khususnya yang dilakukan oleh penguasa Orde Baru tidak kemudian menyurutkan gerakan mahasiswa untuk terus mencari alternatif pilihan dalam membangun gerakan perlawanan. Sejarah masa lalu telah menjadi inspirasi dan alasan perubahan pendekatan dari elitisme ke populisme, dengan lebih beraliansi mahasiswa-rakyat. Model-model gerakan populis kritis bukan semata karena realitas struktur politik makro yang berkembang, termasuk pula belajar dari kegagalan sejarah, namun juga sangat dipengaruhi oleh merebaknya literatur-literatur kritis oleh basis-basis teori kiri Marxisme, yang masuk secara pesat ke Indonesia. Wawasan kritis ini menjadi menu pada pertengahan 80-an sampai dengan era 90-an. Berdaya pikat

luar biasa bagi kaum aktivis muda gerakan mahasiswa. Suasana semangat yang dimulai di lingkungan kelompok-kelompok studi telah terbawa terus sampai dengan era 90-an.

Pilihan wacana kritis gerakan mahasiswa era 90-an menghantarkan mahasiswa pada pola-pola gerakan populis dengan isu-isu kerakyatan yang kental, memang tidak hanya muncul dari wacana-wacana teori kiri marxisme, jika merujuk kepada abstraksi yang dirumuskan oleh Uhlin (1998), gerakan mahasiswa yang berlangsung disepanjang 1990-an, khususnya sebelum '98 dapat dikategorisasikan kedalam empat kelompok utama: pertama, wacana radikal melalui bentuk-bentuk demokratis partisipatoris yang berorientasi kemasyarakatan. Wacana ini didalamnya kaum Marxis, populis kiri dan feminis. Kedua, kelompok liberal berfokus pada hak-hak individu dengan ekonomi pasar sebagai titik pijak. Wacana ini dapat dijabarkan kedalam demokratis sosial, liberal politis, dan liberal ekonomis. Ketiga, wacana konservatif yang meletakkan aturan dan standar normatif hukum sesuai dengan UUD 1945. Wacana ini secara umum tidak kompromis atas reformasi sosio-ekonomi mendasar. Keempat, wacana demokrasi yang dengan dilandasi nilai-nilai semangat Islam yang dialaminya terdiri dari wacana modernis, neomodernis serta transformis.

Kendati pemilihan ini dapat memberikan gambaran dan penjelasan peta ideologi gerakan pro demokrasi secara umum, namun demikian pada level praksis pemilihan ideologi ini masih bersifat problematik. Karena kenyataan praksisnya setiap organisasi gerakan maupun oposisi individual pro demokrasi terdapat interaksi yang bersifat longgar, yang ini terjadi dengan cepat dalam setiap kesempatan. Tidak heran koalisi antar gerakan menjadi berpeluang muncul kendatipun secara ideologis kadangkala dapat dikategorikan diametral.

Dalam kaitan kecenderungan itu semua Uhlin juga memberikan argumen bahwa dalam faktanya wacana dan aktor tidak selalu saling berkait secara langsung. Satu wacana yang digunakan oleh beberapa aktor berbeda, dan satu aktor bisa menggunakan lebih dari satu wacana. Dengan seperti itu perspektif yang dimaksudkan tidak membatasi gerakan itu sendiri. Ini sangat nampak mewarnai dinamika gerakan pro demokrasi Indonesia, khususnya gerakan mahasiswa, dimana aktivis mahasiswa mampu melintasi bayang-bayang ideologi yang sudah ada.

BAB 13

PEMIKIRAN KARL MARX DALAM GERAKAN MAHASISWA

Saat ini terlihat ada kecenderungan gerakan mahasiswa menggunakan pemikiran dan gagasan Karl Marx sebagai wacana analisis terhadap persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan. Wacana dominan dari pemikiran Karl Marx, yang digunakan oleh gerakan mahasiswa bergerak pada pokok-pokok persoalan di bawah ini:

1. Filsafat Karl Marx, yakni Materialisme Dialektika Historis (MDH).
2. Bidang Ekonomi dan Politik yang berkaitan dengan Determinisme Ekonomi (mode of production) dan over value.
3. Pembacaan atas masyarakat, yang berkaitan dengan analisa struktur masyarakat.

Pokok-pokok pemikiran Karl Marx yang digunakan oleh gerakan mahasiswa, sebagaimana yang dijabarkan di atas, telah mengalami beberapa revisi serta kontekstualisasi dari

sejarah dan realitas struktur masyarakat Indonesia relatif berbeda dengan masyarakat Eropa, dimana Karl Marx membangun gagasannya.

Mahasiswa memang bukan termasuk kedalam kelas sebagaimana kelas yang dikonsepsikan Karl Marx, karena *pertama*, mereka tidak menjadi bagian dalam proses produksi, dan *kedua*, jelas mahasiswa itu tidak memiliki basis material sebagaimana kelas buruh (proletar) lainnya, sehingga kalau kemudian melihat posisi mahasiswa dari perspektif Karl Marx dalam proses perubahan sosial masyarakat, maka mahasiswa bukan menjadi kekuatan inti perubahan.

Disadari betul posisi mahasiswa dalam melakukan perubahan, bahwa mahasiswa memang bukan sebagai kekuatan inti perubahan sebagaimana pemikiran Karl Marx, akan tetapi mahasiswa dengan posisi yang dimilikinya merupakan pelopor perubahan. Hal ini bisa terjadi karena mahasiswa memiliki kelebihan dibandingkan kelas buruh dan proletar lainnya, dalam kaitan mahasiswa sebagai insan akademis, yang secara kultural mereka mendapatkan kelebihan dalam melakukan kajian-kajian keilmuan dan akses informasi yang lebih, sehingga memungkinkan mahasiswa menjadi pelopor dalam proses perubahan.

Pada tahapan inilah mahasiswa menjadi kelompok yang diuntungkan, karena mereka kemudian menjadi kelompok strategis dalam menyoal kondisi Negara dan realitas masyarakat yang ada di sekelilingnya. Sejarah gerakan mahasiswa Indonesia telah membuktikan posisi mahasiswa sebagai pelopor dan kekuatan strategis dalam setiap sejarah perubahan sosial dan politik, sekalipun mahasiswa tidak selalu dapat memainkan posisi strategis dan kepeloporannya.

Kecenderungan wacana, pola gerakan dan isu yang dimainkan oleh gerakan mahasiswa dalam kaitannya dengan

pemikiran Karl Marx, tentu bukan sebuah generalisasi terhadap realitas gerakan mahasiswa Indonesia, tapi minimal menjadi benang merah untuk menunjukkan pengaruh pemikiran Karl Marx terhadap gerakan mahasiswa. Karena dalam perjalanan sejarah gerakan mahasiswa, selalu saja gerakan mahasiswa terbagi kedalam kekuatan-kekuatan yang dilandaskan pada gerakan agama, nasionalis dan radikal kiri. Berkaitan dengan wacana yang mempengaruhi, sebagaimana studi yang dilakukan oleh Uhlin (1998), bahwa wacana yang mewarnai gerakan mahasiswa khususnya gerakan mahasiswa 1990-an dilandaskan kepada 4 (empat) varian wacana, yaitu:

1. Wacana radikal kiri
2. Wacana liberal
3. Wacana konservatif
4. Dan wacana agama

Landasan varian wacana gerakan mahasiswa di atas merupakan refleksi yang terlahir dari kekuatan-kekuatan yang mewarnai gerakan mahasiswa di sepanjang perjalanan sejarah gerakan mahasiswa Indonesia, seperti kekuatan kiri Marxis, nasionalis liberal dan agama, hal ini juga bisa dilihat dari bentuk-bentuk organisasi kemahasiswaan yang ada.

Penarikan kecenderungan pemikiran Karl Marx terhadap gerakan mahasiswa merupakan juga penarikan dari perkembangan tradisi-tradisi pemikiran kaum Marxis, karena pada tahapan tertentu gerakan tidak sepenuhnya memiliki kesadaran dan kemampuan dalam melakukan derivasi terhadap pemikiran Karl Marx, tanpa melalui kajian-kajian diseperti varian Marxisme, seperti apa yang dilakukan Lenin, Stalin, Mao Tze Dong, Che Guevara, Gramsci, Trotsky, dan kelompok tradisi pemikir Marxisme lainnya.

Bagaimana pengaruh dan varian Marxisme terhadap wacana gerakan mahasiswa misalnya, salah satu yang cukup dominan memperlihatkan itu adalah dalam wacana hegemoninya Gramsci, fase transisi dari keberadaan negaranya Lenin, dan strategi perjuangan parlementerinya Karl Kautsky, serta beberapa varian Marxis lainnya.

Pilihan strategi perjuangan gerakan mahasiswa disatu sisi memang sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik dan kekuasaan yang sedang berlangsung, sekalipun sampai dengan gerakan mahasiswa '98 strategi gerakan mahasiswa banyak memilih pola gerakan ekstra parlementarian, kecuali gerakan mahasiswa '66 yang dalam perkembangannya gerakannya banyak tokoh-tokohnya memilih jalan dengan masuk menjadi anggota parlemen.

Dalam perjalanan sejarah organisasi gerakan mahasiswa, memperlihatkan dua bentuk organisasi yang dalam kurun tertentu terjadi pasang surut kekuatan dari dua bentuk organisasi gerakan mahasiswa, yakni organisasi intra kampus (DEMA, SMPT dll) dan ekstra kampus (HMI, PMKRI, PMII, IMM, dll).

Terlepas dari varian kekuatan gerakan mahasiswa di atas, kembali kepada pengaruh pemikiran Karl Marx sebagai salah satu tokoh sosiologi klasik dalam hubungannya dengan gerakan mahasiswa, telah memperlihatkan sebuah garis sejarah yang menghubungkan antara generasi awal gerakan mahasiswa dan generasi terkini. Kaitannya dengan pergulatan mahasiswa dalam mencari ideologi alternatif yang mampu menjawab problematik periode gerakan mahasiswa ketika harus berhadapan dengan tantangan zamannya dimana mereka dituntut untuk mampu menjawabnya, sebagaimana diperlihatkan oleh Hatta dan kawan-kawannya pada sejarah gerakan mahasiswa, ketika mulai bersentuhan

dengan wacana kiri Marxis dan generasi 1989 yang telah merasakan berhadapan dengan represifitas kekuasaan Orde Baru yang hegemonik dan militeristik. Hal itu menuntut gerakan mahasiswa untuk mampu melakukan antithesis terhadap hegemonisasi dengan mencari tesis yang mampu menjadi alternatif. Nampaknya gerakan mahasiswa 1989 masih melihat pemikiran Karl Marx menjadi salah satu pilihan alternatif untuk menjawab praktik penindasan yang dilakukan oleh rezim Soeharto selama 32 tahun masa kekuasannya, yang didukung oleh kekuatan bersenjata tentara, partai politik (Golkar), kekuatan birokrasi dan kekuatan dana dari kroninya di bidang ekonomi.

BAB 14

EPILOG

GERAKAN MAHASISWA

Untuk menjelaskan fenomena gerakan mahasiswa dan latar belakang wacana yang mempengaruhi gerakan mahasiswa dalam merumuskan isu dan pola gerakan, ada sisi yang tidak bisa sepenuhnya dijelaskan oleh pemikiran Karl Marx, seperti ketika mahasiswa tidak masuk sebagai salah satu kelas sebagaimana diindikasikan oleh Karl Marx, lalu faktor-faktor apa saja yang mendorong mahasiswa untuk mendefinisikan gerakannya.

Menjelaskan faktor pendorong munculnya gerakan mahasiswa, dan kemudian membangun gerakan-gerakan aliansi dengan kelas proletar lainnya menunjukkan terjadinya sebuah proses identifikasi diri dan pada perkembangan selanjutnya telah memunculkan ikatan-ikatan solidaritas antar sektor.

Pada tahapan penjelasan terhadap fenomena terbangunnya ikatan-ikatan solidaritas ini menjadi menarik

untuk menghubungkan munculnya solidaritas yang dikemukakan oleh Emile Durkheim kedalam dua bentuk solidaritas, yakni solidaritas mekanik dan organik.

Menjelaskan keberanian dan pengorbanan mahasiswa dalam melakukan perlawanan terhadap suatu rejim sampai harus mengorbankan nyawanya, menjadi sebuah indikasi bahwa mahasiswa telah melakukan sebuah identifikasi diri sebagai bagian dari orang yang sadar terhadap kondisi bangsa dan menuntutnya untuk bicara dan berbuat, yang dianggapnya sebagai sebuah keharusan untuk dilakukan, tanpa ada prasyarat yang melatar belakangi kemunculannya. Artinya kemunculannya itu menjadi sangat mekanik, sebagaimana yang dianalogikan oleh Durkheim dengan Jamaah Gereja yang terjadi bukan karena harapan ekonomi, atau kalau dalam bahasa Karl Marx karena persoalan basis material, akan tetapi muncul secara tidak langsung sebagai akibat dari kontak sosial yang terbangun sebelumnya.

Jelas bahwa mahasiswa adalah anak sejati rakyat yang lahir dari kondisi masyarakat, proses kontak sosial menjadi hal yang tak terhindarkan, sadar ataupun tidak untuk terjadi. Ikatan mekanik menurut Durkheim memiliki ikatan utamanya adalah kepercayaan bersama, cita-cita dan komitmen moral. Orang yang sama-sama memiliki kepercayaan dan cita-cita ini merasa bahwa mereka mestinya bersama-sama karena mereka berpikiran serupa.

Refleksi dari kegagalan gerakan mahasiswa sebelumnya yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa '90-an, menjadi titik tolak bahwa diperlukan sebuah aliansi atau gerakan populis dalam melakukan sebuah perlawanan. Gerakan mahasiswa '90-an menyadari benar bahwa kekuasaan yang akan dilawan memiliki kekuatan yang represif dan hegemonik yang tidak mungkin dikalahkan kalau hanya

mengandalkan kekuatan sektor mahasiswa, karena itu bagaimanapun gerakan mahasiswa membutuhkan sebuah kekuatan aliansi dengan sektor-sektor rakyat lainnya, gerakan mahasiswa tidak boleh lagi elit dan arogan, ia butuh untuk membangun kekuatan yang lebih besar dan luas, karena logika perlawanan yang harus dilakukan adalah semakin besar dan represif penguasa dengan kekuasaannya, maka semakin membutuhkan akumulasi dan penggabungan kekuatan perubah atau pendobrak dari sektor dan kelas yang tertindas.

Berangkat dari kesadaran terhadap kegagalan gerakan mahasiswa sebelumnya, menjadikan mahasiswa 90-an membangun gerakan yang lebih populis, ikatan-ikatan gerakan organis mulai diperhatikan dan diterapkan oleh gerakan mahasiswa dengan membangun aliansi dengan kekuatan-kekuatan buruh, tani dan kekuatan masyarakat lainnya, sekalipun disini ikatan yang tercipta tidak harus dilihat pada sisi keuntungan ekonomis, akan tetapi ikatan organis yang ada itu muncul sebagai sebuah keharusan, karena ia muncul sebagai fungsionalisasi kebutuhan antar kekuatan kelompok tertindas untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik.

Pada sisi moralitas gerakan mahasiswa, terlihat pentingnya menjaga moralitas dalam hubungannya dengan masyarakat. Paralelisme persoalan moralitas dalam kaitan gerakan mahasiswa sebagai bagian dari kekuatan rakyat, mengindikasikan kuatnya upaya mahasiswa untuk senantiasa terintegrasi kedalam apa yang ditegaskan oleh Durkheim dalam konsepnya tentang fakta sosial, dimana individu dipaksa, dibimbing, diyakinkan, didorong dengan cara tertentu dipengaruhi oleh pelbagai tipe fakta sosial dalam lingkup sosial. Artinya bahwa gerakan mahasiswa diharuskan

untuk senantiasa memperhatikan posisi dan perannya ditengah masyarakat, dalam hubungannya dengan upaya menjaga moralitas, sekalipun gerakan mahasiswa memiliki definisi moralitas sendiri yang harus dipegang oleh setiap aktivitas gerakan mahasiswa.

Karl Marx menjelaskan bahwa ekonomi sebagai dasar struktur sosial, dan munculnya perlawanan atau kontradiksi kelas karena terjadinya ketidakadilan dalam penguasaan *mode of production*, disinilah munculnya kegamangan dalam melihat munculnya gerakan mahasiswa dari perspektif Karl Marx yang memakai indikator kepemilikan basis material sebagai pemicu munculnya gerakan perlawanan kelas yang tertindas. Karena jelas kalau menganalisa kemunculan gerakan mahasiswa dari analisis Karl Marx di atas, maka jawabannya adalah mahasiswa tidak memiliki “*Mode of production*” sebagaimana kelas yang ada.

Pertanyaan selanjutnya faktor apa yang mempengaruhi mahasiswa untuk bergerak? Jawaban dari pertanyaan di atas akan lebih tepat kalau dilihat dari perspektif Weber yang berkaitan dengan kelas dan deterministik ekonomi dalam hubungannya dengan faktor penyebab munculnya gerakan mahasiswa. Sekalipun Weber mengakui bahwa pengaturan orang-orang secara hirarkis dalam suatu sistem stratifikasi sosial dengan dasar ekonomi untuk kelas sosial, akan tetapi Weber tidak sepakat kalau ekonomi menjadi faktor determinan tunggal dalam pembentukan struktur sosial dan munculnya perjuangan kelas. Weber memberikan porsi yang sama terhadap pembentukan struktur sosial yang didasarkan pada kehormatan atau prestise kedalam apa yang dinamakan Weber sebagai “*kelompok-kelompok status.*” Konflik kelas menurut Weber tidak harus dipengaruhi semata-mata karena disebabkan oleh faktor ekonomi, akan tetapi

kelompok status setidak-tidaknya sama pentingnya sebagai pemicu munculnya perjuangan kelas. Dalam hubungannya dengan gerakan mahasiswa, sekalipun ia tidak memiliki *mode of production*, akan tetapi bagaimanapun mahasiswa juga memiliki kelompok-kelompok status tertentu yang juga memiliki kebutuhan yang sama untuk terjadinya perubahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Surjimiharo., “*Sejarah Perkembangan Sosial Kota Yogyakarta 1880-1930*,” Yayasan Untuk Indonesia Yogyakarta, 2000.
- Agung Wibawanto dkk., *Siasat Buruh di Bawah Represi.*” Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 1998.
- Arbi Sanit., “*Pergolakan Melawan Kekuasaan, Gerakan Mahasiswa Antara Aksi Moral dan Politik*,” Pustaka Pelajar dan Insist Press, Yogyakarta, 1999.
- Arif Budiman, “*Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi*,” PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, November 1997.
- Aris Wibawa (Peny)., Dalam seri perburuhan “*Menuju Hubungan Perburuhan Demokratik*,” Lapera Pustaka Utama dan Fisipol Univ. Atmajayat Yogyakarta, Yogyakarta, 1998.
- Brewer, Anthony, “*Kajian Kritis, Das Kapital Karl Marx*,” Penerbit Teplok Press, Jakarta, 1999.
- Budiman Sujatmiko, “*Pembubaran Parlemen, Lapangan Reformasi Total*,” Artikel SKH, Kompas, Sabtu, 24 Februari 2001.
- Centre For Sosial-Democratic Studies (CSDS), Bahan Diskusi “*Sosialisme, Sosial-Demokrasi*,” Yogyakarta, 1998.

- Coen Husain Pontoh, "NEGARA SEBAGAI PELAYAN MODAL, *Tanggapan Terhadap Tulisan Ali Sugiharjo,*" Dalam KRITIK Jurnal Pembaruan Sosialisme 'Sosialisme dan Masalah Kebangsaan', Volume 3, thn. 1 November - Desember 2000.
- Deliar Noer, "Pemikiran Politik di Negeri Barat," Penerbit Mizan Pustaka, Jakarta, 1997.
- Ebenstein, William and Fogelmen, Edwin, "Isme-Isme Dewasa Ini," Penerbit Erlangga, Jakarta, 1987.
- Elster, Jon "KARL MARX, *Marxisme: Analisis Kritis, Sebuah Analisis Kritis Tokoh Historis Pengguncang Dunia, Perlukan Kita Menolak Komunisme,*" Penerbit Prestasi Pustaka, Jakarta, 2000.
- F. Budi Hardiman, "Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu, Masyarakat, Politik dan posmodernisme Menurut Jurgen Haberman," Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1993.
- Framz Magnis Suseno, "Pemikiran Karl Marx, *Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme,*" Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.
- Gatut Murnianto, dkk., "Aktualisasi Nilai Budaya Bangsa di Kalangan Generasi Muda DIY" DEPDIKBUD DIY, 1999.
- Giddens, Anthony dan Held, David., "Perdebatan Klasik dan Kontemporer, *Mengenai Kelompok, Kekuasaan dan Konflik,*" CV. Rajawali, Jakarta, 1987.
- Giddens, Anthony., "Kapitalisme dan Teori Sosial Modern: *Suatu Analisis Karya-Tulis Karl Marx, Durkheim dan Max Weber,*" Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1985.
- Grant, Ted and Woods, Alas, *Sebuah Analisis "Marxisme dan Perjuangan Melawan Imperialisme,"* London, 25/6/98.
- Gunanto Surjono, "Marxisme dan Komunisme Dalam Peta

- Politik Pemerintah*,” Arikel SKH. Radar Yogya Jawa Pos, Rabu, 6 Mei 2000.
- Hadiz, Vedi R. “*Politik Pembebasan, Teori-Teori Negara Pasca Kolonial*,” Penerbit INSIST Press Bekerjasama Dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.
- Happy Bone Zulkarnaen, Faisal Siagian, Laode Ida (editor)., “*Kelas Menengah Digugat*,” PT Fikahati Aneska, Jakarta, 1993.
- Hariyadhie, “*Perspektif Gerakan Mahasiswa 1987, Dalam Percaturan Politik Nasional*,” PT. Golden Terayon Press, Jakarta, 1994.
- Ingleson, John “*Jalan Ke Pengasingan, Pergerakan Nasional Indonesia Tahun 1927-1934*,” LP3ES, Jakarta, 1988.
- Ipong S. Azhar, “*Radikalisme Petani Masa Orde Baru*,” PT. Terawang, Yogyakarta, 1999.
- James C. Scott., “*MORAL EKONOMI PETANI, Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*” LPES, Jakarta, 1981.
- Landsberger, A. Henry and Alexandrov Yu.G., “*Pergolakan Petani dan Perubahan Sosial*,” CV. Rajawali, Jakarta, 1984.
- Leclerc, J., “*Kemerosotan Gerakan-Gerakan Kiri Dari 1926 Sampai Pembangaiian*,” Jurnal Tanah Air, edisi VIII, 1994, diterbitkan oleh para TAPOL di Negeri Belanda.
- Leirissa, R.Z., “*Sejarah Masyarakat Indonesia 1900-1950*,” CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.
- Mandels, Ernest., dalam pidatonya tentang “*Gerakan Mahasiswa Revolusioner: Teori dan Praktek*,” yang disampaikan pada acara perayaan 70 tahun Universitas Leiden Belanda pada tahun 1970.
- Mangun Wijaya., “*Menggapai Kekuasaan, Memperkuat Gerakan Masyarakat*,” Dalam prisma, edisi 7, PT. Pustaka LP3ES, 1989.

- Meyer, Thomas., “*Sosialisme Demokratis dalam 36 Tesis*,” Friedrich Eberto Stiftung Jakarta, 1988.
- Molyneux, John., “*Karl Marx, Aku Bukan Marxis*,” Teplok Press, Jakarta, 2000
- Muhadi Sugiono, “*Kritik Antonio Gramsci, Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*,” Penerbit Pustaka Pelajar, 1999.
- Nagazumi, Akira (peny.), “*Indonesia Dalam Kajian Serjuna Jepang, Perubahan Sosial Ekonomi Abad XIX & XX, dan Berbagai Aspek Nasionalisme Indonesia*,” Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1986.
- Onghokham, “*Negara, Rakyat dan Golongan Kiri: Konteks Sosial dan Ragam Gerakan Rakyat*,” Jurnal Tanah Air, edisi VIII, 1994 diterbitkan oleh para TAPOL di Negeri Belanda.
- Onghokham, “*Rakyat dan Negara*,” LPES Bekerjasama Dengan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1991.
- Paul Johnson, Doyle “*Teori Sosiologi Klasik dan Modern*.” Penerbit PT. Gramedia, Jakarta, 1988.
- Raillon, Francois, “*Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia: Pembentukan dan Konsolidasi Orde baru 1966-1874*,” Penerbit LP3ES, Jakarta, 1989.
- Ridwan Saidi, “*Mahasiswa dan Lingkaran Politik*” Penerbit Lembaga Pers Mahasiswa Mapussy Indonesia (LPMI), Jakarta, 1989.
- Sarbini Sumawinata, “*Revolusi 1998*,” Penerbit Yayasan Kerakyatan, Jakarta, 1998.
- Sjahir, “*Sosialisme dan Marxisme, Suatu Kritik Terhadap Marxisme*,” Penerbit Djambatan, Jakarta, 1967.
- Soe Hok Gie, “*Zaman Peralihan*,” Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta, 1996.

- Soekarno, Dalam “*Tujuh Penetapan: Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi (TUBAPIN)*,” CV Dua-R, Bandung, 1947.
- Stalin, J.W. “*Matrialisme Dialektika dan Hostoris*,” Penerbit Yayasan Pembaruan, Jakarta, 1955
- Sudiyo, “*Perhimpunan Indonesia Sampai Dengan Lahirnya Sumpah Pemuda*,” PT. Bina Aksara, Jakarta, 1989.
- Susetiawan., “*KONFLIK SOSIAL, Kajian Sosiologis Hubungan Buruh, Perusahaan dan Negara di Indonesia*,” Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000
- Timur Mahardika., “*GERAKAN MASSA” Mengupayakan Demokrasi dan Keadilan Secara Damai*,” Lapera Pustaka Utama Yogyakarta, 2000
- Yozar Anwar, “*Angkatan '66, Sebuah Catatan Harian Mahasiswa*,” Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 1981.
- Yudas Ermadi, Makalah “*Menuju Reformasi Total: Perspektif Gerakan Mahasiswa Sumatra*.”

Internet, Artikel

- [http://ham.go.id/peran-mahasiswa - dalam - mengawal-penyelenggaraan-ham/](http://ham.go.id/peran-mahasiswa-dalam-mengawal-penyelenggaraan-ham/)
- <https://bukuonlinestore.com/partisipasi-mahasiswa-dalam-penegakkan-ham-1/>
- <https://www.kompasiana.com/johanfjrofficial/56239d0d1d23bd4d048b4569/peran-mahasiswa-mencermati-permasalahan-lingkungan>
- http://rri.co.id/post/berita/621465/lingkungan_hidup/mahasiswa_cilacap_tuntut_keadilan_ekologi.html
- <https://dindincam18.wordpress.com/2016/05/01/mahasiswa-dan-lingkungan-hidup/>
- <https://surabaya.tribunnews.com/2019/10/10/datangi->

kantor-dinas-lingkungan-hidup-mahasiswa-sebut-
bangkalan-banjir-sampah?page=2.

<http://dosensosiologi.com/pengertian-empati/>

[https://pmiub.wordpress.com/2013/02/26/
perkembangan-ideologi-dan-gerakan-mahasiswa-dari-
zaman-kegelapan-ke-zaman-kegalauan/](https://pmiub.wordpress.com/2013/02/26/perkembangan-ideologi-dan-gerakan-mahasiswa-dari-zaman-kegelapan-ke-zaman-kegalauan/)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

ABDULLAH MUZAKAR: lahir di Desa Mujur-Lombok Tengah, tanggal 24 Pebruari 1976, dari pasangan Amrillah-Djami'ah. Anak ketiga dari empat bersaudara. Memiliki satu istri bernama Zakrah seorang Guru PNS dan tiga orang anak: Revo, Handika, dan Zakira. Berumah di Dusun Tanaq Beaq Desa Mujur Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah NTB.

Aktivitas sehari-hari sebagai Dosen Tetap dan jabatan struktural sebagai Dekan di Universitas Hamzanwadi Pancor. Disela-sela waktu luangnya melakukan kerja-kerja pendidikan, penelitian, dan pemberdayaan lewat lembaga ELKAM.

